

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM ERA OTONOMI :
TINJAUAN ATAS PERAN DAN PERTUMBUHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA SE-JAWA DAN BALI**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Dhita Anggarani

Nomor Mahasiswa : 10312043

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DALAM ERA OTONOMI :
TINJAUAN ATAS PERAN DAN PERTUMBUHAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA SEJAWA DAN BALI**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata S-1 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Dhita Anggarani

Nomor Mahasiswa : 10312043

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Februari 2014

Penulis



Dhita Anggarani

**PETA KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
DALAM ERA OTONOMI : TINJAUAN ATAS
PERAN DAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA SEJAWA DAN BALI**



الْبَيْتُ الْمَقْدِسُ
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing

Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Peta Kemampuan Keuangan dalam Era Otonomi Tinjauan Atas Peran dan Pertumbuhan
PAD

Disusun Oleh : **Dhita Anggarani**
Nomor Mahasiswa : **10312043**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 18 Maret 2014

Penguji/ Pembimbing Skripsi: Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

Penguji : Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., SAS

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini dengan ikhlas dan setulus hati kepada :

- ♥ Keluarga besarku terutama Ayah dan Mama
- ♥ Dosen pembimbing skripsiku
- ♥ Dosen-dosen FE UII yang telah mengajarkan banyak hal
- ♥ Kekasihku, Imam Hidayat
- ♥ Teman-temanku semua
- ♥ Almamaterku

HALAMAN MOTO

Pengalaman adalah guru yang terbaik tetapi buanglah
pengalaman buruk yang hanya merugikan

(anonym)

Orang yang meminta-minta kepada Tuhan
tidak akan pernah kecewa

(anonym)

Talk is cheap but Actions are expensive

(Bar Refaeli)

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas segala karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peta Kemampuan Keuangan dalam Era Otonomi : Tinjauan atas Peran dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah”** dengan baik. Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai prasyarat untuk mencapai jenjang pendidikan strata satu (S1) pada program studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya kepada penulis.
2. Ayah dan mama atas segala kesabaran, dukungan, do’a dan kepercayaan serta kasih sayang yang diberikan kepada penulis sehingga penulis selalu merasa termotivasi dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini

3. Adikku tersayang, Praditya Utomo yang menginspirasi penulis sehingga penulis dapat menjadi contoh yang baik, terimakasih untuk kasih sayang dan bantuan, serta nasehat yang diberikan kepada penulis.
4. Keluarga besar di Solo dan Klaten, atas perhatiannya dan selalu memberi bantuan tanpa pamrih yang tak henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis merasa sangat bersyukur dan bahagia.
5. Kesit Bambang Prakosa, Drs,. M.Si selaku dosen pembimbing atas kesabaran dan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat serta kemudahan-kemudahan kepada penulis selama ini
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang begitu banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
7. Imam Hidayat S.STP, yang telah 4 tahun ini mendampingi penulis dari awal memulai perkuliahan hingga saat ini dan menjadi “penampung” keluh kesah, terimakasih untuk suka duka, kasih sayang, semangat dan motivasi yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita berdua.
8. Sahabat-sahabat SMA, Mentari, Syinta, Andini, Shella, Annisa, Finda dan Kia, terimakasih untuk segala pengertian, motivasi, semangat yang diberikan dan kebaikan serta do’a kalian, semoga kita tetap menjadi sahabat selamanya dan sukses bersama-sama.

9. Sahabat di Yogyakarta, Monika Yustia dan Prameswari, terimakasih untuk segala bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada penulis dari saat awal memulai perkuliahan hingga saat ini, serta pengertiannya. Semoga kita bisa sukses bersama-sama dan bersahabat selamanya walaupun jarak akan memisahkan kita.
10. Anak-anak kost 128 (mbak Intan, mbak Kiky, mbak Netty, mbak Dinda, Nitta, Riri, Lita dan Vivi), terimakasih untuk dukungan dan nasehat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN Unit 286 (Palupi, Rienzi, Debby, Dika, Revin dan mas Affan), atas suka duka dan selalu bersemangat selama menjalani KKN sehingga kita dapat menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan.
12. Teman-teman seangkatanku Nanny, Ditta, Lia, Gadis dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu mengingatkan penulis tentang skripsi dan berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk dukungan kalian.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan penulis dalam pengalaman dan pengetahuan. Penulis berharap semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Oleh karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikumsalam wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Februari 2014

Penulis,

(Dhita Anggarani)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Berita Acara Ujian Skripsi.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xv
Abstrak.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Rumusan Masalah.....	7
1.3	Tujuan Penelitian.....	7
1.4	Manfaat Penelitian.....	8
1.5	Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....10

2.1	Otonomi Daerah.....	10
2.1.1	Pengertian Otonomi Daerah.....	10
2.1.2	Tujuan Otonomi Daerah.....	11
2.1.3	Peraturan perundang-undangan yang mengatur	

otonomi daerah.....	12
2.2 Desentralisasi Fiskal.....	14
2.3 Kemampuan Keuangan Daerah.....	18
2.4 Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
2.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	20
2.4.3 Pertumbuhan PAD.....	24
2.4.4 Peran (Share) PAD.....	24
2.4.5 Elastisitas PAD.....	25
2.5 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	25
2.6 Kerangka Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Data.....	29
3.2 Sumber Data.....	29
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.4 Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Metode Kuadran.....	33
4.2 Metode Indeks.....	54
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	75
5.3 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran.....	32
Tabel 3.2	Klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode indeks.....	32
Tabel 4.1	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun metode kuadran 2008-2012.....	34
Tabel 4.2	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012 metode kuadran.....	38
Tabel 4.3	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008-2012 metode kuadran.....	42
Tabel 4.4	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012 metode kuadr.....	45
Tabel 4.5	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2008-2012 metode kuadran.....	49
Tabel 4.6	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2012 metode kuadran.....	51
Tabel 4.7	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2008-2012 metode indeks.....	54
Tabel 4.8	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2008-2012 metode indeks.....	56
Tabel 4.9	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008-2012 metode indeks.....	59
Tabel 4.10	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2008-2012 metode indeks.....	60

Tabel 4.11	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2008-2012 metode indeks.....	63
Tabel 4.12	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2012 metode indeks.....	64
Tabel 4.13	Peta Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2008-2012 metode indeks.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Kuadran Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012.....	36
Gambar 4.2	Kuadran Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012.....	40
Gambar 4.3	Kuadran Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008-2012.....	44
Gambar 4.4	Kuadran Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012.....	47
Gambar 4.5	Kuadran Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2008-2012.....	50
Gambar 4.6	Kuadran Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2012.....	52
Gambar 4.7	Kuadran Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2008-2012.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data PAD Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2008-2012.....	80
------------	--	----

Lampiran 2	Data Total Belanja Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2008-2012.....	88
Lampiran 3	Data PDRB Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Tahun 2008-2012.....	96
Lampiran 4	Rasio Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Metode Kuadran	104
	Lampiran 4.1 <i>Share</i> PAD.....	104
	Lampiran 4.2 <i>Growth</i> PAD.....	110
Lampiran 5	Rasio Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Metode Indeks.....	117
	Lampiran 5.1 Indeks <i>Growth</i> PAD.....	117
	Lampiran 5.2 Indeks <i>Share</i> PAD.....	124
	Lampiran 5.3 Indeks Elastisitas.....	132
Lampiran 6	Indeks Kemampuan Keuangan.....	138

ABSTRAK

Kebijakan Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru secara sentralisasi. Otonomi Daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Dalam era otonomi daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pada kenyataannya yang terjadi sekarang ini daerah dinilai masih belum mampu untuk membiayai pengeluarannya secara mandiri dan masih banyak bergantung pada bantuan pemerintah pusat, masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali ditinjau dari aspek peran dan pertumbuhan PAD terhadap total belanja daerah dengan menggunakan indikator Peta Kemampuan Keuangan Daerah melalui analisis peran (*share*) dan pertumbuhan (*growth*) serta elastisitas PAD selama periode tahun 2008-2012.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kemampuan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Policy Fiscal Decentralization and Regional Autonomy born in mid turmoil demands of various regions of the authority which is run by the New Order government centralization. Regional autonomy is a first step towards the development of national economy grew more powerful high by giving a better life for the people of the area. In the era of regional autonomy granted the authority to regulate and manage his own household, and is expected to finance the implementation of self- government through local revenue (PAD). But in fact it is this day is still considered the area has not been able to independently finance their spending and many rely on the help of the central government, still far from the truth. This study aims to determine the financial capacity of local districts or cities in Java and Bali in terms of aspects of the role and growth of revenue expenditure to total area using Capability Map Regional Financial indicators through analysis of the share and growth as well as the elasticity of revenue over a period of years from 2008 to 2012.

Keywords: Autonomy Regional, Fiscal Decentralization, Regional Financial Capability, Local Revenue.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap kewenangan yang selama 20 tahun dijalankan oleh pemerintah Orde Baru secara sentralisasi. Setelah lahirnya reformasi dan runtuhnya rezim Orde Baru, daerah merasakan peluang besar untuk kembali menuntut otonomi luas. Banyak daerah yang menuntut untuk membentuk daerah baru, menuntut pemisahan diri dari negara kesatuan, dan bibit-bibit separatisme mulai tumbuh. Pada tahun 1999, lahirlah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2001. Dengan ditetapkannya undang-undang ini, sejarah ketatanegaraan Indonesia memasuki babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seiring dengan penetapan Undang-Undang no 22 tahun 1999, ditetapkan juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Melalui Undang-Undang tersebut, daerah diberi kesempatan luas untuk mengatur daerahnya dengan ditopang pendanaan yang lebih memadai. (Rosidin, 2010)

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem

desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini menggambarkan perubahan sistem dari yang semula sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Pada era orde baru, segala urusan pemerintahan begitu terpusat sehingga pemerintah daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Hal ini yang mematikan kreativitas dari pemerintah daerah, padahal pemerintah daerah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh daerahnya. Oleh karena itu dengan sistem desentralisasi ini diharapkan akan mampu menciptakan kreativitas dari pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut.

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah pada 1 Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di tiap daerah. Daerah yang kaya dengan sumber daya alam atau sumber penerimaan dan mengeksplorasinya menyambut dengan penuh harapan, sedangkan bagi daerah yang minim sumber daya alam atau sumber penerimaan menanggapinya dengan sedikit rasa pesimis.

Otonomi daerah yang sudah berjalan selama 13 tahun ini telah mengalami banyak perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang mendasarinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui

dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Bachrudin, 2012). Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya melalui PAD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber keuangan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana Perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selain itu Dana Perimbangan juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri dari

Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari pemerintah serta satu kesatuan yang utuh. Selain Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Pendapatan Asli Daerah lainnya yang sah. Dapat dikatakan PAD inilah yang menjadi kunci utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian ini dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sejauh ini transfer Dana Perimbangan yang merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya ((Sidik, 2002) dalam (Hari, 2007)). Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai pelbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya (Deddy, 2003).

(Mardiasmo, 2002) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan

kemampuan dan kehendak sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari harapan sebelumnya. Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan dari pemerintah pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai belanja daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya melalui PAD.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Deddy, 2003) dengan judul “Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah” menunjukkan hasil penelitian bahwa secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Provinsi yang mempunyai sumber daya alam melimpah tidak serta merta memiliki kinerja PAD yang baik.

Penelitian (Hidayat, 2007) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara” menunjukkan hasil penelitian bahwa pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan (*growth*) yang positif tetapi relatif masih kecil peranannya (*share*) dalam struktur APBD dan ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian dalam berotonomi.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Hari, 2007) menunjukkan hasil penelitian bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan PAD, akan tetapi peningkatan PAD mereka tidak sebanding dengan peningkatan Total Belanja mereka dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat justru menjadi lebih tinggi dalam era otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah seharusnya tingkat kemandirian daerah semakin meningkat, tetapi melihat hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu bahwa terdapat beberapa daerah yang belum mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri, banyak yang masih bergantung pada dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu terlihat kecenderungan bahwa hasil penelitian hampir sama sehingga penulis ingin membuktikan bahwa pendapat penulis benar maka dipandang perlu untuk melakukan suatu analisis dan pengkajian tentang kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi di Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali ditinjau dari aspek pertumbuhan dan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD yang

akan digambarkan melalui suatu peta kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode kuadran dan metode indeks melalui analisis ukuran peranan (*share*), pertumbuhan (*growth*) dan elastisitas.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam studi kasus ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan dan peran PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali selama periode tahun 2008-2012
2. Bagaimana peta kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali ditinjau dari aspek pertumbuhan dan peran PAD terhadap APBD selama periode tahun 2008-2012.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertumbuhan dan peran PAD terhadap APBD di Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali dalam era otonomi daerah selama periode tahun 2008-2012
2. Untuk melihat peta kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali dalam era otonomi daerah ditinjau dari aspek pertumbuhan dan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang pertumbuhan dan peran PAD terhadap APBD masing-masing Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali.
2. Memberikan informasi tentang peta kemampuan keuangan pada masing-masing Kabupaten/Kota se-Jawa dan Bali ditinjau dari pertumbuhan dan peran PAD terhadap APBD.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pemaparan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi pemaparan tentang jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian serta teknik analisis data mengenai analisis yang akan dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis metode kuadran dan metode indeks yang kemudian disusun dalam peta kemampuan keuangan kabupaten/kota pada masing-masing provinsi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, definisi Otonomi Daerah sebagai berikut : “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut (Mardiasmo, 2002) Otonomi Daerah adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Kaho (1998) dalam Ana (2010) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Ateng sarifudin dalam (Prihatiningsih, 2010), istilah otonomi daerah mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat).

Jadi secara umum otonomi daerah itu mencakup 3 pengertian :

1. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri
2. Wewenang untuk mengatur daerah sendiri
3. Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri

2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama otonomi daerah menurut (Mardiasmo, 2002) dalam (Kurnia, 2013) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Tujuan peletakan kewenangan keuangan daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

2.1.3 Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah

Peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia adalah sebagai berikut (Winarya Surya Adi Subrata, 2003 dalam Ana, 2010) :

1. UU No. 22 Tahun 1999
2. UU No. 25 Tahun 1999
3. UU No. 32 Tahun 2004
4. UU No. 33 Tahun 2004

Secara umum, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 banyak membawa kemajuan bagi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk mengelola kekayaan daerah guna dimanfaatkan bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Undang-undang ini diharapkan akan membawa angin segar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk didalamnya masyarakat daerah. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangan keinginan dari masyarakat daerah, ternyata undang-undang ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga muncul usulan-usulan dari masyarakat daerah untuk merevisinya. Apalagi setelah terjadinya amandemen UUD 1945, terutama ketika lahirnya peraturan tentang pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, aspirasi yang muncul dari masyarakat daerah juga menuntut dan diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat setempat. Saat itu, peraturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 22

tahun 1999 ini menyatakan bahwa pemilihan tersebut dilakukan oleh DPRD. Akan tetapi, ternyata harapan yang muncul dari masyarakat pada tahun 1999 ini tidak terwujud sehingga memunculkan keinginan dari masyarakat daerah untuk merevisi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Keinginan merevisi undang-undang ini tidak hanya muncul karena kurang terinspirasikannya keinginan masyarakat daerah, tetapi juga dalam rangka menyesuaikan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merujuk pada konstitusi hasil amandemen, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan hal itu, pada tanggal 15 Oktober 2004 disahkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (Rosidin, 2010)

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong

era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002) dalam (Prihatiningsih, 2010)

2.2 Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 7 dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 8, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Definisi desentralisasi sendiri menurut Yustika (2008:28) dalam (Kurnia, 2013) menyangkut berbagai bentuk atau dimensi yang beragam, terutama berkaitan dengan aspek fiskal, politik, administrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan desentralisasi dapat dibagi menjadi empat bidang, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi bidang fiskal dan desentralisasi ekonomi. (Adirinekso : 2001) dalam (Tamtono, 2010). Desentralisasi bidang politik ditunjukkan melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyatnya. Desentralisasi administrasi adalah pemindahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara itu desentralisasi fiskal adalah adanya pembagian wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengenai pendapatan dan pengeluaran. Desentralisasi ekonomi artinya adanya wewenang yang lebih besar kepada daerah untuk

memajukan perekonomiannya dan hal ini bisa terlaksana jika ada dukungan dari desentralisasi bidang yang lain. Desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan (Halim A. , 2004).

Menurut (Sidik, 2002), Desentralisasi Fiskal adalah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan layanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis dengan melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat. Menurut (Saragih, 2003), Desentralisasi Fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan layanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Tujuan Desentralisasi Fiskal adalah membantu 1) meningkatkan alokasi nasional dan efisiensi operasional pemerintah daerah; 2) memenuhi aspirasi daerah, memperbaiki struktur fiskal secara keseluruhan, dan mobilisasi pendapatan daerah dan nasional; 3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan mengembangkan partisipasi konstituen dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah; 4) mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, memastikan pelaksanaan layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, dan mempromosikan sasaran-sasaran efisiensi pemerintah; dan 5) memperbaiki kesejahteraan sosial

rakyat Indonesia (Sidik, 2002) dalam (Bachrudin, 2012) . Selain itu Desentralisasi fiskal juga memiliki berbagai keuntungan, yaitu (1) meningkatkan demokrasi akar rumput, (2) perlindungan atas kebebasan dan hak asasi manusia, (3) meningkatkan efisiensi melalui pendelegasian kewenangan, (4) meningkatkan kualitas pelayanan dan (5) meningkatkan pembangunan ekonomi.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (1999) disebutkan bahwa manfaat adanya kemandirian fiskal adalah :

- a. Mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya serta potensi yang tersedia di daerah.
- b. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah yang memiliki informasi lebih lengkap.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Jumlah bidang pemerintahan yang menjadi tanggungjawab birokrasi adalah sama diantara level kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, namun keberhasilan masing-masing daerah melaksanakan kewenangannya tergantung

kepada daerah yang bersangkutan sesuai dengan kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah dan kondisi setiap daerah. (Bachrudin, 2012)

Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan kemampuan daerah. (Sidik, 2002) dalam (Hari, 2007) menyatakan dalam era otonomi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokal, khususnya pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat mengingat ketergantungan semacam ini akan mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Dari hal tersebut diatas kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Karena itu otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara financial bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Selanjutnya pendapatan tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan daerah baik untuk pengeluaran yang bersifat operasional, pemeliharaan maupun investasi. Melalui kegiatan pengeluaran-pengeluaran tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah bersangkutan.

Namun demikian, potensi tiap-tiap daerah otonom baik sumber daya alam, geografis dan sumber manusia tidak sama. Keadaan ini membuat kemampuan keuangan daerah juga berbeda-beda tergantung potensi yang ada dan kemampuan keuangan daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Oleh karena itu pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal akan terjadi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Permasalahan ini memerlukan adanya kebijakan yang mengurangi ketimpangan baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) maupun horizontal (antar pemerintah daerah). Kebijakan ini berupa dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang disebut Dana perimbangan. Dana perimbangan tersebut berfungsi untuk mengurangi ketimpangan dan membantu daerah untuk dapat melaksanakan desentralisasi

2.3 Kemampuan Keuangan Daerah

Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian ini adalah Pendapatan Asli Daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002)

Otonomi daerah tersebut juga termasuk didalam desentralisasi fiskal yang mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang tinggi.

Desentralisasi fiskal dilakukan pada saat daerah mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda ((Adi, 2005) dalam (Hari, 2007)). Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Deddy, 2003).

Kesiapan daerah menjadi faktor penting yang cukup menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah. Salah satu indikator yang digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan menggunakan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. (Adi, 2012)

Dengan adanya kondisi ini, diperlukan pemetaan kemampuan keuangan daerah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja pemerintah provinsi. Untuk membuat peta kemampuan keuangan digunakan aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digambarkan melalui suatu peta kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode kuadran dan metode indeks melalui analisis elastisitas, ukuran peranan (*share*) dan pertumbuhan (*growth*).

2.4 Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Sedangkan menurut Halim (2007) dalam (Panggabean, 2009) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah.

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

2.4.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Pajak daerah sebagai

salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, daerah Provinsi dan Kabupaten diberi kewenangan untuk mendapatkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jenis Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis-jenis pajak diatas merupakan salah satu dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran dan pembangunan daerah.

2. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Retribusi daerah memiliki cirri-ciri sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan pemerintah daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta
- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi PAD yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan

daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah.

2.4.3 Pertumbuhan PAD (*Growth*)

Menurut (Hidayat, 2007) ciri utama otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat mampu meningkatkan pertumbuhan PAD daerahnya sehingga dapat berperan besar dalam APBD daerahnya. Pertumbuhan PAD ini dapat dilihat dengan membandingkan PAD tahun sekarang dengan PAD tahun yang lalu.

2.4.4 Peran (*Share*) PAD

Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan kemandirian daerah. (Sidik, 2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi daerahnya (keuangan lokal), khususnya sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membiayai belanjanya dilihat dari rasio antara PAD dengan total belanja rutin dan pembangunan daerah (APBD).

2.4.5 Elastisitas PAD

Adapun elastisitas adalah rasio pertumbuhan (*growth*) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Rasio ini bertujuan untuk melihat sensitivitas atau elastisitas PAD terhadap perkembangan ekonomi suatu daerah.

2.5 Hasil Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Deddy, 2003) dengan judul “Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah” menunjukkan hasil jika dilihat dari indikator kinerja PAD secara umum provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kemampuan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi di kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatkan pertumbuhan PAD, namun kemampuan daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD masih dinilai belum mampu dan Provinsi yang memiliki sumber daya yang melimpah tidak serta merta memiliki kinerja PAD yang baik.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Hidayat, 2007) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara” menunjukkan hasil penelitian bahwa dilihat dari peta kemampuan keuangan (metode kuadran) mengindikasikan bahwa ketidaksiapan masing-masing kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara dan masih kurangnya kemandirian daerah dalam berotonomi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan (*growth*) PAD di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, namun secara keseluruhan

Kabupaten/Kota di Sumatera Utara belum mampu untuk membiayai sendiri seluruh kebutuhan belanja daerahnya dari PAD (*share*).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Hari, 2007) dengan judul “Peta Kemampuan Keuangan Daerah sesudah Otonomi Daerah : Apakah mengalami pergeseran?” menunjukkan hasil pada era otonomi berlangsung terjadi peningkatan pertumbuhan (*growth*) dari PAD jika dibandingkan dengan era sebelum otonomi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa setelah otonomi terjadi penurunan peran (*share*) PAD terhadap total belanja daerah jika dibandingkan dengan era sebelum otonomi yang menyebabkan naiknya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

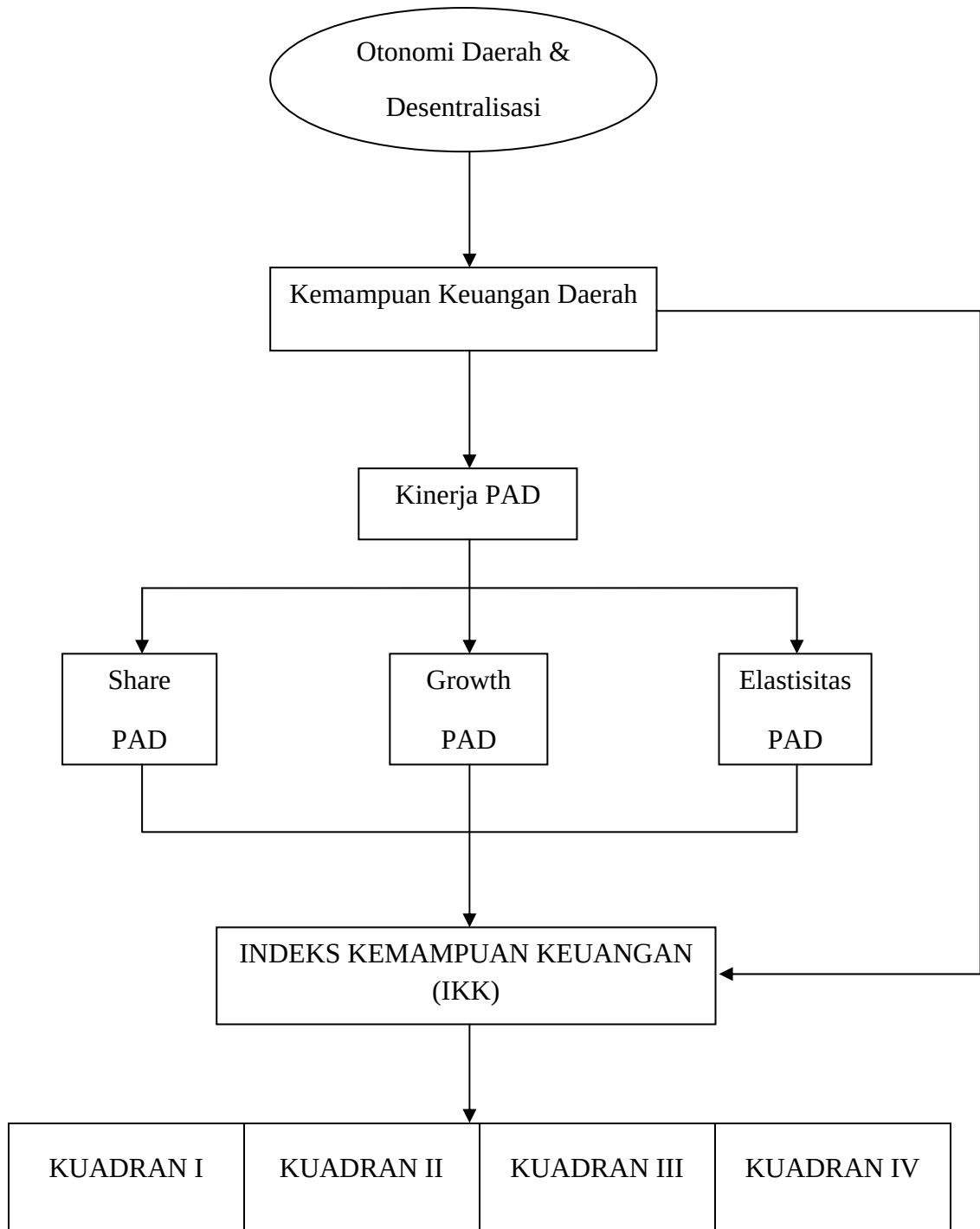
(Adi, 2012) dalam penelitiannya dengan judul “Kemampuan keuangan daerah dalam era ekonomi dan Relevansinya dengan pertumbuhan ekonomi” menunjukkan hasil bahwa secara umum daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan (*growth*) PAD. Tetapi pertumbuhan ini tidak diikuti dengan peningkatan peran (*share*) PAD terhadap belanja. Selanjutnya penelitian ini juga menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Prihatiningsih, 2010) dengan judul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta” menunjukkan hasil bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi karena semakin besarnya kontribusi selain PAD dalam menyumbang pendapatan daerah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2013) dengan judul “Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah” menunjukkan hasil bahwa secara umum pendapatan asli daerah (PAD) DIY dan Jawa Tengah memiliki pertumbuhan (*growth*) yang cukup baik dari tahun ke tahun, hanya saja pertumbuhan PAD tsb tidak dibarengi dengan peningkatan peran (*share*) atau kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa analisis yang dilakukan untuk melihat peta kemampuan keuangan daerah dengan masing-masing kuadran ditentukan oleh besaran nilai pertumbuhan peranan (*share*) dan pertumbuhan (*growth*) PAD terhadap APBD pada masing-masing provinsi.

2.6 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Data tersebut merupakan data dalam bentuk panel Kabupaten/Kota se Jawa dan Bali dari tahun 2008-2012 (Kurniawan, 2013).

3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Alasan penulis memilih daerah tersebut adalah karena kabupaten/kota se Jawa dan Bali memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara teoritis dan empiris berbeda di Luar Jawa dan Bali (Halim A. S., 2003) dalam (Hari, 2007).

Data yang ingin diperoleh penulis adalah data mengenai seberapa besar peran pendapatan asli daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah dalam era otonomi daerah (tahun 2008 sampai dengan tahun 2012) yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementarian Keuangan dan data produk domestik regional bruto (PDRB) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tersebut adalah sebagai berikut (Kurniawan, 2013) :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan melalui pencatatan dokumen serta menyimpan softcopy atas data dan informasi yang diperoleh

2. Teknik Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian ini melalui buku, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Kemampuan keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Untuk menentukan IKK dilakukan langkah-langkah berikut (Adi, 2012) :

1. Perhitungan dan Analisis kinerja PAD melalui ukuran peranan (*share*), pertumbuhan (*growth*) dan elastisitas.

$$Share\ PAD = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\ %$$

$$Growth\ PAD = \frac{(PAD_n - PAD_{n-1})}{PAD_{n-1}} \times 100\ %$$

$$Elastisitas = \frac{Growth\ PAD}{Pertumbuhan\ Ekonomi}$$

Keterangan :

PAD_n = Pendapatan Asli Daerah periode sekarang

PAD_{n-1} = Pendapatan Asli Daerah periode tahun sebelumnya

2. Menyusun Indeks untuk setiap komponen Indeks Kemampuan Keuangan

Indeks ini diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indeks growth (X}_G\text{)} = \frac{G_{\text{Hasil pengukuran}} - G_{\text{Minimum}}}{G_{\text{maksimum}} - G_{\text{Minimum}}}$$

$$\text{Indeks share (X}_S\text{)} = \frac{S_{\text{Hasil pengukuran}} - S_{\text{Minimum}}}{S_{\text{maksimum}} - S_{\text{minimum}}}$$

$$\text{Indeks Elastisitas (X}_E\text{)} = \frac{E_{\text{Hasil pengukuran}} - E_{\text{Minimum}}}{E_{\text{maksimum}} - E_{\text{minimum}}}$$

Berdasarkan rumus indeks diatas, maka rumus Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) adalah sebagai berikut :

$$IKK = \frac{XS + XG + XE}{3}$$

Keterangan :

X_S = Indeks Share PAD terhadap belanja

X_G = Indeks Growth (Pertumbuhan PAD)

X_E = Indeks elastisitas pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

3. Pemetaan dan Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dengan Metode Kuadran dan Metode Indeks menurut (Deddy, 2003)

Menyusun Peta Kemampuan Keuangan berdasarkan IKK yang diperoleh dari perhitungan diatas. Berdasarkan range IKK tertinggi dan IKK terendah, kemudian disusun peta kemampuan keuangan berdasarkan metode kuadran yang dibagi empat kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah dan rendah sekali.

Tabel 3.1 : Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan metode kuadran.

Kuadran	Kondisi
I	Kondisi paling ideal PAD mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share disertai growth yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Sumbangan PAD terhadap APBD masih rendah namun pertumbuhan PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Disini sumbangan PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. PAD belum mengambil peran yang besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : (Deddy, 2003)

Tabel 3.2 : Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan metode indeks

Kemampuan Keuangan	Rasio (%)
Rendah	0,00 – 0,33 %
Sedang	0,34 – 0,43
Tinggi	0,44 – 1,00

Sumber : (Deddy, 2003)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai belanja daerah. Untuk mengetahui peta kemampuan keuangan daerah tersebut dapat digunakan dua metode, yaitu metode kuadran dan metode indeks. Obyek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari kabupaten kota di Jawa dan Bali sedangkan DKI Jakarta tidak dapat dianalisis, karena kabupaten kota di DKI Jakarta tidak melaporkan data keuangan mereka ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk mengetahui peta kemampuan keuangan daerah dapat digunakan analisis kemampuan keuangan dengan menggunakan metode kuadran dan metode indeks. Berikut hasil penelitian dengan menggunakan metode kuadran dan metode indeks.

4.1 Metode Kuadran

Berdasarkan Metode Kuadran, hasil analisis kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2012 diketahui angka rata-rata Indeks *Growth* adalah 28,78 persen dan angka rata-rata Indeks *Share* 12,24 persen. Rincian kemampuan keuangan dan penempatan kuadran masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat adalah sebagai berikut :

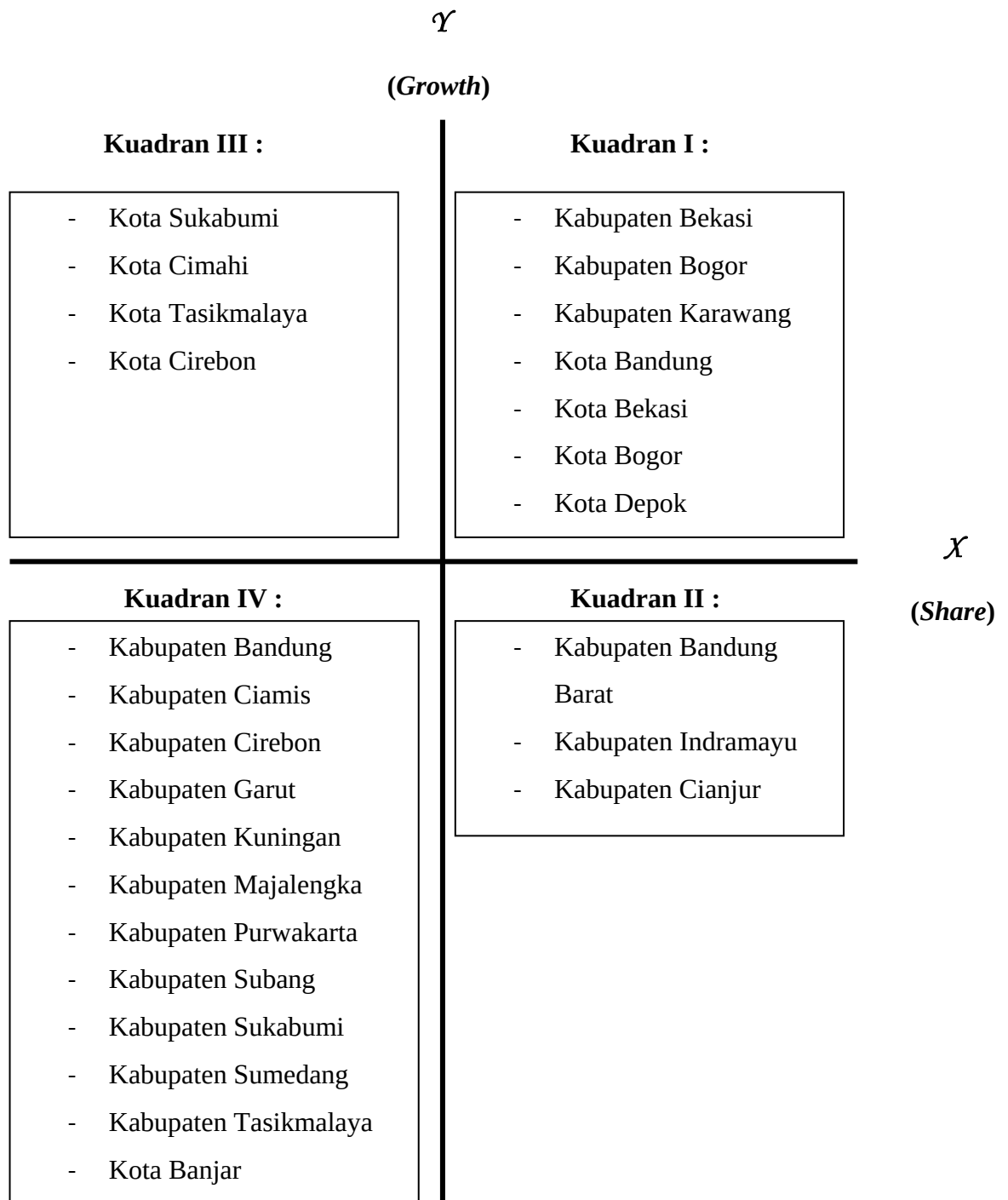
TABEL 4.1
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Kuadran)

Kabupaten Kota	Share PAD	Growth PAD	Kuadran
Kab. Bandung	10.96%	26.98%	4
Kab. Bekasi	23.87%	42.71%	1
Kab. Bogor	20.81%	38.24%	1
Kab. Ciamis	4.08%	18.37%	4
Kab. Cianjur	8.45%	29.41%	2
Kab. Cirebon	10.54%	23.03%	4
Kab. Garut	6.97%	23.06%	4
Kab. Indramayu	7.98%	31.48%	2
Kab. Karawang	16.67%	53.18%	1
Kab. Kuningan	6.46%	23.76%	4
Kab. Majalengka	6.60%	22.01%	4
Kab. Purwakarta	10.79%	27.23%	4
Kab. Subang	6.96%	17.61%	4
Kab. Sukabumi	7.60%	22.64%	4
Kab. Sumedang	10.60%	16.72%	4
Kab. Tasikmalaya	3.77%	6.89%	4
Kota Bandung	21.63%	36.60%	1
Kota Bekasi	22.32%	42.65%	1
Kota Bogor	18.20%	34.97%	1
Kota Cirebon	13.97%	23.25%	3

Kota Depok	19.54%	48.03%	1
Kota Sukabumi	16.25%	23.98%	3
Kota Tasikmalaya	12.44%	25.19%	3
Kota Cimahi	15.28%	22.34%	3
Kota Banjar	8.80%	23.81%	4
Kab. Bandung Barat	6.69%	44.19%	2
Mean	12.24%	28.78%	4

Penyebaran kuadran untuk kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat tersebut cukup merata. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda pada masing-masing kabupaten/kota. Penempatan kabupaten/kota tersebut ke dalam kuadran adalah sebagai berikut :

GAMBAR 4.1
KUADRAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2008 – 2012



Daerah yang termasuk dalam Kuadran I atau memiliki kemampuan keuangan daerah yang ideal sebanyak tujuh daerah. Ketujuh daerah tersebut memiliki struktur PAD yang berperan besar dalam APBD dan memiliki pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun, serta memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal dalam menggali PAD mereka.

Sedangkan daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran II sebanyak tiga daerah. Ketiga daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun namun peranan PAD tersebut dalam APBD masih belum maksimal.

Kemudian daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran III, sebanyak empat daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Sumbangan PAD terhadap APBD cukup besar namun dibarengi dengan pertumbuhan PAD yang kecil dari tahun ke tahun. Akibatnya, terdapat peluang menurunnya sumbangan PAD terhadap APBD akibat pertumbuhan PAD yang belum maksimal.

Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran IV atau kondisi keuangan daerah yang paling buruk, sebanyak dua belas daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang buruk. Selain peran PAD dalam APBD yang masih kecil, pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun juga masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut belum mampu mengembangkan potensi lokal daerah masing-masing secara maksimal.

Sedangkan untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2012, berdasarkan hasil analisis diketahui angka rata-rata Indeks *Growth* adalah 19,47 persen dan angka rata-rata Indeks *Share* 10,27 persen. Rincian kemampuan keuangan dan penempatan kuadran masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

TABEL 4.2
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Kuadran)

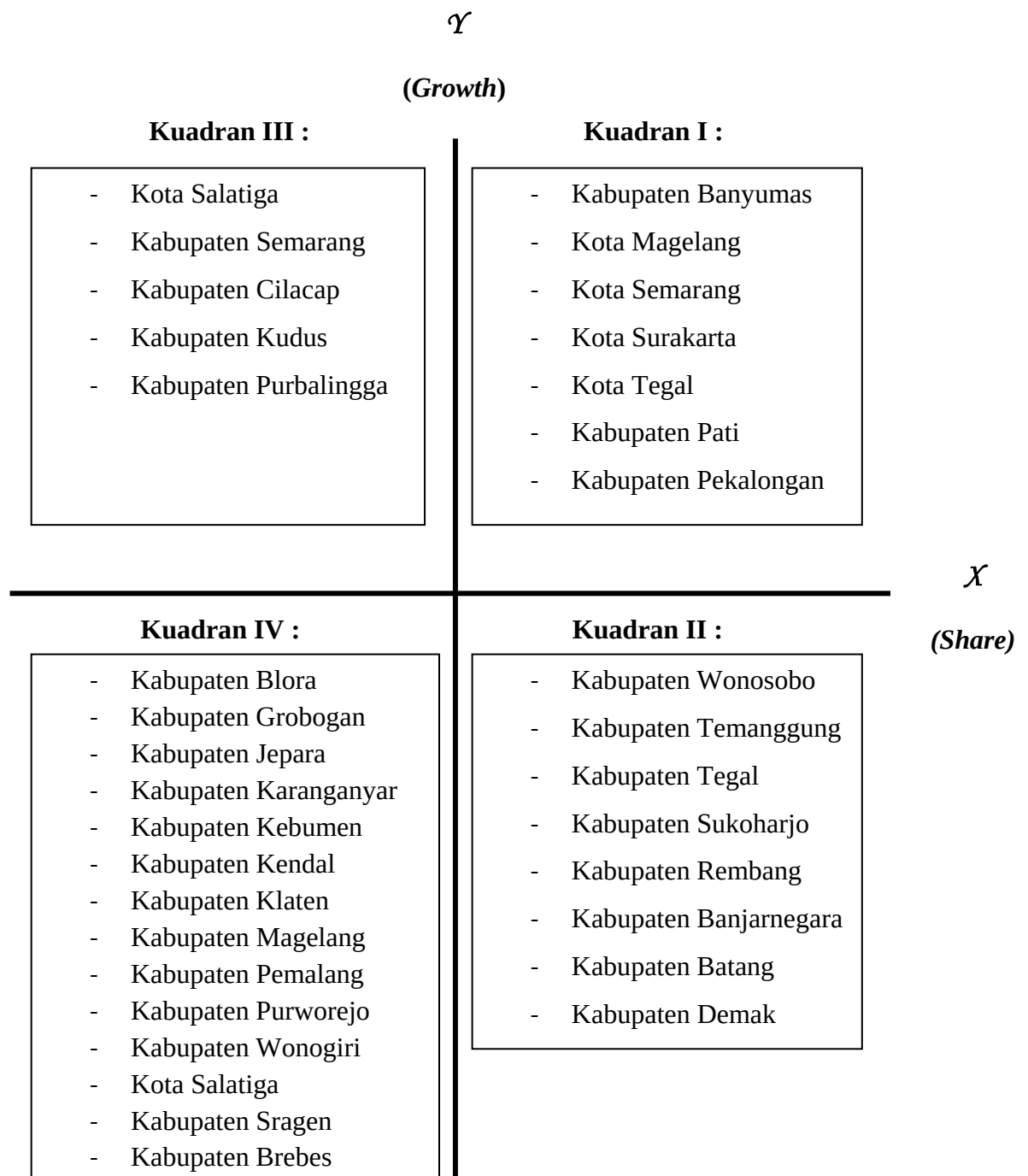
Kabupaten Kota	Share PAD	Growth PAD	Kuadran
Kab. Banjarnegara	7.66%	19.94%	2
Kab. Banyumas	12.65%	22.89%	1
Kab. Batang	8.01%	20.85%	2
Kab. Blora	6.72%	15.23%	4
Kab. Boyolali	9.02%	19.32%	4
Kab. Brebes	7.46%	10.03%	4
Kab. Cilacap	10.76%	17.68%	3
Kab. Demak	7.22%	25.08%	2
Kab. Grobogan	8.61%	15.61%	4
Kab. Jepara	10.00%	16.40%	4
Kab. Karanganyar	9.46%	16.41%	4
Kab. Kebumen	6.89%	16.29%	4
Kab. Kendal	9.49%	14.10%	4
Kab. Klaten	5.40%	14.87%	4

Kab. Kudus	10.36%	14.07%	3
Kab. Magelang	9.30%	13.27%	4
Kab. Pati	10.90%	19.50%	1
Kab. Pekalongan	9.30%	20.71%	2
Kab. Pemalang	8.67%	10.79%	4
Kab. Purbalingga	10.38%	13.64%	3
Kab. Purworejo	8.65%	17.89%	4
Kab. Rembang	9.63%	19.76%	2
Kab. Semarang	12.03%	17.57%	3
Kab. Sragen	9.43%	18.45%	4
Kab. Sukoharjo	9.06%	42.32%	2
Kab. Tegal	8.27%	19.50%	2
Kab. Temanggung	7.74%	20.03%	2
Kab. Wonogiri	7.01%	16.92%	4
Kab. Wonosobo	7.82%	21.35%	2
Kota Magelang	13.42%	23.25%	1
Kota Pekalongan	11.49%	32.95%	1
Kota Salatiga	14.14%	15.15%	3
Kota Semarang	25.30%	32.47%	1
Kota Surakarta	15.93%	24.40%	1
Kota Tegal	21.21%	22.86%	1
Mean	10.27%	19.47%	

Penyebaran kuadran untuk kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah tersebut cukup merata. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah

yang berbeda-beda pada masing-masing kabupaten/kota. Penempatan kabupaten/kota tersebut ke dalam kuadran adalah sebagai berikut :

GAMBAR 4.2
KUADRAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 – 2012



Daerah yang termasuk dalam Kuadran I atau memiliki kemampuan keuangan daerah yang ideal sebanyak tujuh daerah. Ketujuh daerah tersebut memiliki struktur PAD yang berperan besar dalam APBD dan memiliki pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun, serta memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal dalam menggali PAD mereka.

Sedangkan daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran II sebanyak delapan daerah. Kedelapan daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun namun peranan PAD tersebut dalam APBD masih belum maksimal.

Kemudian daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran III, sebanyak lima daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Sumbangan PAD terhadap APBD cukup besar namun dibarengi dengan pertumbuhan PAD yang kecil dari tahun ke tahun. Akibatnya, terdapat peluang menurunnya sumbangan PAD terhadap APBD akibat pertumbuhan PAD yang belum maksimal.

Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran IV atau kondisi keuangan daerah yang paling buruk, sebanyak empat belas daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang buruk. Selain peran PAD dalam APBD yang masih kecil, pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun juga masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut

belum mampu mengembangkan potensi lokal daerah masing-masing secara maksimal.

Berdasarkan Metode Kuadran, hasil analisis atas peta kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2008 – 2012 menunjukkan angka rata-rata Indeks *Growth* sebesar 20,50 persen dan angka rata-rata Indeks *Share* sebesar 10,21 persen. Sehingga tingkat kemampuan keuangan daerah masing-masing daerah adalah sebagai berikut :

TABEL 4.3
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Kuadran)

Kabupaten/Kota	Share PAD	Growth PAD	Kuadran
Kab. Bantul	10.03%	26.56%	2
Kab. Gunung Kidul	5.95%	19.65%	4
Kab. Kulon Progo	7.42%	16.20%	4
Kab. Sleman	17.45%	19.60%	3
Kota Yogyakarta	24.23%	27.10%	1
Mean	10.21%	20.50%	

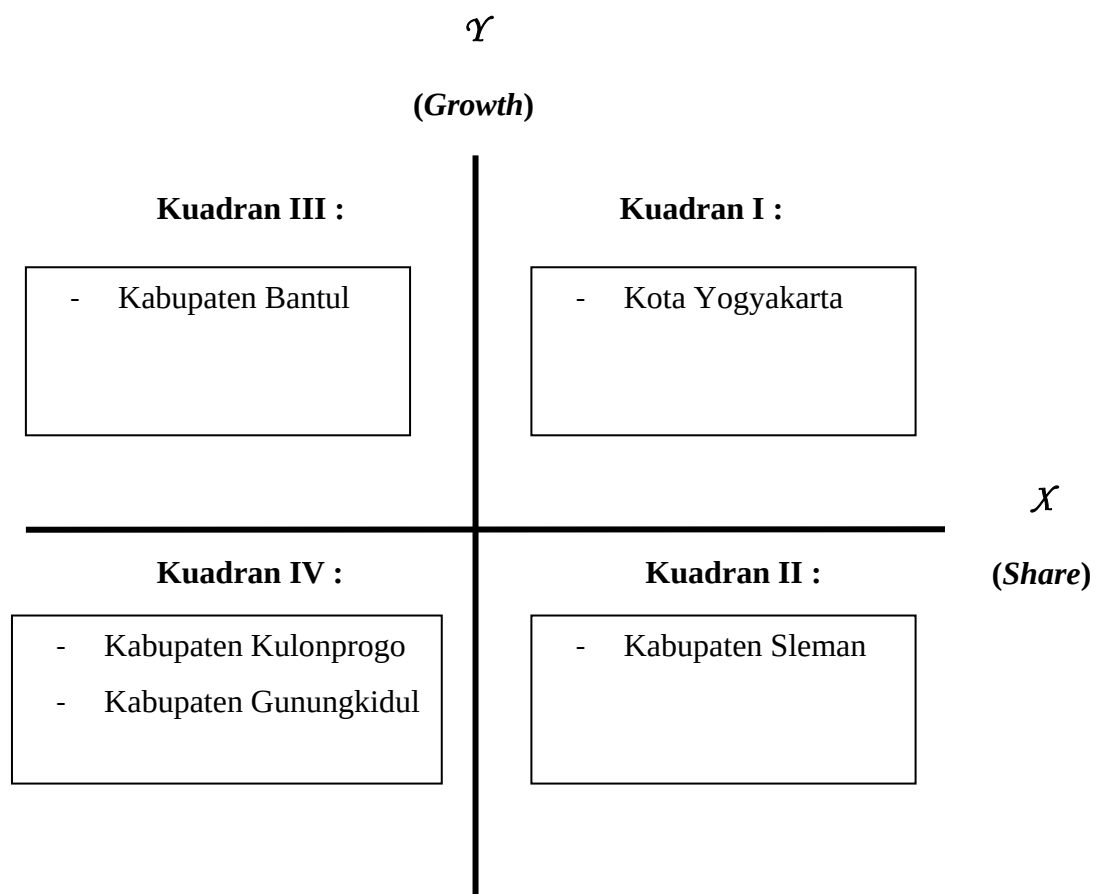
Berdasarkan analisis peta kemampuan keuangan daerah dengan Metode Kuadran, maka dapat diketahui jika Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori Kuadran I sehingga dapat dikatakan memiliki kondisi keuangan daerah yang ideal.

Untuk daerah ini, PAD mengambil peran yang besar dalam APBD serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal. Selain itu, angka pertumbuhan PAD juga menunjukkan perkembangan yang baik dari tahun ke tahun.

Untuk Kabupaten Bantul, termasuk dalam kategori Kuadran II sehingga dapat digambarkan jika daerah ini belum memiliki kondisi keuangan daerah yang cukup ideal. Sumbangan PAD dalam APBD masih rendah, namun dengan pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun.

Sedangkan kabupaten Sleman masuk kuadran III sehingga Daerah-daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Sumbangan PAD terhadap APBD cukup besar namun dibarengi dengan pertumbuhan PAD yang kecil dari tahun ke tahun. Akibatnya, terdapat peluang menurunnya sumbangan PAD terhadap APBD akibat pertumbuhan PAD yang belum maksimal. Dua daerah lainnya, yaitu Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kategori Kuadran IV atau kondisi keuangan daerah yang paling buruk. PAD belum mampu berperan besar dalam APBD serta ditambah dengan angka pertumbuhan PAD yang belum maksimal dari tahun ke tahun. Penempatan kabupaten/kota tersebut ke dalam kuadran adalah sebagai berikut

GAMBAR 4.3
KUADRAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2008 – 2012



Sedangkan untuk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012, berdasarkan hasil analisis diketahui angka rata-rata Indeks *Growth* adalah 16,13 persen dan angka rata-rata Indeks *Share* 9,80 persen. Rincian kemampuan keuangan dan penempatan kuadran masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

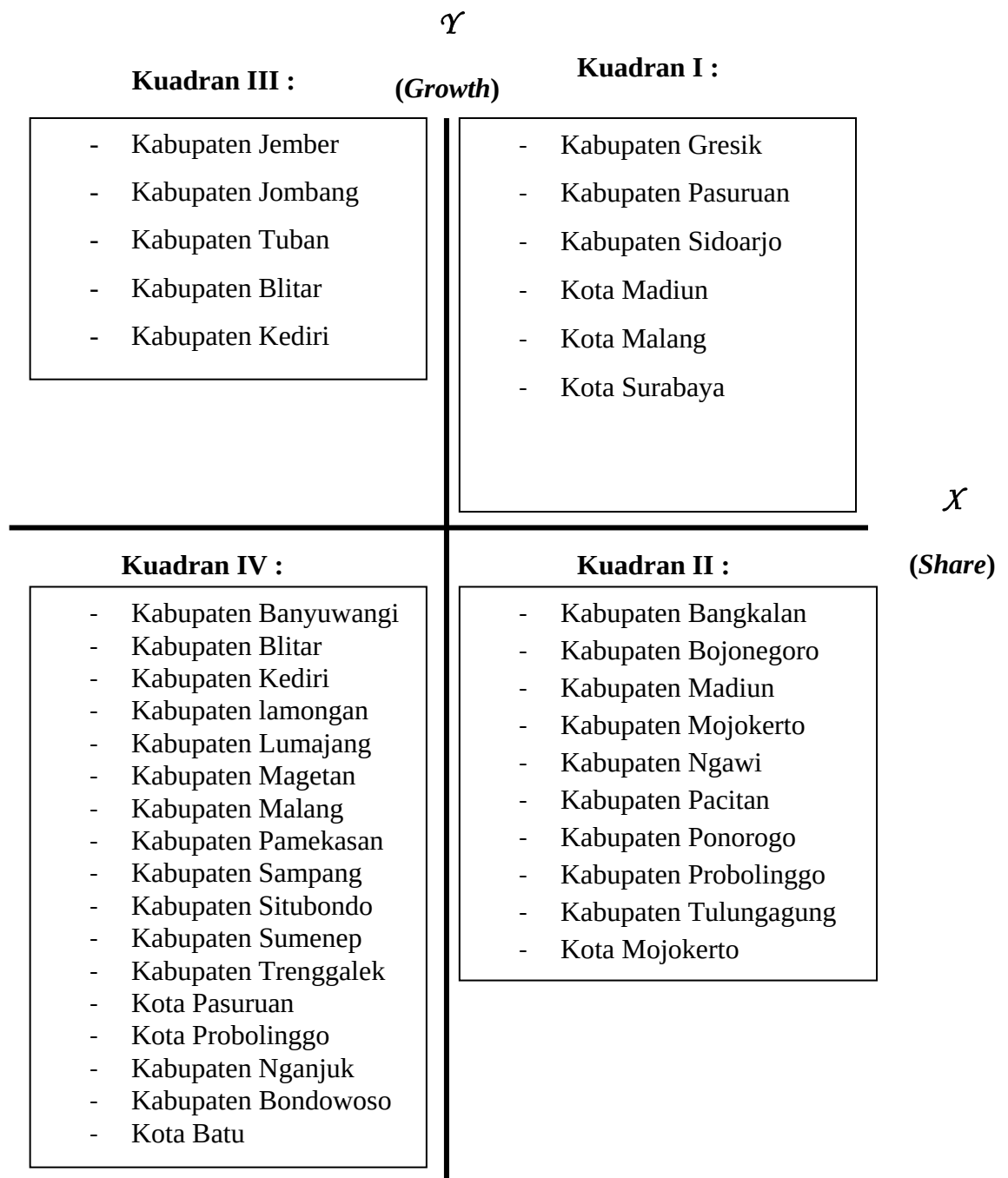
TABEL 4.4
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Kuadran)

Kabupaten/Kota	Share PAD	Growth PAD	Kuadran
Kab. Bangkalan	5.38%	27.09%	2
Kab. Banyuwangi	8.26%	18.62%	4
Kab. Blitar	6.19%	18.26%	4
Kab. Bojonegoro	8.66%	34.05%	2
Kab. Bondowoso	6.47%	22.06%	4
Kab. Gresik	19.63%	36.13%	1
Kab. Jember	10.68%	17.95%	3
Kab. Jombang	11.74%	14.87%	3
Kab. Kediri	7.97%	21.93%	4
Kab. Lamongan	8.52%	18.74%	4
Kab. Lumajang	8.79%	16.56%	4
Kab. Madiun	5.69%	27.48%	2
Kab. Magetan	7.16%	19.35%	4
Kab. Malang	8.88%	21.14%	4
Kab. Mojokerto	9.62%	32.13%	2
Kab. Nganjuk	8.81%	20.30%	4
Kab. Ngawi	4.18%	34.89%	2
Kab. Pacitan	4.94%	26.46%	2
Kab. Pamekasan	7.00%	23.54%	4
Kab. Pasuruan	10.38%	25.92%	1

Kab. Ponorogo	6.53%	29.13%	2
Kab. Probolinggo	7.17%	25.95%	2
Kab. Sampang	5.19%	19.68%	4
Kab. Sidoarjo	23.63%	33.14%	1
Kab. Situbondo	6.55%	19.31%	4
Kab. Sumenep	5.48%	19.50%	4
Kab. Trenggalek	6.35%	19.11%	4
Kab. Tuban	13.45%	21.18%	3
Kab. Tulungagung	9.08%	29.00%	2
Kota Blitar	11.89%	12.16%	3
Kota Kediri	14.18%	13.64%	3
Kota Madiun	10.25%	29.67%	1
Kota Malang	14.27%	30.25%	1
Kota Mojokerto	9.23%	24.47%	2
Kota Pasuruan	8.78%	13.28%	4
Kota Probolinggo	9.66%	16.42%	4
Kota Surabaya	38.05%	37.96%	1
Kota Batu	6.74%	23.54%	4
Mean	9.88%	23.55%	

Penyebaran kuadran untuk kabupaten/kota di propinsi Jawa Tengah tersebut cukup merata. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda pada masing-masing kabupaten/kota. Penempatan kabupaten/kota tersebut ke dalam kuadran adalah sebagai berikut :

GAMBAR 4.4
KUADRAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2008 – 2012



Daerah yang termasuk dalam Kuadran I atau memiliki kemampuan keuangan daerah yang ideal sebanyak enam daerah. Keenam daerah tersebut memiliki struktur PAD yang berperan besar dalam APBD dan memiliki pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun, serta memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal dalam menggali PAD mereka.

Sedangkan daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran II sebanyak sepuluh daerah. Kesepuluh daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun namun peranan PAD tersebut dalam APBD masih belum maksimal.

Kemudian daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran III, sebanyak lima daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Sumbangan PAD terhadap APBD cukup besar namun dibarengi dengan pertumbuhan PAD yang kecil dari tahun ke tahun. Akibatnya, terdapat peluang menurunnya sumbangan PAD terhadap APBD akibat pertumbuhan PAD yang belum maksimal.

Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran IV atau kondisi keuangan daerah yang paling buruk, sebanyak tujuh belas daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang buruk. Selain peran PAD dalam APBD yang masih kecil, pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun juga masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut belum mampu mengembangkan potensi lokal daerah masing-masing secara maksimal.

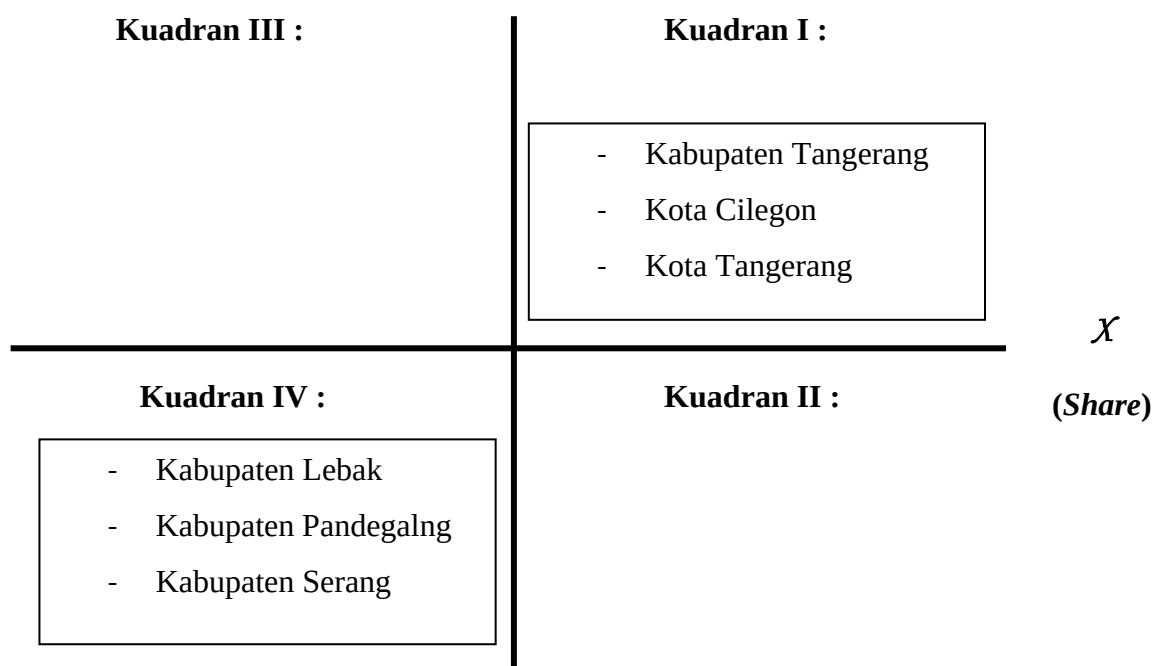
Sedangkan untuk kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2008 – 2012, berdasarkan hasil analisis diketahui angka rata-rata Indeks *Growth* adalah 16,86 persen dan angka rata-rata Indeks *Share* 26,72 persen. Rincian kemampuan keuangan dan penempatan kuadran masing-masing kabupaten/kota di Banten adalah sebagai berikut :

TABEL 4.5
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Kuadran)

Kabupaten/Kota	Share PAD	Growth PAD	Kuadran
Kab. Lebak	7,94 %	10.01 %	4
Kab. Pandeglang	4,33 %	16.93 %	4
Kab. Serang	15,32 %	19.30 %	4
Kab. Tangerang	23,41 %	43.04 %	1
Kota Cilegon	27 %	28.91 %	1
Kota Tangerang	23.12 %	42.13 %	1
Mean	16.86%	26.72%	

Penyebaran kuadran untuk kabupaten/kota di propinsi Banten tersebut cukup merata. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda pada masing-masing kabupaten/kota. Penempatan kabupaten/kota tersebut ke dalam kuadran adalah sebagai berikut :

GAMBAR 4.5
KUADRAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2008 – 2012
 γ
(Growth)



Daerah yang termasuk dalam Kuadran I atau memiliki kemampuan keuangan daerah yang ideal sebanyak tiga daerah. Ketiga daerah tersebut memiliki struktur PAD yang berperan besar dalam APBD dan memiliki pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun, serta memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal dalam menggali PAD mereka.

Kemudian daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran III, sebanyak tiga daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Sumbangan PAD terhadap APBD cukup besar namun dibarengi dengan pertumbuhan PAD yang kecil dari tahun ke tahun. Akibatnya, terdapat peluang menurunnya sumbangan PAD terhadap APBD akibat pertumbuhan PAD yang belum maksimal.

Sedangkan untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008 – 2012, berdasarkan hasil analisis diketahui angka rata-rata Indeks *Growth* adalah 16,86 persen dan angka rata-rata Indeks *Share* 26,72 persen. Rincian kemampuan keuangan dan penempatan kuadran masing-masing kabupaten/kota di Banten adalah sebagai berikut :

TABEL 4.6
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Kuadran)

Kabupaten/Kota	Share PAD	Growth PAD	Kuadran
Kab. Badung	77.68%	25.96%	3
Kab. Bangli	12.90%	36.81%	2
Kab. Buleleng	9.61%	25.31%	4
Kab. Gianyar	20.74%	28.42%	4
Kab. Jembrana	6.78%	23.45%	4
Kab. Karangasem	25.09%	40.02%	1
Kab. Klungkung	17.78%	14.26%	4

Kab. Tabanan	14.14%	36.70%	2
Kota Denpasar	32.01%	31.65%	1
Mean	24.08%	29.18%	

Penyebaran kuadran untuk kabupaten/kota di propinsi Bali tersebut cukup merata. Hal ini menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang berbeda-beda pada masing-masing kabupaten/kota. Penempatan kabupaten/kota tersebut ke dalam kuadran adalah sebagai berikut :

GAMBAR 4.6

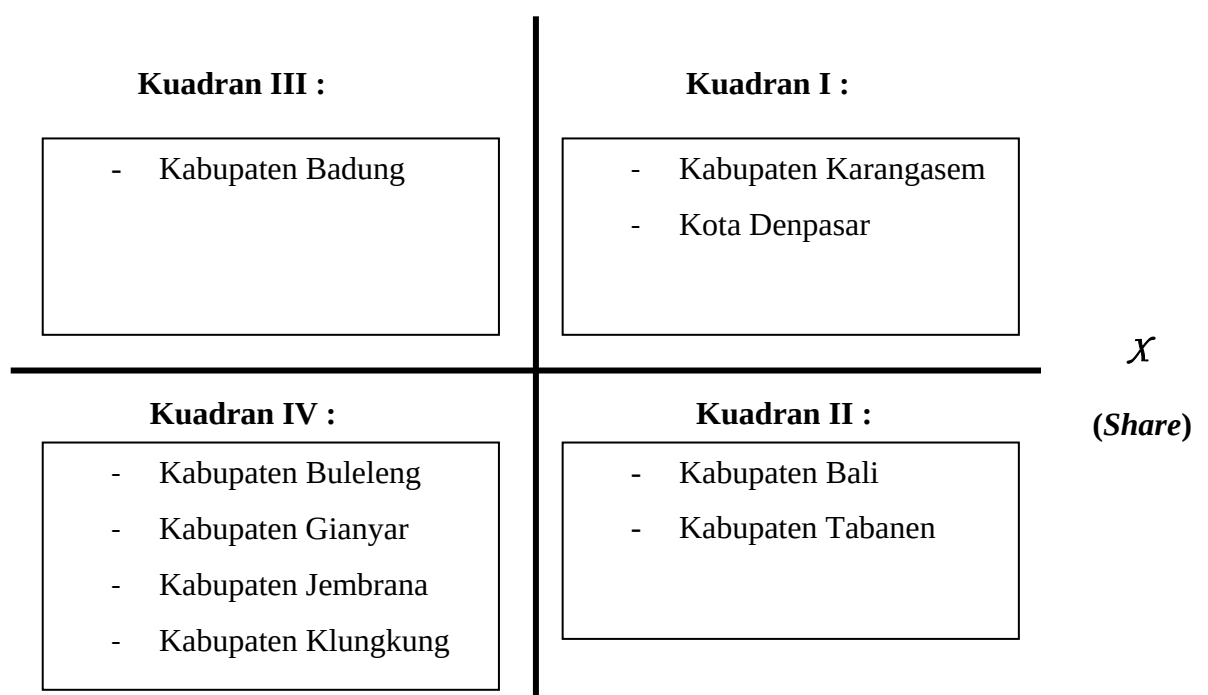
KUADRAN PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

TAHUN 2008 – 2012

γ

(Growth)



Daerah yang termasuk dalam Kuadran I atau memiliki kemampuan keuangan daerah yang ideal sebanyak dua daerah. Kedua daerah tersebut memiliki struktur PAD yang berperan besar dalam APBD dan memiliki pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun, serta memiliki kemampuan mengembangkan potensi lokal dalam menggali PAD mereka.

Sedangkan daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran II hanya terdapat dua daerah. Daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan PAD yang baik dari tahun ke tahun namun peranan PAD tersebut dalam APBD masih belum maksimal.

Kemudian daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran III, sebanyak satu daerah. Daerah tersebut memiliki kondisi keuangan daerah yang belum ideal. Sumbangan PAD terhadap APBD cukup besar namun dibarengi dengan pertumbuhan PAD yang kecil dari tahun ke tahun. Akibatnya, terdapat peluang menurunnya sumbangan PAD terhadap APBD akibat pertumbuhan PAD yang belum maksimal.

Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam kategori Kuadran IV atau kondisi keuangan daerah yang paling buruk, sebanyak empat daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah yang buruk. Selain peran PAD dalam APBD yang masih kecil, pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun juga masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut belum mampu mengembangkan potensi lokal daerah masing-masing secara maksimal.

4.2 Metode Indeks

Hasil analisis atas kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2007 – 2011 dengan Metode Indeks adalah sebagai berikut :

TABEL 4.7
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Indeks)

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Bandung	0.3886	0.3895	0.4862	0.4214	Sedang
Kab. Bekasi	0.3439	0.5493	0.4572	0.4501	Tinggi
Kab. Bogor	0.3381	0.4023	0.4061	0.3822	Sedang
Kab. Ciamis	0.2986	0.3644	0.3551	0.3394	Rendah
Kab. Cianjur	0.3763	0.4584	0.5674	0.4674	Tinggi
Kab. Cirebon	0.4254	0.6293	0.5197	0.5248	Tinggi
Kab. Garut	0.3666	0.3640	0.3952	0.3753	Sedang
Kab. Indramayu	0.5012	0.6808	0.7280	0.6366	Tinggi
Kab. Karawang	0.3243	0.3606	0.3929	0.3592	Sedang
Kab. Kuningan	0.5146	0.5177	0.7262	0.5862	Tinggi
Kab. Majalengka	0.5139	0.6183	0.7347	0.6223	Tinggi
Kab. Purwakarta	0.3605	0.4063	0.4133	0.3934	Sedang
Kab. Subang	0.3590	0.4178	0.3842	0.3870	Sedang
Kab. Sukabumi	0.3833	0.4635	0.4727	0.4398	Sedang
Kab. Sumedang	0.4383	0.5411	0.5576	0.5124	Tinggi

Kab. Tasikmalaya	0.3100	0.3441	0.2228	0.2923	Rendah
Kota Bandung	0.4001	0.4690	0.2613	0.3768	Sedang
Kota Bekasi	0.3950	0.5106	0.5239	0.4765	Tinggi
Kota Bogor	0.3777	0.4578	0.4394	0.4250	Sedang
Kota Cirebon	0.4205	0.2973	0.5108	0.4096	Sedang
Kota Depok	0.3119	0.3097	0.3814	0.3343	Rendah
Kota Sukabumi	0.3909	0.4927	0.5745	0.4860	Tinggi
Kota Tasikmalaya	0.4246	0.5060	0.5484	0.4930	Tinggi
Kota Cimahi	0.4115	0.5557	0.5025	0.4899	Tinggi
Kota Banjar	0.4447	0.5466	0.5766	0.5226	Tinggi
Kab. Bandung Barat	0.3639	0.4158	0.4380	0.4059	Sedang

Atas hasil analisis tersebut diatas, dengan membagi tingkat kemampuan keuangan berdasarkan besaran IKK ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi, maka dapat dilihat tingkat kemampuan keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut :

1. Kategori Kemampuan Keuangan Rendah

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah meliputi Kab. Ciamis, Kab. Tasikmalaya dan Kota Depok

2. Kategori Kemampuan Keuangan Sedang

Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan yang sedang dengan rasio 34%-43% meliputi Kab. Bandung,

Kab. Bogor, Kab. Garut, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon dan Kab. Bandung Barat

3. Kategori Kemampuan Keuangan Tinggi

Sedangkan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan yang tinggi dengan rasio antara 44%-100% adalah sebagai berikut Kab. Bekasi, Kab. Cianjur, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kota Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Banjar Kota Cimahi dan Kota Tasikmalaya.

Hasil analisis atas kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2012 dengan Metode Indeks adalah sebagai berikut :

TABEL 4.8
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Indeks)

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Banjarnegara	0.4290	0.4255	0.5434	0.4660	Tinggi
Kab. Banyumas	0.4302	0.5475	0.5472	0.5083	Tinggi
Kab. Batang	0.3224	0.3334	0.3671	0.3410	Sedang
Kab. Blora	0.3399	0.5868	0.4519	0.4595	Tinggi
Kab. Boyolali	0.3939	0.4804	0.4847	0.4530	Tinggi

Kab. Brebes	0.3140	0.3554	0.4481	0.3725	Sedang
Kab. Cilacap	0.4864	0.5976	0.6437	0.5759	Tinggi
Kab. Demak	0.3628	0.5005	0.4442	0.4358	Sedang
Kab. Grobogan	0.4793	0.4010	0.6349	0.5051	Tinggi
Kab. Jepara	0.3608	0.4139	0.4511	0.4086	Sedang
Kab. Karanganyar	0.4188	0.4852	0.5223	0.4755	Tinggi
Kab. Kebumen	0.2890	0.4855	0.3815	0.3853	Sedang
Kab. Kendal	0.3703	0.5673	0.3882	0.4419	Sedang
Kab. Klaten	0.3799	0.4789	0.4619	0.4402	Sedang
Kab. Kudus	0.4868	0.4263	0.6361	0.5164	Tinggi
Kab. Magelang	0.2743	0.4962	0.3445	0.3717	Sedang
Kab. Pati	0.4311	0.7621	0.5561	0.5831	Tinggi
Kab. Pekalongan	0.3397	0.3417	0.3972	0.3595	Sedang
Kab. Pemalang	0.4416	0.4077	0.5451	0.4648	Tinggi
Kab. Purbalingga	0.5330	0.5230	0.7700	0.6087	Tinggi
Kab. Purworejo	0.4797	0.6299	0.6247	0.5781	Tinggi
Kab. Rembang	0.3654	0.5049	0.4354	0.4352	Sedang
Kab. Semarang	0.4012	0.5657	0.4927	0.4865	Tinggi
Kab. Sragen	0.3597	0.5045	0.4026	0.4223	Sedang
Kab. Sukoharjo	0.3361	0.4046	0.4172	0.3860	Sedang
Kab. Tegal	0.3899	0.4533	0.4711	0.4381	Sedang
Kab. Temanggung	0.4568	0.6407	0.5935	0.5636	Tinggi
Kab. Wonogiri	0.3604	0.4788	0.4251	0.4214	Sedang
Kab. Wonosobo	0.4324	0.5319	0.5542	0.5062	Tinggi
Kota Magelang	0.3940	0.4488	0.4914	0.4447	Sedang
Kota Pekalongan	0.3728	0.4184	0.4647	0.4186	Sedang

Kota Salatiga	0.3824	0.2875	0.4475	0.3724	Sedang
Kota Semarang	0.3375	0.3344	0.4077	0.3599	Sedang
Kota Surakarta	0.3420	0.3564	0.4255	0.3746	Sedang
Kota Tegal	0.4313	0.3906	0.5492	0.4570	Tinggi

Atas hasil analisis tersebut diatas, dengan membagi tingkat kemampuan keuangan berdasarkan besaran IKK ke dalam empat kategori, yaitu sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi, maka dapat dilihat tingkat kemampuan keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut :

1. Kategori Kemampuan Keuangan Rendah

Tidak ada Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rendah

2. Kategori Kemampuan Keuangan Sedang

Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan yang sedang dengan rasio antara 34%-43% meliputi Kab. Batang, Kab. Brebes, Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Kebumen, Kab. Kendal, Kab. Klaten, Kab. Magelang, Kab. Pekalongan, Kab. Rembang, Kab. Sragen, Kab. Sukoharjo, Kab. Tegal, Kab. Wonogiri, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, , Kota Surakarta dan Kota Semarang.

3. Kategori Kemampuan Keuangan Tinggi

Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan yang tinggi dengan rasio anatar 44%-100% meliputi Kab.

Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Blora, Kab. Boyolali, Kab. Cilacap, Kab. Grobogan, Kab. Karanganyar, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Pemalang, Kab. Purbalingga, Kab. Purworejo, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo, Kota Magelang dan Kota Tegal.

Dengan Metode Indeks, hasil analisis yang telah dilakukan atas peta kemampuan keuangan daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2008 – 2012 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.9
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Indeks)

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Bantul	0.3856	0.5298	0.4790	0.4648	Tinggi
Kab. Gunung Kidul	0.4152	0.5873	0.5210	0.5078	Tinggi
Kab. Kulon Progo	0.3514	0.3793	0.4232	0.3846	Sedang
Kab. Sleman	0.3194	0.3639	0.3766	0.3533	Sedang
Kota Yogyakarta	0.3676	0.3742	0.4490	0.3969	Sedang

Berdasarkan hasil analisis peta kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Metode Indeks tersebut, dengan membagi kelima Kabupaten/Kota ke dalam kategori tinggi,

sedang dan rendah, maka dapat diketahui perbandingan kemampuan keuangan antara kelima Kabupaten/Kota. Tidak terdapat daerah yang masuk dalam kategori rendah, Kabupaten Gunung kidul dan Kabupaten Bantul memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dengan rasio antara 44%-100%, sedangkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo memiliki kemampuan keuangan yang sedang dengan rasio antara 34%-43%.

Hasil analisis atas kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2008 – 2012 dengan Metode Indeks adalah sebagai berikut :

TABEL 4.10
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Indeks)

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Bangkalan	0.3834	0.4267	0.4739	0.4280	Sedang
Kab. Banyuwangi	0.4266	0.3226	0.4974	0.4155	Sedang
Kab. Blitar	0.4179	0.5316	0.5239	0.4911	Tinggi
Kab. Bojonegoro	0.4518	0.3554	0.6479	0.4850	Tinggi
Kab. Bondowoso	0.4377	0.5001	0.5701	0.5026	Tinggi
Kab. Gresik	0.3407	0.3251	0.3997	0.3552	Sedang
Kab. Jember	0.3074	0.2899	0.3734	0.3236	Rendah
Kab. Jombang	0.3642	0.2702	0.4055	0.3466	Sedang

Kab. Kediri	0.3853	0.3780	0.8478	0.5370	Tinggi
Kab. Lamongan	0.4119	0.5258	0.5257	0.4878	Sedang
Kab. Lumajang	0.4697	0.6162	0.4235	0.5031	Tinggi
Kab. Madiun	0.4547	0.6299	0.6277	0.5708	Tinggi
Kab. Magetan	0.4309	0.4994	0.5495	0.4933	Tinggi
Kab. Malang	0.5205	0.3868	0.5454	0.4842	Tinggi
Kab. Mojokerto	0.3477	0.4357	0.4156	0.3997	Sedang
Kab. Nganjuk	0.4009	0.4431	0.4561	0.4334	Sedang
Kab. Ngawi	0.4296	0.4110	0.4550	0.4319	Sedang
Kab. Pacitan	0.4050	0.4733	0.4891	0.4558	Tinggi
Kab. Pamekasan	0.4082	0.6573	0.4240	0.4965	Tinggi
Kab. Pasuruan	0.3782	0.3883	0.4337	0.4001	Sedang
Kab. Ponorogo	0.3109	0.3922	0.3640	0.3557	Sedang
Kab. Probolinggo	0.3917	0.4936	0.4850	0.4568	Tinggi
Kab. Sampang	0.3890	0.4255	0.4398	0.4181	Sedang
Kab. Sidoarjo	0.4123	0.4744	0.5529	0.4799	Tinggi
Kab. Situbondo	0.4464	0.5914	0.5949	0.5443	Tinggi
Kab. Sumenep	0.2787	0.3091	0.3396	0.3091	Rendah
Kab. Trenggalek	0.4943	0.7748	0.7049	0.6580	Tinggi
Kab. Tuban	0.3429	0.4119	0.3971	0.3840	Sedang
Kab. Tulungagung	0.4403	0.6253	0.5898	0.5518	Tinggi
Kota Blitar	0.3805	0.4427	0.3720	0.3984	Sedang
Kota Kediri	0.5216	0.4040	0.4405	0.4554	Tinggi
Kota Madiun	0.5073	0.6263	0.7851	0.6396	Tinggi

Kota Malang	0.3934	0.4109	0.4768	0.4270	Sedang
Kota Mojokerto	0.4232	0.5668	0.4415	0.4772	Tinggi
Kota Pasuruan	0.5394	0.3344	0.5326	0.4688	Tinggi
Kota Probolinggo	0.3868	0.3368	0.4727	0.3987	Sedang
Kota Surabaya	0.3831	0.4657	0.4707	0.4398	Sedang
Kota Batu	0.3349	0.5154	0.4712	0.4405	Tinggi

Atas hasil analisis tersebut diatas, dengan membagi tingkat kemampuan keuangan berdasarkan besaran IKK ke dalam tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi, maka dapat dilihat tingkat kemampuan keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut :

1. Kategori Kemampuan Keuangan Rendah

Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan yang rendah dengan rasio <33% meliputi Kab. Sumenep dan Kab. Jember.

2. Kategori Kemampuan Keuangan Sedang

Kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan sedang dengan rasio antara 34%-43% meliputi Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kota Blitar, Kab. Tuban, Kab. Sampang, Kab. Ponorogo, Kab. Pasuruan, Kota Malang, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk, Kab. Mojokerto, Kab. Lamongan, Kab. Jombang, Kab. Gresik, Kab. Banyuwangi dan Kab. Bangkalan.

3. Kategori Kemampuan Keuangan Tinggi

Sedangkan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah dengan kemampuan keuangan yang tinggi dengan rasio 44% - 100% meliputi Kota Batu, Kab. Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Kediri, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek, Kab. Situbondo, Kab. Sidoarjo, Kab. Probolinggo, Kab. Pamekasan, Kab. Pacitan, Kab. Malang, Kab. Magetan, Kab. Madiun, Kab. Lumajang, Kab. Kediri, Kab. Bondowoso, Kab. Bojonegoro, dan Kota Pasuruan

Dengan Metode Indeks, hasil analisis yang telah dilakukan atas peta kemampuan keuangan daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Banten untuk tahun 2008 – 2012 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.11
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Indeks)

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Lebak	0.3664	0.3255	0.4453	0.3791	Sedang
Kab. Pandeglang	0.3963	0.6582	0.4666	0.5070	Tinggi
Kab. Serang	0.3989	0.4236	0.4751	0.4326	Sedang
Kab. Tangerang	0.4136	0.4774	0.5590	0.4834	Tinggi
Kota Cilegon	0.3473	0.3032	0.4184	0.3563	Sedang
Kota Tangerang	0.3680	0.4055	0.7532	0.5089	Tinggi

Berdasarkan hasil analisis peta kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di provinsi Banten dengan Metode Indeks tersebut, dengan membagi kelima Kabupaten/Kota ke dalam kategori tinggi, sedang dan rendah, maka dapat diketahui perbandingan kemampuan keuangan antara keenam Kabupaten/Kota, Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi, sedangkan Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak memiliki kemampuan keuangan yang sedang, serta tidak terdapat daerah yang masuk dalam kategori rendah.

Dengan Metode Indeks, hasil analisis yang telah dilakukan atas peta kemampuan keuangan daerah di Kabupaten/Kota di provinsi Bali untuk tahun 2008 – 2012 adalah sebagai berikut :

TABEL 4.12
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI
TAHUN 2008 – 2012
(Metode Indeks)

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Badung	0.3719	0.6075	0.4053	0.4616	Tinggi
Kab. Bangli	0.3249	0.2115	0.3480	0.2948	Rendah
Kab. Buleleng	0.4662	0.5459	0.5984	0.5368	Tinggi
Kab. Gianyar	0.4251	0.4769	0.5206	0.4742	Tinggi
Kab. Jembrana	0.5642	0.6460	0.9019	0.7040	Tinggi
Kab. Karangasem	0.4199	0.2339	0.5316	0.3951	Sedang

Kab. Klungkung	0.3490	0.2104	0.4739	0.3444	Sedang
Kab. Tabanan	0.4919	0.6274	0.6864	0.6019	Tinggi
Kota Denpasar	0.4220	0.4285	0.5207	0.4571	Tinggi

Hasil analisis peta kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di provinsi Bali dengan Metode Indeks tersebut, dengan membagi Kabupaten/Kota di Bali ke dalam kategori tinggi, sedang, dan rendah maka dapat diketahui perbandingan kemampuan keuangan antara keenam Kabupaten/Kota. Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan memiliki kemampuan keuangan yang tinggi dengan rasio antara 44%-100%, sedangkan Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung memiliki kemampuan keuangan yang sedang dengan rasio antara 34%-43% dan daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang rendah adalah Kabupaten Bangli memiliki kemampuan keuangan rendah dengan rasio <33%.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali sangat beragam. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi bahwa Pendapatan Asli Daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak sebanding dengan peningkatan peran Pendapatan Asli Daerah terhadap masing-masing daerah, sebagian besar daerah masih terlihat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerahnya, hal ini

terlihat dari perhitungan peran (*share*) PAD masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.

Adanya ketergantungan daerah kepada pusat menimbulkan indikasi terjadinya risiko fiskal daerah. Jika benar demikian maka beban pemerintah pusat semakin meningkat padahal telah terjadi pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini tentu saja berlawanan dengan semangat otonomi itu sendiri. Otonomi perlu kembali pada semangat awal untuk menjadikan daerah nyata-nyata mandiri. Ketergantungan tersebut merupakan dampak dari kebijakan otonomi daerah yang belum memberikan diskresi terhadap daerah untuk meningkatkan kemampuan memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari usaha daerah tersebut sendiri. (Fiskal, Badan Kebijakan, 2013). Berikut ini disajikan peta kemampuan keuangan meliputi seluruh kabupaten/kota seJawa dan Bali.

GAMBAR 4.7

PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA di JAWA dan BALI

Berdasarkan metode kuadran

Tahun 2008 - 2012

γ

(Growth)

Kuadran III :

Kota Sukabumi	Kab. Jombang
Kab. Badung	Kab. Jember
Kota Cimahi	
Kab. Kediri	
Kota Tasikmalaya	
Kab. Blitar	
Kota Cirebon	
Kab. Tuban	
Kota Salatiga	
Kab. Semarang	
Kab. Cilacap	
Kab. Kudus	
Kab. Purbalingga	
Kab. Sleman	

Kuadran I :

Kab. Bekasi	Kab. Tangerang
Kab. Bogor	Kota Cilegon
Kab. Karawang	Kota Tangerang
Kota Bandung	Kab. Karangasem
Kota Bekasi	Kota Denpasar
Kota Bogor	Kab. Gresik
Kota Depok	Kab. Pasuruan
Kab. Banyumas	Kab. Sidoarjo
Kota Magelang	Kab. Pekalongan
Kota Semarang	Kota Malang
Kota Surakarta	Kota Madiun
Kota Tegal	Kota Surabaya
Kab. Pati	Kota Yogyakarta

 x **Kuadran IV :**

Kab. Badung	Kab. Lumajang
Kab. Ciamis	Kab. Magetan
Kab. Cirebon	Kab. Malang
Kab. Garut	Kab. Pamekasan
Kab. Kuningan	Kab. Sampang
Kab. Majalengka	Kab. Situbondo
Kab. Purwakarta	Kab. Sumenep
Kab. Subang	Kab. Trenggalek
Kab. Sukabumi	Kota Pasuruan
Kab. Sumedang	Kota Probolinggo
Kab. Sukabumi	Kab. Nganjuk
Kab. Sumedang	Kab. Bondowoso
Kab. Tasikmalaya	Kota Batu
Kota Banjar	Kab. Lebak
Kab. Blora	Kab. Pandeglang
Kab. Grobogan	Kab. Serang
Kab. Jepara	Kab. Buleleng
Kab. Karanganyar	Kab. Gianyar
Kab. Kebumen	Kab. Jembrana
Kab. Kendal	Kab. Klungkung
Kab. Klaten	Kab. Kulon Progo
Kab. Magelang	Kab. Gunung Kidul
Kab. Pemalang	Kab. Purworejo
Kab. Wonogiri	Kota Salatiga
Kab. Sragen	Kab. Brebes
Kab. Banyuwangi	Kab. Blitar
Kab. Kediri	Kab. Lamongan

Kuadran II :

Kab. Cianjur
Kab. Sukoharjo
Kab. Bantul
Kab. Indramayu
Kab. Bandung Barat
Kab. Rembang
Kab. Buleleng
Kab. Banjarnegara
Kab. Batang
Kab. Wonosobo
Kab. Bantul
Kab. Tegal
Kab. Temanggung
Kab. Demak
Kab. Tabanan
Kab. Bali
Kab. Mojokerto
Kab. Tulungagung
Kab. Pacitan
Kab. Ponorogo
Kab. Probolinggo
Kab. Bangkalan
Kab. Bojonegoro
Kab. Ngawi
Kab. Mojokerto
Kab. Madiun

(Share)

TABEL 4.13
PETA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA di JAWA DAN BALI
Berdasarkan metode indeks
Tahun 2008 – 2012

NAMA KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN	STATUS KEMAMPUAN KEUANGAN
Kab. Tabanan	0.6019	Tinggi
Kota Denpasar	0.4571	Tinggi
Kab. Gianyar	0.4742	Tinggi
Kab. Jembrana	0.7040	Tinggi
Kab. Buleleng	0.5368	Tinggi
Kab. Badung	0.4616	Tinggi
Kota Tangerang	0.5089	Tinggi
Kab. Tangerang	0.4834	Tinggi
Kota Batu	0.4405	Tinggi
Kab. Probolinggo	0.4568	Tinggi
Kab. Pacitan	0.4558	Tinggi
Kab. Pamekasan	0.4965	Tinggi
Kab. Sidoarjo	0.4799	Tinggi
Kota Kediri	0.4554	Tinggi
Kota Mojokerto	0.4772	Tinggi
Kota Pasuruan	0.4688	Tinggi
Kab. Bojonegoro	0.4850	Tinggi
Kab. Lamongan	0.4878	Tinggi
Kab. Magetan	0.4933	Tinggi
Kab. Malang	0.4842	Tinggi
Kab. Pandeglang	0.5070	Tinggi
Kota Madiun	0.6396	Tinggi
Kab. Tulungagung	0.5518	Tinggi
Kab. Trenggalek	0.6580	Tinggi
Kab. Situbondo	0.5443	Tinggi
Kab. Lumajang	0.5031	Tinggi
Kab. Madiun	0.5708	Tinggi
Kab. Blitar	0.4911	Tinggi

Kab. Kediri	0.5370	Tinggi
Kab. Bondowoso	0.5026	Tinggi
Kota Tegal	0.4570	Tinggi
Kab. Bantul	0.4648	Tinggi
Kab. Gunung Kidul	0.5078	Tinggi
Kab. Wonosobo	0.5062	Tinggi
Kab. Temanggung	0.5636	Tinggi
Kab. Semarang	0.4865	Tinggi
Kab. Purbalingga	0.6087	Tinggi
Kab. Purworejo	0.5781	Tinggi
Kab. Pemalang	0.4648	Tinggi
Kab. Pati	0.5831	Tinggi
Kota Magelang	0.4447	Tinggi
Kab. Kendal	0.4419	Tinggi
Kab. Klaten	0.4402	Tinggi
Kab. Kudus	0.5164	Tinggi
Kab. Karanganyar	0.4755	Tinggi
Kab. Grobogan	0.5051	Tinggi
Kab. Cilacap	0.5759	Tinggi
Kab. Blora	0.4595	Tinggi
Kab. Boyolali	0.4530	Tinggi
Kab. Banjarnegara	0.4660	Tinggi
Kab. Banyumas	0.5083	Tinggi
Kota Cimahi	0.4899	Tinggi
Kota Banjar	0.5226	Tinggi
Kota Sukabumi	0.4860	Tinggi
Kota Tasikmalaya	0.4930	Tinggi
Kota Bekasi	0.4765	Tinggi
Kab. Sumedang	0.5124	Tinggi
Kab. Kuningan	0.5862	Tinggi
Kab. Majalengka	0.6223	Tinggi
Kab. Cianjur	0.4674	Tinggi
Kab. Cirebon	0.5248	Tinggi
Kab. Indramayu	0.6366	Tinggi

Kab. Bekasi	0.4501	Tinggi
Kab. Bandung	0.4214	Sedang
Kab. Bogor	0.3822	Sedang
Kab. Garut	0.3753	Sedang
Kab. Karawang	0.3592	Sedang
Kab. Purwakarta	0.3934	Sedang
Kab. Subang	0.3870	Sedang
Kab. Sukabumi	0.4398	Sedang
Kota Bandung	0.3768	Sedang
Kota Bogor	0.4250	Sedang
Kota Cirebon	0.4096	Sedang
Kab. Bandung Barat	0.4059	Sedang
Kab. Batang	0.3410	Sedang
Kab. Brebes	0.3725	Sedang
Kab. Demak	0.4358	Sedang
Kab. Jepara	0.4086	Sedang
Kab. Kebumen	0.3853	Sedang
Kab. Magelang	0.3717	Sedang
Kab. Pekalongan	0.3595	Sedang
Kab. Rembang	0.4352	Sedang
Kab. Sragen	0.4223	Sedang
Kab. Sukoharjo	0.3860	Sedang
Kab. Tegal	0.4381	Sedang
Kab. Wonogiri	0.4214	Sedang
Kota Pekalongan	0.4186	Sedang
Kota Salatiga	0.3724	Sedang
Kota Semarang	0.3599	Sedang
Kota Surakarta	0.3746	Sedang
Kab. Kulon Progo	0.3846	Sedang
Kab. Sleman	0.3533	Sedang
Kota Yogyakarta	0.3969	Sedang
Kab. Bangkalan	0.4280	Sedang
Kab. Banyuwangi	0.4155	Sedang
Kab. Nganjuk	0.4334	Sedang

Kab. Ngawi	0.4319	Sedang
Kab. Pasuruan	0.4001	Sedang
Kab. Sampang	0.4181	Sedang
Kota Malang	0.4270	Sedang
Kota Surabaya	0.4398	Sedang
Kab. Lebak	0.3791	Sedang
Kab. Serang	0.4326	Sedang
Kota Cilegon	0.3563	Sedang
Kab. Tuban	0.3840	Sedang
Kota Blitar	0.3984	Sedang
Kota Probolinggo	0.3987	Sedang
Kab. Mojokerto	0.3997	Sedang
Kab. Ponorogo	0.3557	Sedang
Kab. Gresik	0.3552	Sedang
Kab. Jombang	0.3466	Sedang
Kab. Karangasem	0.3951	Sedang
Kab. Klungkung	0.3444	Sedang
Kab. Ciamis	0.3394	Rendah
Kab. Tasikmalaya	0.2923	Rendah
Kota Depok	0.3343	Rendah
Kab. Jember	0.3236	Rendah
Kab. Sumenep	0.3091	Rendah
Kab. Bangli	0.2948	Rendah

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan Metode Kuadran dan Metode Indeks diketahui bahwa rata-rata tingkat kemampuan keuangan daerah di Kabupaten/Kota Jawa dan Bali cukup beragam. Hasil penelitian ini membenarkan pendapat penulis sebelumnya bahwa secara umum Pendapatan Asli Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Jawa dan Bali menunjukkan kondisi yang meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari perhitungan analisis *share* dan *growth* PAD, begitu juga dengan Total Belanja dan Produk Domestik Regional Bruto masing-masing daerah menunjukkan kondisi yang meningkat, namun peningkatan ini tidak dibarengi dengan peningkatan peran PAD terhadap APBD masing-masing daerah, hal ini kemungkinan terjadi dikarenakan peningkatan PAD tidak seimbang dengan total pengeluaran pada masing-masing daerah ataupun total pengeluaran yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Akibatnya terjadi ketergantungan fiskal daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini menimbulkan indikasi terjadinya risiko fiskal daerah dimana total pengeluaran daerah lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, sehingga menimbulkan beban kepada pemerintah pusat yang semakin tinggi.

Berikut ini dapat disimpulkan dalam beberapa hal yang terkait dengan peta kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa dan Bali untuk tahun 2008 – 2012, :

1. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada masing-masing daerah, daerah yang berada di Kuadran I berarti menunjukkan peran (*share*) dan pertumbuhan (*growth*) PAD yang tinggi terhadap APBD masing-masing daerah Kabupaten/Kota, daerah yang mendominasi kuadran I secara umum merupakan ibukota provinsi dan kota-kota yang mempunyai potensi wisata atau sumber penerimaan yang besar bagi PAD, Kota Madiun dengan *share* PAD 10,25 persen dan *growth* PAD 29,67 persen menempati posisi paling bawah dan Kota Surabaya dengan *share* PAD 38,05 persen dan *growth* PAD 37,96 persen menempati posisi paling atas dalam Kuadran I. Untuk daerah yang masuk pada kuadran II menunjukkan kondisi bahwa peran PAD masih rendah terhadap APBD, namun pertumbuhan PAD tinggi. Daerah yang berada di kuadran ini memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal sehingga PAD memiliki peluang untuk untuk berperan besar pada APBD. Kabupaten Ngawi dengan *share* PAD dengan 4,18 persen dan *growth* PAD dengan 34,98 persen menempati posisi paling bawah dan Kabupaten Rembang dengan *share* PAD dengan 9,63 persen dan *growth* PAD dengan 19,76 persen menempati posisi paling atas pada Kuadran II. Untuk Pada Kuadran III menunjukkan bahwa peran PAD terhadap APBD tinggi, namun pertumbuhan PAD masih rendah sehingga berpeluang peran PAD dalam APBD mengecil. Kabupaten Kudus berada pada posisi paling bawah dengan presentase *share*

PAD 10,36 persen dan *growth* PAD dengan 14,07 persen dan Kabupaten Sukabumi dengan *share* PAD 16,25 persen dan *growth* PAD dengan 23,98 persen berada pada posisi paling atas di Kuadran III. Pada Kuadran terakhir yaitu Kuadran IV menunjukkan peran PAD terhadap APBD rendah dan pertumbuhan PAD pun juga masih rendah didasarkan pada mean masing-masing daerah. Kabupaten Tasikmalaya berada pada posisi paling bawah dengan *share* PAD 3,77 persen dan *growth* PAD dengan 6,89 persen dan Kabupaten Karangasem dengan *share* PAD dengan 24,09 persen dan *growth* PAD dengan 40,02 persen.

2. Berdasarkan hasil analisis IKK dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah di Jawa dan Bali cukup beragam didasarkan pada skala rasio. Untuk daerah yang masuk dalam kondisi keuangan rendah dengan skala rasio <33% meliputi 6 Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, dengan persentase 29 persen Kabupaten Tasikmalaya menduduki posisi paling bawah dan 33 persen untuk Kabupaten Ciamis berada dalam posisi atas untuk kategori rendah. Untuk daerah yang masuk dalam kategori sedang dengan skala rasio 34%-43% meliputi 50 Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, untuk posisi paling bawah yaitu Kabupaten Batang dengan persentase 34 persen dan Kota Surabaya dengan 43 persen berada pada posisi atas dalam kategori sedang. Terakhir untuk daerah yang masuk dalam kategori tinggi dengan skala rasio 44%-100% meliputi 63 Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, dengan presentase 44 persen Kabupaten Klaten berada pada posisi paling bawah dan Kabupaten Jembrana dengan

presentase 70 persen menempati posisi paling atas berada pada posisi paling atas dalam kategori Tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan obyek penelitian pemerintahan Kabupaten Kota di Jawa dan Bali dengan periode 2008-2012
2. Penelitian ini tidak menggunakan kabupaten/kota di DKI Jakarta karena pemerintah kota Jakarta tidak melaporkan data keuangan mereka ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
3. Penelitian ini tidak menggunakan analisis peta kemampuan daerah yang lain dengan periode yang sama.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, berikut beberapa saran yang penulis dapat sampaikan :

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), contohnya untuk daerah yang mempunyai potensi wisata diharapkan dapat lebih memanfaatkan potensi tersebut untuk dijadikan sebagai objek wisata sehingga dapat meningkatkan PAD daerahnya, selain itu dapat dilakukan dengan mengelola pajak daerah secara kolektif

2. Daerah dengan kemampuan keuangan sedang perlu mendapat dorongan agar PAD-nya tumbuh disertai dengan pengeluaran belanja daerah yang seimbang sesuai dengan kemampuan daerahnya masing-masing.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat menambah objek penelitian khususnya pada daerah-daerah di luar pulau Jawa yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, dengan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berbeda.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk membandingkan peta kemampuan daerah sebelum otonomi dan setelah pemberlakuan otonomi daerah.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan analisis peta kemampuan daerah yang lain seperti rasio kemandirian, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, P. H. (2005). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi . *Jurnal Kritis* .
- Adi, P. H. (2012). Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi.
- Bachrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Deddy, B. (2003). Peta Kemampuan Keuangan provinsi dalam era otonomi daerah : Tinjauan atas kinerja PAD, dan Upaya yang dilakukan daerah.
- Fiskal, Badan Kebijakan. (2013, Oktober 17). *Risiko Fiskal*. Retrieved February 5, 2014, from Kementerian Keuangan RI:
<http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/2010/edef-konten-view.asp?id=20131017084903966343705>
- Gideon, T. B., & Priyo, H. A. (2007). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah. *Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. Surabaya.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN .
- Halim, A. S. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali Simposium Nasional Akuntansi VI .
- Hari, W. S. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah sesudah Otonomi daerah : Apakah mengalami pergeseran? *Simposium Nasional Akuntansi X* .
- Hidayat, P. (2007). Analisis kinerja keuangan kabupaten/kota pemekaran di Sumatera Utara. *Ekonomi Pembangunan* .
- Keuangan, K. (2012, November 26). *Data Keuangan*. Retrieved December 2013, from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan:
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>
- Kurnia, E. D. (2013). Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi.

- Kurniawan, A. R. (2013). Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di Provisis Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- Mardiasmo. (2002). Retrieved from ekonomi rakyat.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah sebagai Upaya memperkuat basis perekonomian Daerah*. Retrieved from http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Good Governance*. Yogyakarta: Andi.
- Panggabean, H. E. (2009). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Toba Samosir.
- Prihatiningsih, A. (2010). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Surakarta.
- Rosidin, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi* . Bandung: Pustaka Setia.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
- Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia. *Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia* .
- Statistik, B. P. (2012, Agustus 20). *Publikasi BPS*. Retrieved December 2013, from Badan Pusat Statistik Nasional: <http://www.bps.go.id/>
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV. ALFABETA.
- Tamtono, E. (2010). Analisis Pertumbuhan Ekonomi.

LAMPIRAN

Lampiran 1

DATA PAD

Kab/ Kota	PAD 2008	PAD 2009	PAD 2010	PAD 2011	PAD 2012
Provinsi Jawa Barat					
Kab. Bandung	144.660.409.277,08	153.271.649.974,00	198.650.518.839	291.062.396.559,70	366.317.000.000
Kab. Bekasi	249.063.806.936,00	287.299.507.395,00	258.671.098.123	599.070.130.849,00	801.853.000.000
Kab. Bogor	307.634.448.365,00	337.903.884.329,00	399.263.956.504	696.986.388.875,99	1.048.230.000.000
Kab. Ciamis	46.847.498.084,00	51.276.555.046,00	50.512.875.943	58.900.535.511,00	87.711.885.423
Kab. Cianjur	77.905.506.963,00	93.628.876.522,20	114.305.535.968	147.346.021.050,00	215.803.000.000
Kab. Cirebon	101.512.669.939,00	116.095.437.888,00	139.426.725.461	193.843.221.050,00	229.993.000.000
Kab. Garut	83.306.424.295,00	102.702.673.665,00	108.914.763.969	122.418.643.665,00	184.270.000.000
Kab. Indramayu	56.770.811.859,76	86.408.586.763,33	101.840.184.226	144.553.804.178,00	164.672.000.000
Kab. Karawang	131.785.038.542,00	133.731.689.147,00	210.282.788.665	378.630.051.818,00	658.597.000.000
Kab. Kuningan	42.825.180.706,00	63.573.538.311,00	68.158.790.368	82.917.043.803,00	97.605.695.930
Kab. Majalengka	47.721.941.970,00	68.121.599.611,00	76.398.018.123	86.579.536.411,00	103.741.000.000
Kab. Purwakarta	59.429.026.541,00	64.044.768.371,00	76.489.287.145	111.690.657.181,00	151.568.000.000

Kab. Subang	64.034.543.366,00	67.665.304.446,00	75.532.291.693	94.181.846.520,00	120.972.000.000
Kab. Sukabumi	87.402.424.551,00	80.616.078.322,80	98.442.632.628	151.825.718.336,01	185.191.000.000
Kab. Sumedang	88.256.488.869,38	104.172.660.220,71	108.646.803.911	139.823.277.566,34	161.996.000.000
Kab. Tasikmalaya	47.194.342.024,00	49.657.867.201,00	48.338.061.521	51.160.921.192,00	60.970.810.517
Kota Bandung	314.627.155.412,00	360.152.627.690,00	441.863.068.294	833.254.175.288,00	1.005.580.000.000
Kota Bekasi	189.492.858.525,12	231.694.925.185,00	296.046.878.712	568.344.298.997,36	730.735.000.000
Kota Bogor	97.768.134.591,00	115.921.660.827,00	127.488.089.831	230.449.644.620,00	300.932.000.000
Kota Cirebon	65.069.398.951,00	77.318.391.813,00	90.828.709.752	120.130.531.059,00	149.490.000.000
Kota Depok	112.772.421.051,30	115.720.347.455,90	142.419.943.002	282.747.544.886,76	474.705.000.000
Kota Sukabumi	64.281.971.384,00	66.190.680.359,00	91.472.357.185	115.473.386.833,00	148.388.000.000
Kota Tasikmalaya	63.849.140.718,00	76.503.523.370,19	104.787.914.975	110.369.865.905,03	153.009.000.000
Kota Cimahi	64.964.960.822,00	75.037.372.353,00	87.321.279.805	116.677.729.307,61	144.541.000.000
Kota Banjar	23.782.320.837,31	25.849.341.608,85	37.358.705.002	45.952.391.987,00	54.684.690.641
Kab. Bandung Barat	33.617.474.326,00	39.964.363.945,00	50.367.666.303	94.606.169.067,00	136.241.000.000
Prov. Jawa Tengah					
Kab. Banjarnegara	46.521.396.931,00	60.636.814.797,00	62.486.768.063	71.106.953.223,00	94.271.467.989
Kab. Banyumas	107.425.765.063,00	120.520.361.680,84	164.892.425.634	191.899.680.819,00	242.107.000.000

Kab. Batang	41.192.714.868,00	44.643.602.159,00	45.421.689.588	60.155.029.031,00	84.720.049.515
Kab. Blora	48.954.140.914,00	49.696.650.709,00	47.087.584.059	67.021.769.902,00	81.987.007.133
Kab. Boyolali	63.733.408.461,00	70.004.658.137,00	86.485.635.223	96.737.566.506,00	127.725.000.000
Kab. Brebes	72.073.945.369,00	80.275.021.213,00	71.025.304.605	78.275.852.041,00	101.807.000.000
Kab. Cilacap	102.780.340.747,00	120.746.425.475,65	149.709.123.163	172.327.030.144,82	196.673.000.000
Kab. Demak	43.820.940.478,00	50.235.869.718,00	56.756.027.175	74.559.136.137,00	105.363.000.000
Kab. Grobogan	59.924.849.995,00	77.079.602.181,00	78.366.420.899	87.912.458.185,00	105.463.000.000
Kab. Jepara	71.267.901.105,00	71.919.859.343,00	84.713.357.594	103.642.014.200,00	129.077.000.000
Kab. Karanganyar	64.470.676.168,00	66.971.682.994,00	79.510.216.512	104.080.774.286,00	116.707.000.000
Kab. Kebumen	58.599.425.037,00	63.016.363.174,00	58.742.305.659	73.513.164.444,00	102.374.000.000
Kab. Kendal	71.684.588.059,00	76.805.714.198,00	86.235.293.510	93.289.526.850,00	120.162.000.000
Kab. Klaten	49.549.622.878,00	53.142.865.419,00	54.886.005.749	72.290.993.848,00	84.755.834.704
Kab. Kudus	71.520.067.976,83	83.045.780.415,88	94.032.742.826	108.458.832.665,00	121.017.000.000
Kab. Magelang	78.119.511.336,00	75.582.195.900,00	76.057.772.876	90.462.630.622,00	123.723.000.000
Kab. Pati	80.495.293.572,01	90.667.623.138,54	112.526.536.706	134.475.561.623,00	163.734.000.000
Kab. Pekalongan	55.278.780.755,50	58.468.319.642,00	67.580.239.029	81.362.869.869,00	114.793.000.000
Kab. Pemalang	66.747.479.207,00	81.819.333.588,00	76.441.045.221	79.677.543.259,00	97.951.207.914
Kab. Purbalingga	63.799.022.515,00	83.177.000.901,00	79.803.180.820	94.946.243.147,00	103.756.000.000

Kab. Purworejo	51.174.860.039,00	60.814.316.979,00	69.609.314.290	88.941.781.923,00	98.262.003.374
Kab. Rembang	51.125.558.424,00	56.887.895.318,00	65.699.258.995	73.931.945.930,62	103.305.000.000
Kab. Semarang	82.942.880.537,00	90.389.871.349,00	98.831.140.360	133.198.913.306,00	156.104.000.000
Kab. Sragen	65.803.095.551,00	72.681.309.220,00	79.627.347.874	94.518.999.398,00	127.696.000.000
Kab. Sukoharjo	41.898.319.498,00	48.842.528.340,00	64.446.167.388	96.166.806.526,00	164.954.000.000
Kab. Tegal	59.154.639.032,00	70.859.594.636,00	73.062.775.368	90.133.274.468,00	118.742.000.000
Kab. Temanggung	37.923.898.939,00	47.327.328.141,00	55.211.017.361	63.343.494.510,00	78.514.689.212
Kab. Wonogiri	54.129.294.926,00	57.092.965.296,00	64.968.769.365	77.141.691.388,00	100.037.000.000
Kab. Wonosobo	38.158.243.909,00	46.324.943.517,00	52.079.016.939	67.398.727.303,00	82.335.296.457
Kota Magelang	40.506.552.463,00	47.704.618.780,00	59.548.102.100	63.557.701.976,00	91.314.601.697
Kota Pekalongan	30.096.285.331,00	32.238.175.787,84	47.495.707.337	63.344.977.617,16	91.205.786.310
Kota Salatiga	45.147.465.983,00	53.055.833.309,00	51.549.747.508	60.611.340.067,00	77.798.870.961
Kota Semarang	267.914.250.403,00	306.112.422.821,00	327.992.258.750	521.538.058.477,00	779.617.000.000
Kota Surakarta	102.989.919.369,00	101.972.318.682,00	113.946.007.542	181.096.816.152,00	231.672.000.000
Kota Tegal	69.567.243.716,00	90.840.876.590,00	101.321.867.412	117.244.290.641,00	156.663.000.000
Prov. DI Jogjakarta					
Kab. Bantul	69.800.761.508,85	88.691.362.690,38	81.637.099.293	128.896.456.173,41	166.598.000.000

Kab. Gunung Kidul	32.907.614.695,97	38.455.406.172,11	42.542.031.389	54.462.418.772,18	67.050.781.893
Kab. Kulon Progo	42.289.208.476,81	39.358.629.412,10	48.280.640.675	53.752.293.431,63	74.028.663.155
Kab. Sleman	152.839.968.007,43	157.231.267.811,84	163.056.459.138	226.723.271.088,47	301.070.000.000
Kota Yogyakarta	132.431.571.514,72	161.473.838.209,95	179.423.640.058	228.870.559.645,59	338.284.000.000
Prov. Jawa Timur					
Kab. Bangkalan	32.106.268.819,67	34.477.143.994,68	40.975.170.911	65.039.401.772,82	80.268.572.727
Kab. Banyuwangi	71.203.727.583,41	86.977.565.944,72	90.656.905.526	113.364.553.469,87	139.515.000.000
Kab. Blitar	49.203.530.155,41	58.268.283.130,58	63.888.553.129	76.190.965.173,02	95.782.155.449
Kab. Bojonegoro	58.690.962.773,99	70.233.938.303,98	79.891.483.832	164.585.991.460,32	159.248.000.000
Kab. Bondowoso	35.371.877.885,00	40.121.861.293,10	49.663.941.019	66.816.392.275,09	77.846.177.657
Kab. Gresik	134.426.191.451,42	168.302.821.579,56	167.644.725.522	273.975.992.140,13	428.126.000.000
Kab. Jember	136.470.706.867,88	135.022.286.377,97	150.935.737.792	182.494.390.158,79	255.805.000.000
Kab. Jombang	97.601.053.792,45	90.214.137.927,09	109.154.035.428	124.799.217.856,05	164.389.000.000
Kab. Kediri	61.186.214.010,62	77.825.221.397,44	72.006.347.303	96.820.637.689,38	129.299.000.000
Kab. Lamongan	66.608.873.942,51	71.452.396.308,29	95.244.807.228	99.545.629.500,31	129.285.000.000
Kab. Lumajang	54.974.535.912,05	65.341.361.835,39	77.540.295.111	84.336.944.496,24	101.174.000.000
Kab. Madiun	26.559.118.423,49	30.112.862.499,21	45.034.305.945	57.998.223.512,34	68.545.790.751

Kab. Magetan	39.019.023.997,89	48.831.608.108,61	51.964.929.107	61.760.661.908,04	78.423.247.877
Kab. Malang	100.327.728.826,99	153.526.441.537,99	130.465.915.608	172.333.275.999,86	197.254.000.000
Kab. Mojokerto	55.790.363.612,51	59.633.358.366,84	79.507.391.611	108.709.405.732,32	164.774.000.000
Kab. Nganjuk	60.307.577.351,84	72.274.642.864,63	79.507.391.611	94.283.242.448,99	125.173.000.000
Kab. Ngawi	23.670.907.767,01	25.567.881.123,83	27.489.942.064	61.539.122.182,19	61.631.823.113
Kab. Pacitan	23.692.306.074,35	27.666.707.833,39	29.488.179.488	48.359.915.660,96	57.298.239.683
Kab. Pamekasan	36.957.799.237,87	40.220.358.249,32	49.313.077.418	70.704.959.013,38	84.377.021.981
Kab. Pasuruan	80.437.436.655,96	87.668.802.526,57	100.309.476.757	155.276.540.400,47	194.859.000.000
Kab. Ponorogo	41.850.665.707,64	48.046.560.260,05	48.664.624.186	65.936.673.551,92	108.766.000.000
Kab. Probolinggo	38.030.645.757,41	42.548.002.266,46	45.715.475.874	75.654.859.911,61	90.009.457.309
Kab. Sampang	30.509.094.226,53	37.026.235.941,13	36.396.342.481	46.973.974.632,16	61.065.357.245
Kab. Sidoarjo	213.693.758.966,37	284.660.711.556,09	356.161.848.548	484.313.737.307,27	669.618.000.000
Kab. Situbondo	34.337.186.291,73	33.913.027.881,34	46.579.946.274	61.650.613.747,44	67.050.480.515
Kab. Sumenep	44.177.295.843,42	44.292.310.516,41	46.702.756.752	57.940.353.705,10	85.886.851.769
Kab. Trenggalek	35.187.914.905,19	40.435.991.178,08	53.553.783.140	63.084.029.481,88	70.197.613.639
Kab. Tuban	91.912.061.932,13	103.952.860.252,42	106.369.268.225	137.296.864.044,53	192.499.000.000
Kab. Tulungagung	59.140.300.539,86	82.324.974.129,07	94.380.356.788	124.517.804.186,07	162.162.000.000

Kota Blitar	40.794.908.395,66	39.860.842.246,42	47.690.974.774	52.564.078.517,39	63.640.945.339
Kota Kediri	74.775.278.043,96	88.849.647.034,61	92.787.297.151	119.467.321.122,09	122.523.000.000
Kota Madiun	27.014.134.400,86	43.880.880.252,97	45.034.305.945	61.305.077.273,73	72.030.950.610
Kota Malang	83.403.547.594,61	92.476.383.151,21	113.490.265.809	185.818.563.982,76	229.810.000.000
Kota Mojokerto	22.437.275.801,33	28.154.863.948,45	31.596.313.387	42.165.056.510,12	53.439.861.756
Kota Pasuruan	27.183.431.287,29	35.678.357.863,22	34.101.032.334	45.213.899.175,76	42.366.216.434
Kota Probolinggo	38.030.645.757,41	40.085.223.843,97	45.715.475.874	57.455.035.686,11	69.261.488.711
Kota Surabaya	728.392.849.558,00	809.795.526.042,00	908.647.775.730	1.886.514.301.580,72	2.279.610.000.000
Kota Batu	18.625.013.463,76	17.386.741.568,44	17.735.602.954	30.241.864.301,14	38.794.059.670
Prov. Banten					
Kab. Lebak	50.899.149.186,00	58.021.746.576,00	64.200.116.205	93.065.058.829,00	65.556.626.655
Kab. Pandeglang	33.480.446.171,00	31.921.009.780,00	31.855.280.016	56.189.197.538,00	54.048.393.635
Kab. Serang	138.558.617.173,00	118.585.763.408,00	134.718.556.929	216.956.155.419,00	253.775.000.000
Kab. Tangerang	336.921.813.888,00	372.841.974.479,00	247.412.605.874	665.231.223.713,00	839.868.000.000
Kota Cilegon	129.831.026.861,00	135.537.939.538,00	150.600.840.049	253.747.779.831,00	334.018.000.000
Kota Tangerang	181.850.256.965,61	193.575.745.112,00	230.634.138.004	499.080.750.732,00	631.519.000.000
Prov. Bali					
Kab. Badung	759.801.041.723,00	850.168.320.769,47	979.194.610.828	1.406.298.099.449,01	1.872.350.000.000
Kab. Bangli	12.655.751.193,09	16.301.547.341,74	16.252.951.099	22.963.226.126,08	40.751.049.552
Kab.	52.662.170.356,94	63.487.192.136,76	86.962.001.695	109.167.026.217,90	129.004.000.000

Buleleng					
Kab. Gianyar	96.922.244.069,57	112.540.530.034,90	153.559.078.289	209.598.193.886,12	261.222.000.000
Kab. Jembrana	21.235.505.863,05	33.952.879.718,41	34.380.822.968	41.330.605.674,41	46.470.110.901
Kab. Karangasem	43.005.826.519,06	47.842.959.879,78	62.696.409.427	129.556.195.519,69	144.020.000.000
Kab. Klungkung	29.028.565.012,08	29.566.916.897,61	31.331.319.426	40.735.838.605,58	48.561.524.509
Kab. Tabanan	54.675.811.807,28	93.840.477.885,31	116.860.678.337	141.046.016.976,85	183.295.000.000
Kota Denpasar	176.244.773.924,85	215.156.916.393,03	260.482.616.202	424.959.412.894,23	511.327.000.000

Lampiran 2

DATA TOTAL BELANJA DAERAH

Kab/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Prov. Jawa Barat					
Kab. Bandung	1.480.102.230.212,00	1.481.115.070.742,00	2.073.603.127.840	2.428.383.916.449	2.788.970.000.000
Kab. Bekasi	1.040.152.062.773,00	1.228.300.748.217,00	1.682.031.523.500	2.323.239.730.761	2.600.800.000.000
Kab. Bogor	1.758.776.346.829,00	1.643.199.876.314,00	2.603.523.610.284	3.209.780.615.830	3.622.070.000.000
Kab. Ciamis	1.312.290.012.526,00	1.119.095.242.928,00	1.380.941.032.459	1.626.154.756.875	1.764.180.000.000
Kab. Cianjur	1.227.019.523.844,00	1.073.492.533.961,48	1.434.370.914.551	1.777.604.415.922	1.972.490.000.000
Kab. Cirebon	1.141.565.194.465,00	1.027.867.966.368,00	1.437.984.481.527	1.683.613.428.435	2.033.140.000.000
Kab. Garut	1.384.060.259.692,00	1.338.306.588.222,00	1.689.071.148.835	2.011.157.111.530	2.131.940.000.000
Kab. Indramayu	1.060.866.951.664,00	1.008.352.775.629,00	1.299.806.918.501	1.569.018.023.102	1.843.450.000.000
Kab. Karawang	1.224.104.248.775,00	1.274.965.822.798,00	1.522.989.245.712	1.832.297.832.196	2.382.740.000.000
Kab. Kuningan	870.187.897.884,93	804.524.487.778,00	1.127.625.506.033	1.247.379.255.668	1.434.010.000.000
Kab. Majalengka	882.768.403.671,00	928.141.675.797,00	1.134.530.896.200	1.287.193.140.716	1.525.080.000.000
Kab. Purwakarta	624.044.849.290,00	618.475.652.023,00	862.876.316.666	962.771.230.654	1.114.440.000.000
Kab. Subang	1.050.445.664.715,00	905.221.270.495,00	1.239.355.076.029	1.351.795.557.956	1.481.610.000.000

Kab. Sukabumi	1.245.147.219.131,00	1.109.305.218.609,00	1.615.098.489.079	1.837.103.829.938	1.984.310.000.000
Kab. Sumedang	905.768.891.468,00	951.691.409.125,00	1.120.252.427.611	1.241.804.252.689	1.424.520.000.000
Kab. Tasikmalaya	1.030.497.101.869,00	1.253.770.095.370,00	1.356.159.391.203	1.501.367.333.471	1.820.800.000.000
Kota Bandung	2.058.920.582.038,00	1.849.323.412.078,00	2.522.680.816.553	3.080.347.679.003	3.490.040.000.000
Kota Bekasi	1.254.836.502.726,00	1.159.052.162.166,00	1.593.446.958.195	1.981.344.801.647	2.499.560.000.000
Kota Bogor	673.652.885.683,00	653.406.249.754,00	956.682.804.942	1.074.576.515.295	1.255.350.000.000
Kota Cirebon	531.237.745.678,00	620.625.958.024,00	749.800.935.181	818.299.128.015	813.672.000.000
Kota Depok	882.692.496.719,61	710.846.165.501,00	1.088.668.188.427	1.350.085.338.873	1.371.440.000.000
Kota Sukabumi	457.498.444.562,00	557.821.530.539,00	568.645.336.614	624.504.433.475	714.436.000.000
Kota Tasikmalaya	636.029.992.894,87	569.099.655.513,69	880.339.919.312	917.531.043.950	1.035.030.000.000
Kota Cimahi	511.444.468.878,76	445.824.671.152,00	636.201.144.912	738.303.631.328	833.412.000.000
Kota Banjar	340.822.111.422,00	393.596.851.570,73	361.961.507.137	484.464.252.840	513.257.000.000
Kab. Bandung Barat	584.603.599.304,00	659.450.082.366,00	1.010.276.319.009	1.251.596.015.396	1.501.190.000.000
Prov. Jawa Tengah					
Kab. Banjarnegara	716.235.931.638,00	657.120.240.588,00	864.062.435.992	1.037.963.356.757	1.111.150.000.000
Kab. Banyumas	973.932.843.282,00	1.070.009.266.568,84	1.178.380.052.888	1.476.265.622.122	1.732.240.000.000
Kab. Batang	578.573.192.033,00	628.079.266.129,00	569.728.016.695	747.719.570.493	862.095.000.000

Kab. Blora	767.524.042.317,00	733.757.544.269,00	797.077.475.755	925.821.278.064	1.125.140.000.000
Kab. Boyolali	793.262.107.869,00	808.017.387.034,00	909.091.325.282	1.098.879.850.378	1.266.280.000.000
Kab. Brebes	973.243.123.522,00	794.401.562.427,00	1.100.002.337.930	1.303.899.890.686	1.388.040.000.000
Kab. Cilacap	1.172.492.784.622,00	1.167.974.673.910,00	1.237.238.910.798	1.550.277.519.753	1.714.290.000.000
Kab. Demak	691.470.037.742,00	594.178.104.143,00	825.294.668.677	1.303.899.890.686	1.207.870.000.000
Kab. Grobogan	870.652.060.324,00	689.545.059.235,00	901.486.884.016	1.172.116.161.868	1.202.190.000.000
Kab. Jepara	744.074.360.333,00	667.357.698.957,00	852.318.433.739	1.095.748.594.964	1.257.040.000.000
Kab. Karanganyar	772.834.363.740,00	722.849.222.570,00	876.226.764.023	978.180.653.172	1.171.210.000.000
Kab. Kebumen	859.246.349.911,00	785.843.886.200,00	1.009.114.795.145	1.175.414.881.118	1.360.050.000.000
Kab. Kendal	756.328.308.161,00	786.579.282.580,00	908.117.549.118	1.109.885.631.168	1.163.990.000.000
Kab. Klaten	1.000.134.799.035,00	981.121.677.296,00	1.043.889.305.037	1.316.273.006.661	1.439.160.000.000
Kab. Kudus	726.323.425.107,00	869.172.775.415,00	903.108.829.269	947.776.300.989	1.147.950.000.000
Kab. Magelang	853.627.224.576,00	741.329.462.099,00	972.057.304.514	1.061.733.956.072	1.146.500.000.000
Kab. Pati	900.218.508.870,00	791.667.646.493,65	989.490.570.878	1.197.268.041.634	1.421.940.000.000
Kab. Pekalongan	672.945.318.285,00	689.683.535.705,00	725.164.609.507	895.018.868.667	1.008.580.000.000
Kab. Pemalang	767.167.955.591,00	715.505.594.792,00	926.831.150.489	1.178.756.054.644	1.196.450.000.000
Kab. Purbalingga	707.774.473.138,00	745.014.151.210,00	686.627.249.822	902.543.793.285	1.084.090.000.000
Kab. Purworejo	691.991.234.560,00	647.915.430.962,00	815.859.716.252	968.310.613.298	1.123.310.000.000

Kab. Rembang	592.524.623.085,00	530.460.549.530,00	682.413.462.558	868.066.639.368	969.132.000.000
Kab. Semarang	794.396.380.841,00	789.795.015.474,00	808.713.917.179	1.042.026.783.589	1.178.650.000.000
Kab. Sragen	806.031.692.183,00	704.794.171.324,00	902.841.109.262	1.030.136.587.484	1.196.730.000.000
Kab. Sukoharjo	717.122.973.682,00	654.829.853.392,00	780.223.938.496	968.241.025.931	1.196.800.000.000
Kab. Tegal	872.732.362.385,00	703.638.297.197,00	959.764.609.070	1.115.788.949.765	1.347.310.000.000
Kab. Temanggung	611.356.971.071,00	606.966.527.368,00	662.150.174.118	816.160.548.955	912.680.000.000
Kab. Wonogiri	846.335.488.078,00	795.752.279.901,00	963.983.677.115	1.091.698.844.419	1.302.180.000.000
Kab. Wonosobo	628.220.566.928,00	495.600.218.304,00	674.386.334.632	888.438.419.143	986.537.000.000
Kota Magelang	386.124.525.429,00	412.723.983.672,00	410.623.349.204	469.411.611.855	536.349.000.000
Kota Pekalongan	397.144.017.604,00	384.213.290.964,00	408.563.990.615	489.616.887.441	538.564.000.000
Kota Salatiga	368.393.972.667,00	282.027.667.986,00	418.615.915.631	458.618.399.163	551.635.000.000
Kota Semarang	1.325.301.609.216,00	1.288.608.724.329,00	1.732.662.151.376	2.036.582.638.750	2.053.330.000.000
Kota Surakarta	760.080.852.467,00	747.265.480.803,00	825.858.500.472	982.645.954.738	1.145.170.000.000
Kota Tegal	393.200.043.902,00	458.620.879.881,00	474.360.687.266	572.009.660.567	586.687.000.000
Prov. DI Jogjakarta					
Kab. Bantul	1.045.423.303.527,78	792.019.021.918,01	1.010.580.537.908	1.151.885.952.328	1.280.930.000.000
Kab. Gunung	717.302.227.232,29	557.392.233.795,32	722.210.904.272	938.850.017.618	1.024.040.000.000

Kidul					
Kab. Kulon Progo	598.059.933.717,75	577.736.996.100,47	610.929.785.006	778.747.172.035	879.479.000.000
Kab. Sleman	916.355.784.818,50	1.016.026.601.135,37	1.093.347.493.609	1.238.719.246.213	1.375.420.000.000
Kota Yogyakarta	698.566.664.120,78	695.351.653.000,86	839.866.480.661	932.018.507.343	1.023.800.000.000
Prov. Jawa Timur					
Kab. Bangkalan	714.458.409.107,55	715.577.570.968,06	793.791.989.194	1.109.022.544.013	1.220.090.000.000
Kab. Banyuwangi	924.243.283.674,85	870.984.822.619,83	1.219.931.614.411	1.442.970.170.072	1.680.900.000.000
Kab. Blitar	929.891.723.246,06	931.141.880.303,06	1.093.846.750.921	1.157.037.244.882	1.371.130.000.000
Kab. Bojonegoro	920.019.556.108,06	942.169.000.670,92	1.101.524.798.110	1.287.101.717.497	1.692.120.000.000
Kab. Bondowoso	600.953.474.997,44	705.698.336.447,84	765.513.977.032	950.958.157.445	1.074.130.000.000
Kab. Gresik	903.570.189.568,18	1.009.099.863.786,00	1.084.214.298.828	1.266.019.120.104	1.451.130.000.000
Kab. Jember	1.264.383.610.315,28	1.336.917.498.921,87	1.503.014.965.569	1.784.063.653.425	2.087.010.000.000
Kab. Jombang	835.844.210.095,41	782.890.278.361,67	957.068.785.546	1.089.798.641.007	1.299.540.000.000
Kab. Kediri	873.523.092.995,30	759.110.862.180,99	1.093.679.742.011	1.328.592.643.219	1.482.120.000.000
Kab. Lamongan	861.131.330.025,44	773.679.672.707,00	1.044.489.166.450	1.285.411.365.552	1.471.490.000.000
Kab. Lumajang	727.011.267.375,39	684.008.729.471,00	846.558.522.874	995.031.166.987	1.100.510.000.000
Kab. Madiun	661.944.333.869,57	571.493.876.073,28	769.219.684.704	871.703.984.370	1.025.750.000.000
Kab.	643.511.648.453,35	591.560.595.742,82	735.704.240.755	918.770.369.016	1.020.430.000.000

Magetan					
Kab. Malang	1.337.850.741.205,73	1.387.731.032.458,62	1.654.298.910.348	1.913.349.777.149	2.208.270.000.000
Kab. Mojokerto	816.670.530.673,20	687.768.115.893,99	877.373.379.602	1.054.656.936.201	1.245.130.000.000
Kab. Nganjuk	794.269.647.364,00	699.341.589.211,95	940.179.414.190	1.127.222.290.873	1.347.290.000.000
Kab. Ngawi	760.344.101.207,44	700.445.011.803,67	873.716.733.308	1.078.529.191.903	1.167.650.000.000
Kab. Pacitan	587.015.184.711,91	598.719.817.723,01	677.580.027.937	839.931.989.378	962.226.000.000
Kab. Pamekasan	648.357.540.486,00	540.392.117.759,40	754.566.678.104	924.137.999.267	1.098.540.000.000
Kab. Pasuruan	841.526.718.993,68	977.532.626.386,23	1.125.394.997.168	1.318.578.813.844	1.534.560.000.000
Kab. Ponorogo	806.416.174.589,58	660.228.416.667,38	908.838.285.103	1.059.034.980.463	1.263.000.000.000
Kab. Probolinggo	419.155.464.989,20	554.437.448.005,57	861.394.887.451	1.112.602.221.083	1.290.410.000.000
Kab. Sampang	608.963.319.110,46	755.623.559.737,63	814.942.353.695	870.875.351.647	991.977.000.000
Kab. Sidoarjo	1.225.225.622.873,30	1.371.659.766.870,92	1.573.179.360.771	1.804.862.168.851	2.196.170.000.000
Kab. Situbondo	569.539.004.874,13	628.721.153.925,20	689.729.076.684	838.589.264.436	927.269.000.000
Kab. Sumenep	808.642.431.499,87	873.780.204.174,14	948.049.327.983	1.108.144.268.084	1.276.780.000.000
Kab. Trenggalek	701.361.479.494,00	615.453.745.903,00	799.556.660.994	935.917.289.032	1.041.200.000.000
Kab. Tuban	780.217.131.524,41	627.380.297.385,12	944.072.665.658	1.057.094.488.312	1.313.890.000.000
Kab. Tulungagung	837.437.250.318,27	836.316.707.074,84	1.099.341.172.342	1.296.018.918.673	1.576.890.000.000

Kota Blitar	355.913.654.440,90	275.656.739.931,89	417.915.452.457	533.328.191.460	518.217.000.000
Kota Kediri	524.519.962.240,31	707.190.775.420,48	714.706.093.480	721.685.076.250	843.608.000.000
Kota Madiun	353.005.469.944,31	389.629.298.051,02	506.275.950.052	526.846.072.313	610.542.000.000
Kota Malang	687.335.498.394,23	809.128.186.196,91	967.903.242.520	1.048.167.573.629	1.252.270.000.000
Kota Mojokerto	320.426.713.882,60	279.002.712.830,34	403.716.058.238	409.664.911.212	488.946.000.000
Kota Pasuruan	322.929.369.363,36	412.265.150.628,00	416.427.763.901	454.069.498.737	487.918.000.000
Kota Probolinggo	419.155.464.989,20	455.036.254.429,51	499.429.844.388	578.773.995.563	611.171.000.000
Kota Surabaya	2.019.238.286.368,00	3.127.363.165.158,00	3.637.069.260.868	3.753.710.413.891	4.297.950.000.000
Kota Batu	286.689.994.653,44	251.217.356.723,50	400.760.875.755	435.856.317.399	435.189.000.000
Prov. Banten					
Kab. Lebak	803.635.963.541,00	831.043.309.356,00	893.656.193.255	1.172.211.338.158	581.222.000.000
Kab. Pandeglang	703.366.207.635,60	726.569.164.940,00	929.790.479.611	1.168.966.949.257	1.260.430.000.000
Kab. Serang	1.066.296.711.069,00	872.701.732.579,00	991.762.757.790	1.173.739.190.170	1.413.900.000.000
Kab. Tangerang	1.690.648.258.691,00	2.015.224.698.054,00	1.667.840.561.368	2.027.969.740.162	2.709.390.000.000
Kota Cilegon	585.723.003.908,00	610.878.430.394,00	674.228.903.416	840.408.522.801	876.686.000.000
Kota Tangerang	996.673.627.143,00	1.103.605.837.081,00	1.395.733.836.491	1.635.673.957.311	1.925.250.000.000
Prov. Bali					
Kab. Badung	1.074.683.238.557,41	1.429.454.483.078,13	1.202.670.839.428	1.572.210.487.617	2.142.920.000.000
Kab. Bangli	409.701.661.064,00	405.428.989.318,50	445.083.985.239	538.227.740.317	82.340.927.122

Kab. Buleleng	715.166.643.598,50	769.647.356.303,52	834.791.001.691	1.035.052.478.085	1.123.510.000.000
Kab. Gianyar	629.285.275.501,00	713.896.671.840,52	736.023.697.431	836.087.203.114	982.328.000.000
Kab. Jembrana	445.271.547.173,00	479.134.809.118,71	478.614.320.165	524.017.678.887	664.723.000.000
Kab. Karangasem	603.003.957.633,35	629.919.455.709,68	630.249.356.945	768.474.631.477	171.631.000.000
Kab. Klungkung	404.370.158.961,54	449.263.176.198,40	441.661.039.136	494.114.120.027	81.223.181.917
Kab. Tabanan	614.427.998.334,48	700.965.893.832,71	771.801.072.192	880.108.493.436	1.062.210.000.000
Kota Denpasar	659.265.823.702,08	780.768.138.623,52	927.540.252.224	1.100.129.048.469	1.309.530.000.000

Lampiran 3

DATA PDRB

Kab/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012
Prov. Jawa Barat					
Kab. Bandung	38282000000000	41262000000000	46092000000000	51292000000000	57071000000000
Kab. Bekasi	82978000000000	89736000000000	97527000000000	106773000000000	116470000000000
Kab. Bogor	58389000000000	66084000000000	73081000000000	83032000000000	95906000000000
Kab. Ciamis	14502000000000	15841000000000	17572000000000	19345000000000	21180000000000
Kab. Cianjur	15497000000000	16738000000000	18453600000000	20573000000000	22268000000000
Kab. Cirebon	15565000000000	17199000000000	19710000000000	20293000000000	22875000000000
Kab. Garut	20361000000000	22271000000000	24845000000000	27492000000000	30147000000000
Kab. Indramayu	14188000000000	16490000000000	18233000000000	20728000000000	23999000000000
Kab. Karawang	40624000000000	46694000000000	56513000000000	65362000000000	69405000000000
Kab. Kuningan	70480000000000	81790000000000	91320000000000	100190000000000	110290000000000
Kab. Majalengka	81360000000000	88750000000000	10026000000000	10879000000000	11811000000000
Kab. Purwakarta	13216000000000	14156000000000	15957000000000	17496000000000	19229000000000
Kab. Subang	12298000000000	13603000000000	14701000000000	15917000000000	17196000000000
Kab. Sukabumi	15844000000000	16944000000000	18315000000000	19876000000000	21325000000000

Kab. Sumedang	10301000000000	11188000000000	12266000000000	13532000000000	14942000000000
Kab. Tasikmalaya	10474000000000	11914000000000	12772000000000	13392000000000	15210000000000
Kota Bandung	60444000000000	70281000000000	82002000000000	95613000000000	11112000000000
Kota Bekasi	29525000000000	31475000000000	35679000000000	40529000000000	45857000000000
Kota Bogor	10090000000000	11905000000000	13909000000000	15487000000000	17232000000000
Kota Cirebon	89340000000000	98770000000000	10931000000000	12117000000000	13217000000000
Kota Depok	12542000000000	14064000000000	16145000000000	17913000000000	20002000000000
Kota Sukabumi	36980000000000	43950000000000	51750000000000	52910000000000	66580000000000
Kota Tasikmalaya	71510000000000	77700000000000	84690000000000	92750000000000	10152000000000
Kota Cimahi	10716000000000	11684000000000	12846000000000	14165000000000	15543000000000
Kota Banjar	14340000000000	15930000000000	17700000000000	19490000000000	21370000000000
Kab. Bandung Barat	60444000000000	70281000000000	82002000000000	95613000000000	11112000000000
Prov. Jawa Tengah					
Kab. Banjarnegara	2619989610000	2753935730000	2888524120000	3030542040000	3190000000000
Kab. Banyumas	4171468950000	4400542230000	4654634020000	4927351430000	5222000000000
Kab. Batang	2169854550000	2250616820000	2362482410000	2486765600000	2612000000000
Kab. Blora	1913763350000	2010908670000	2115369930000	2170194810000	2279000000000
Kab. Boyolali	3899372860000	4100520260000	4248048240000	4472217000000	4726000000000

Kab. Brebes	4998528190000	5247897410000	5507402710000	5780877860000	6082000000000
Kab. Cilacap	11689092900000	12302859950000	12998128800000	13749105220000	14518000000000
Kab. Demak	2787524020000	2901151510000	3020821040000	3156126240000	3303000000000
Kab. Grobogan	2948793800000	3097093250000	3253398560000	3370343700000	3578000000000
Kab. Jepara	3889988850000	4085438360000	4270256900000	4504551890000	4763000000000
Kab. Karanganyar	4900690400000	5172268330000	5452435490000	5752064990000	6087000000000
Kab. Kebumen	2721254090000	2828395070000	2945829460000	3089587580000	3228000000000
Kab. Kendal	4821181520000	5090286600000	5392965710000	5717409800000	6034000000000
Kab. Klaten	4567200960000	4761018670000	4843247280000	4938050650000	5212000000000
Kab. Kudus	11683819730000	12144952380000	12650309160000	13183606910000	13755000000000
Kab. Magelang	3761388590000	3938764680000	4116390070000	4292354460000	4543000000000
Kab. Pati	4162082370000	4357144030000	4579852540000	4828723120000	5155000000000
Kab. Pekalongan	2970214980000	3098071490000	3230351230000	3384387720000	3565000000000
Kab. Pemalang	3142808700000	3293056250000	3455713420000	3622635530000	3814000000000
Kab. Purbalingga	2257392770000	2390244570000	2525872730000	2679134060000	2846000000000
Kab. Purworejo	2737087130000	2872723790000	3016597820000	3168113400000	3328000000000
Kab. Rembang	2093412590000	2186736490000	2283965700000	2384459230000	2501000000000
Kab. Semarang	5079003740000	5300723410000	5560551900000	5877190850000	6223000000000
Kab. Sragen	2729450320000	2893427190000	3068863660000	3270052660000	3486000000000

Kab. Sukoharjo	4540751530000	4756902500000	4978263310000	5206687700000	5469000000000
Kab. Tegal	3286263440000	3460131600000	3627198200000	3801779470000	4001000000000
Kab. Temanggung	2219155630000	2309841530000	2409386400000	2521439020000	2648000000000
Kab. Wonogiri	2770435780000	2901577440000	2992794290000	3134182280000	3326000000000
Kab. Wonosobo	1741148310000	1811092670000	1888808280000	1974114160000	2078000000000
Kota Magelang	993835200000	1044650240000	1108603690000	1169342740000	1245000000000
Kota Pekalongan	1887853700000	1978082250000	2087114170000	2200827800000	2324000000000
Kota Salatiga	832154880000	869452990000	913020040000	963457340000	1016000000000
Kota Semarang	19156814290000	20180577950000	21365817800000	22736136190000	24196000000000
Kota Surakarta	4549342950000	4817877630000	5103886250000	5411912320000	5743000000000
Kota Tegal	1166587870000	1225102110000	1281528200000	1340227740000	1408000000000
Prov. DI Jogjakarta					
Kab. Bantul	3620000000000	3780000000000	3970000000000	4180000000000	4400000000000
Kab. Gunung Kidul	3070000000000	3200000000000	3330000000000	3470000000000	3643000000000
Kab. Kulon Progo	1660000000000	1730000000000	1780000000000	1870000000000	1963000000000
Kab. Sleman	5840000000000	6100000000000	6370000000000	6680000000000	7096000000000

Kota Yogyakarta	5020000000000	5250000000000	5510000000000	5930000000000	6152000000000
Prov. Jawa Timur					
Kab. Bangkalan	6049000000000	6668000000000	7435000000000	8348000000000	9470000000000
Kab. Banyuwangi	18379000000000	20728000000000	23558420840000	27059769400000	30698143470000
Kab. Blitar	5127000000000	5393000000000	5720000000000	6082000000000	6468000000000
Kab. Bojonegoro	11032000000	12422000000	22205360000	27615790000	30043180000
Kab. Bondowoso	5651051260000	6254349920000	6990737640000	7829864850000	8828956680000
Kab. Gresik	28353000000000	32199000000000	37826000000000	44982564570000	50185435990000
Kab. Jember	20261000000000	12369000000000	25285251210000	28389360170000	32167437000000
Kab. Jombang	11302600530000	12519634460000	14060872140000	15946000000000	18066000000000
Kab. Kediri	12512000000000	13894310000	15644310000	17479350000	19641740000
Kab. Lamongan	9124212330000	10357580140000	11774155300000	13460955000000	15339105690000
Kab. Lumajang	11133000000000	12369000000000	15579560000000	17655861000000	17461000000000
Kab. Madiun	5559000000000	6115000000000	6899000000000	7777000000000	8780000000000
Kab. Magetan	5946736380000	6573268750000	7382599980000	8278181320000	9297691920000
Kab. Malang	25027000000000	27754000000000	31390584510000	35674997970000	40763813140000
Kab. Mojokerto	14453336030000	16034092010000	18253921740000	20766000000000	23644000000000
Kab. Nganjuk	8860000000000	9833565090000	11001998500000	12305453470000	13889000000000

Kab. Ngawi	5770000000000	6445000000000	7246000000000	8116202900000	9161120300000
Kab. Pacitan	2680000000000	2986000000000	3353000000000	3742000000000	4212000000000
Kab. Pamekasan	3966000000000	4916908430000	5615322990000	6358529020000	6359000000000
Kab. Pasuruan	12331000000000	13724000000000	15579560000000	17655861000000	20022424000000
Kab. Ponorogo	5681000000000	6432000000000	7450000000000	8405000000000	9486000000000
Kab. Probolinggo	11834000000000	13196000000000	14896373690000	16761960780000	18865234150000
Kab. Sampang	4764000000000	5260272970000	5720566490000	6438006590000	7198000000000
Kab. Sidoarjo	44945288990000	50132273000000	56505927670000	64465226900000	73814000000000
Kab. Situbondo	6617000000000	7370000000000	8273951760000	9282952880000	10496826670000
Kab. Sumenep	8342000000000	9259000000000	11198705100000	12616535650000	12164441000000
Kab. Trenggalek	4638000000000	5197000000000	5870000000000	6646000000000	7529000000000
Kab. Tuban	15111000000000	16798000000000	19041000000000	21430704960000	24050412290000
Kab. Tulungagung	1608617000000	1782070910000	1950683050000	2161452360000	2399167400000
Kota Blitar	1599421000000	1799998000000	2030580000000	2273414000000	2563267000000
Kota Kediri	44260000000000	50414000000000	57247093260000	65321986640000	74808273700000
Kota Madiun	55559000000000	6155000000000	6899000000000	5689253620000	6419845130000
Kota Malang	24570000000000	27165000000000	30802611880000	34226477000000	38512535200000
Kota Mojokerto	2200636440000	2451043850000	2798999780000	2138823840000	3537889520000

Kota Pasuruan	2108000000000	2343000000000	2597448000000	2971052000000	3309121000000
Kota Probolinggo	3793000000000	4230000000000	4768000000000	4715000000000	5880721000000
Kota Surabaya	162883000000000	178559000000000	205161000000000	235034000000000	264336000000000
Kota Batu	2524551630000	2851689980000	3255765040000	3697778680000	4185988000000
Prov. Banten					
Kab. Lebak	6754000000000	7254000000000	8460000000000	9310000000000	1027199000000
Kab. Pandeglang	6939000000000	7660000000000	8690000000000	9620000000000	1070532000000
Kab. Serang	10730000000000	11497000000000	12694790000000	14207171660000	1571491000000
Kab. Tangerang	28437350000000	30884650000000	34866220000000	39410000000000	4411945000000
Kota Cilegon	18013859130000	19982129650000	22310000000000	31490000000000	3821871000000
Kota Tangerang	44691000000000	28019000000000	31259000000000	63680000000000	7020092000000
Prov. Bali					
Kab. Badung	10478390930000	12875498130000	14926782410000	16400000000000	18966102980000
Kab. Bangli	18437000000000	21199000000000	23604000000000	25800000000000	2866692110000
Kab. Buleleng	5849955400000	6680110220000	7556401650000	8288239220000	9115717850000
Kab. Gianyar	55830000000000	6422455830000	7336540390000	8118672680000	9125976400000
Kab. Jembrana	2891658810000	3277309440000	3604138380000	3936308260000	4403536920000
Kab. Karangasem	3187794200000	3667700340000	4135992620000	4635390370000	5195588790000
Kab.	21437900000000	24419300000000	27483500000000	30227900000000	3347198610000

Klungkung					
Kab. Tabanan	4040232900000	4520833370000	5054201810000	5530800250000	6105205260000
Kota Denpasar	9404703970000	10755112470000	12497412760000	13856500000000	15557924870000

Lampiran 4

RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

METODE KUADRAN

4.1 SHARE PAD

JAWA BARAT

Kab/Kota	PAD (Rp)					Total Belanja (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bandung	144.660.409.277,08	153.271.649.974,00	198.650.518.839	291.062.396.559,70	366.317.000.000	1.480.102.230.212,00	1.481.115.070.742,00	2.073.603.127.840	2.428.383.916.449	2.788.970.000.000	10,96%
Kab. Bekasi	249.063.806.936,00	287.299.507.395,00	258.671.098.123	599.070.130.849,00	801.853.000.000	1.040.152.062.773,00	1.228.300.748.217,00	1.682.031.523.500	2.323.239.730.761	2.600.800.000.000	23,87%
Kab. Bogor	307.634.448.365,00	337.903.884.329,00	399.263.956.504	696.986.388.875,99	1.048.230.000.000	1.758.776.346.829,00	1.643.199.876.314,00	2.603.523.610.284	3.209.780.615.830	3.622.070.000.000	20,81%
Kab. Ciamis	46.847.498.084,00	51.276.555.046,00	50.512.875.943	58.900.535.511,00	87.711.885.423	1.312.290.012.526,00	1.119.095.242.928,00	1.380.941.032.459	1.626.154.756.875	1.764.180.000.000	4,08%
Kab. Cianjur	77.905.506.963,00	93.628.876.522,20	114.305.535.968	147.346.021.050,00	215.803.000.000	1.227.019.523.844,00	1.073.492.533.961,48	1.434.370.914.551	1.777.604.415.922	1.972.490.000.000	8,45%
Kab. Cirebon	101.512.669.939,00	116.095.437.888,00	139.426.725.461	193.843.221.050,00	229.993.000.000	1.141.565.194.465,00	1.027.867.966.368,00	1.437.984.481.527	1.683.613.428.435	2.033.140.000.000	10,54%
Kab. Garut	83.306.424.295,00	102.702.673.665,00	108.914.763.969	122.418.643.665,00	184.270.000.000	1.384.060.259.692,00	1.338.306.588.222,00	1.689.071.148.835	2.011.157.111.530	2.131.940.000.000	6,97%
Kab. Indramayu	56.770.811.859,76	86.408.586.763,33	101.840.184.226	144.553.804.178,00	164.672.000.000	1.060.866.951.664,00	1.008.352.775.629,00	1.299.806.918.501	1.569.018.023.102	1.843.450.000.000	7,98%
Kab. Karawang	131.785.038.542,00	133.731.689.147,00	210.282.788.665	378.630.051.818,00	658.597.000.000	1.224.104.248.775,00	1.274.965.822.798,00	1.522.989.245.712	1.832.297.832.196	2.382.740.000.000	16,67%
Kab. Kuningan	42.825.180.706,00	63.573.538.311,00	68.158.790.368	82.917.043.803,00	97.605.695.930	870.187.897.884,93	804.524.487.778,00	1.127.625.506.033	1.247.379.255.668	1.434.010.000.000	6,46%
Kab. Majalengka	47.721.941.970,00	68.121.599.611,00	76.398.018.123	86.579.536.411,00	103.741.000.000	882.768.403.671,00	928.141.675.797,00	1.134.530.896.200	1.287.193.140.716	1.525.080.000.000	6,60%
Kab. Purwakarta	59.429.026.541,00	64.044.768.371,00	76.489.287.145	111.690.657.181,00	151.568.000.000	624.044.849.290,00	618.475.652.023,00	862.876.316.666	962.771.230.654	1.114.440.000.000	10,79%
Kab. Subang	64.034.543.366,00	67.665.304.446,00	75.532.291.693	94.181.846.520,00	120.972.000.000	1.050.445.664.715,00	905.221.270.495,00	1.239.355.076.029	1.351.795.557.956	1.481.610.000.000	6,96%
Kab. Sukabumi	87.402.424.551,00	80.616.078.322,80	98.442.632.628	151.825.718.336,01	185.191.000.000	1.245.147.219.131,00	1.109.305.218.609,00	1.615.098.489.079	1.837.103.829.938	1.984.310.000.000	7,60%
Kab. Sumedang	88.256.488.869,38	104.172.660.220,71	108.646.803.911	139.823.277.566,34	161.996.000.000	905.768.891.468,00	951.691.409.125,00	1.120.252.427.611	1.241.804.252.689	1.424.520.000.000	10,60%

Kab. Tasikmalaya	47.194.342.024,00	49.657.867.201,00	48.338.061.521	51.160.921.192,00	60.970.810.517	1.030.497.101.869,00	1.253.770.095.370,00	1.356.159.391.203	1.501.367.333.471	1.820.800.000.000	3,77%
Kota Bandung	314.627.155.412,00	360.152.627.690,00	441.863.068.294	833.254.175.288,00	1.005.580.000.000	2.058.920.582.038,00	1.849.323.412.078,00	2.522.680.816.553	3.080.347.679.003	3.490.040.000.000	21,63%
Kota Bekasi	189.492.858.525,12	231.694.925.185,00	296.046.878.712	568.344.298.997,36	730.735.000.000	1.254.836.502.726,00	1.159.052.162.166,00	1.593.446.958.195	1.981.344.801.647	2.499.560.000.000	22,32%
Kota Bogor	97.768.134.591,00	115.921.660.827,00	127.488.089.831	230.449.644.620,00	300.932.000.000	673.652.885.683,00	653.406.249.754,00	956.682.804.942	1.074.576.515.295	1.255.350.000.000	18,20%
Kota Cirebon	65.069.398.951,00	77.318.391.813,00	90.828.709.752	120.130.531.059,00	149.490.000.000	531.237.745.678,00	620.625.958.024,00	749.800.935.181	818.299.128.015	813.672.000.000	13,97%
Kota Depok	112.772.421.051,30	115.720.347.455,90	142.419.943.002	282.747.544.886,76	474.705.000.000	882.692.496.719,61	710.846.165.501,00	1.088.668.188.427	1.350.085.338.873	1.371.440.000.000	19,54%
Kota Sukabumi	64.281.971.384,00	66.190.680.359,00	91.472.357.185	115.473.386.833,00	148.388.000.000	457.498.444.562,00	557.821.530.539,00	568.645.336.614	624.504.433.475	714.436.000.000	16,25%
Kota Tasikmalaya	63.849.140.718,00	76.503.523.370,19	104.787.914.975	110.369.865.905,03	153.009.000.000	636.029.992.894,87	569.099.655.513,69	880.339.919.312	917.531.043.950	1.035.030.000.000	12,44%
Kota Cimahi	64.964.960.822,00	75.037.372.353,00	87.321.279.805	116.677.729.307,61	144.541.000.000	511.444.468.878,76	445.824.671.152,00	636.201.144.912	738.303.631.328	833.412.000.000	15,28%
Kota Banjar	23.782.320.837,31	25.849.341.608,85	37.358.705.002	45.952.391.987,00	54.684.690.641	340.822.111.422,00	393.596.851.570,73	361.961.507.137	484.464.252.840	513.257.000.000	8,80%
Kab. Bandung Barat	33.617.474.326,00	39.964.363.945,00	50.367.666.303	94.606.169.067,00	136.241.000.000	584.603.599.304,00	659.450.082.366,00	1.010.276.319.009	1.251.596.015.396	1.501.190.000.000	6,69%

JAWA TENGAH

Kab/Kota	PAD (Rp)					Total Belanja (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Banjarnegara	46.521.396.931,00	60.636.814.797,00	62.486.768.063	71.106.953.223,00	94.271.467.989	716.235.931.638,00	657.120.240.588,00	864.062.435.992	1.037.963.356.757	1.111.150.000.000	7,66%
Kab. Banyumas	107.425.765.063,00	120.520.361.680,84	164.892.425.634	191.899.680.819,00	242.107.000.000	973.932.843.282,00	1.070.009.266.568,84	1.178.380.052.888	1.476.265.622.122	1.732.240.000.000	12,65%
Kab. Batang	41.192.714.868,00	44.643.602.159,00	45.421.689.588	60.155.029.031,00	84.720.049.515	578.573.192.033,00	628.079.266.129,00	569.728.016.695	747.719.570.493	862.095.000.000	8,01%
Kab. Blora	48.954.140.914,00	49.696.650.709,00	47.087.584.059	67.021.769.902,00	81.987.007.133	767.524.042.317,00	733.757.544.269,00	797.077.475.755	925.821.278.064	1.125.140.000.000	6,72%
Kab. Boyolali	63.733.408.461,00	70.004.658.137,00	86.485.635.223	96.737.566.506,00	127.725.000.000	793.262.107.869,00	808.017.387.034,00	909.091.325.282	1.098.879.850.378	1.266.280.000.000	9,02%
Kab. Brebes	72.073.945.369,00	80.275.021.213,00	71.025.304.605	78.275.852.041,00	101.807.000.000	973.243.123.522,00	794.401.562.427,00	1.100.002.337.930	1.303.899.890.686	1.388.040.000.000	7,46%
Kab. Cilacap	102.780.340.747,00	120.746.425.475,65	149.709.123.163	172.327.030.144,82	196.673.000.000	1.172.492.784.622,00	1.167.974.673.910,00	1.237.238.910.798	1.550.277.519.753	1.714.290.000.000	10,76%
Kab. Demak	43.820.940.478,00	50.235.869.718,00	56.756.027.175	74.559.136.137,00	105.363.000.000	691.470.037.742,00	594.178.104.143,00	825.294.668.677	1.303.899.890.686	1.207.870.000.000	7,22%
Kab. Grobogan	59.924.849.995,00	77.079.602.181,00	78.366.420.899	87.912.458.185,00	105.463.000.000	870.652.060.324,00	689.545.059.235,00	901.486.884.016	1.172.116.161.868	1.202.190.000.000	8,61%

Kab. Jepara	71.267.901.105,00	71.919.859.343,00	84.713.357.594	103.642.014.200,00	129.077.000.000	744.074.360.333,00	667.357.698.957,00	852.318.433.739	1.095.748.594.964	1.257.040.000.000	10,00%
Kab. Karanganyar	64.470.676.168,00	66.971.682.994,00	79.510.216.512	104.080.774.286,00	116.707.000.000	772.834.363.740,00	722.849.222.570,00	876.226.764.023	978.180.653.172	1.171.210.000.000	9,46%
Kab. Kebumen	58.599.425.037,00	63.016.363.174,00	58.742.305.659	73.513.164.444,00	102.374.000.000	859.246.349.911,00	785.843.886.200,00	1.009.114.795.145	1.175.414.881.118	1.360.050.000.000	6,89%
Kab. Kendal	71.684.588.059,00	76.805.714.198,00	86.235.293.510	93.289.526.850,00	120.162.000.000	756.328.308.161,00	786.579.282.580,00	908.117.549.118	1.109.885.631.168	1.163.990.000.000	9,49%
Kab. Klaten	49.549.622.878,00	53.142.865.419,00	54.886.005.749	72.290.993.848,00	84.755.834.704	1.000.134.799.035,00	981.121.677.296,00	1.043.889.305.037	1.316.273.006.661	1.439.160.000.000	5,40%
Kab. Kudus	71.520.067.976,83	83.045.780.415,88	94.032.742.826	108.458.832.665,00	121.017.000.000	726.323.425.107,00	869.172.775.415,00	903.108.829.269	947.776.300.989	1.147.950.000.000	10,36%
Kab. Magelang	78.119.511.336,00	75.582.195.900,00	76.057.772.876	90.462.630.622,00	123.723.000.000	853.627.224.576,00	741.329.462.099,00	972.057.304.514	1.061.733.956.072	1.146.500.000.000	9,30%
Kab. Pati	80.495.293.572,01	90.667.623.138,54	112.526.536.706	134.475.561.623,00	163.734.000.000	900.218.508.870,00	791.667.646.493,65	989.490.570.878	1.197.268.041.634	1.421.940.000.000	10,90%
Kab. Pekalongan	55.278.780.755,50	58.468.319.642,00	67.580.239.029	81.362.869.869,00	114.793.000.000	672.945.318.285,00	689.683.535.705,00	725.164.609.507	895.018.868.667	1.008.580.000.000	9,30%
Kab. Pemalang	66.747.479.207,00	81.819.333.588,00	76.441.045.221	79.677.543.259,00	97.951.207.914	767.167.955.591,00	715.505.594.792,00	926.831.150.489	1.178.756.054.644	1.196.450.000.000	8,67%
Kab. Purbalingga	63.799.022.515,00	83.177.000.901,00	79.803.180.820	94.946.243.147,00	103.756.000.000	707.774.473.138,00	745.014.151.210,00	686.627.249.822	902.543.793.285	1.084.090.000.000	10,38%
Kab. Purworejo	51.174.860.039,00	60.814.316.979,00	69.609.314.290	88.941.781.923,00	98.262.003.374	691.991.234.560,00	647.915.430.962,00	815.859.716.252	968.310.613.298	1.123.310.000.000	8,65%
Kab. Rembang	51.125.558.424,00	56.887.895.318,00	65.699.258.995	73.931.945.930,62	103.305.000.000	592.524.623.085,00	530.460.549.530,00	682.413.462.558	868.066.639.368	969.132.000.000	9,63%
Kab. Semarang	82.942.880.537,00	90.389.871.349,00	98.831.140.360	133.198.913.306,00	156.104.000.000	794.396.380.841,00	789.795.015.474,00	808.713.917.179	1.042.026.783.589	1.178.650.000.000	12,03%
Kab. Sragen	65.803.095.551,00	72.681.309.220,00	79.627.347.874	94.518.999.398,00	127.696.000.000	806.031.692.183,00	704.794.171.324,00	902.841.109.262	1.030.136.587.484	1.196.730.000.000	9,43%
Kab. Sukoharjo	41.898.319.498,00	48.842.528.340,00	64.446.167.388	96.166.806.526,00	164.954.000.000	717.122.973.682,00	654.829.853.392,00	780.223.938.496	968.241.025.931	1.196.800.000.000	9,06%
Kab. Tegal	59.154.639.032,00	70.859.594.636,00	73.062.775.368	90.133.274.468,00	118.742.000.000	872.732.362.385,00	703.638.297.197,00	959.764.609.070	1.115.788.949.765	1.347.310.000.000	8,27%
Kab. Temanggung	37.923.898.939,00	47.327.328.141,00	55.211.017.361	63.343.494.510,00	78.514.689.212	611.356.971.071,00	606.966.527.368,00	662.150.174.118	816.160.548.955	912.680.000.000	7,74%
Kab. Wonogiri	54.129.294.926,00	57.092.965.296,00	64.968.769.365	77.141.691.388,00	100.037.000.000	846.335.488.078,00	795.752.279.901,00	963.983.677.115	1.091.698.844.419	1.302.180.000.000	7,01%
Kab. Wonosobo	38.158.243.909,00	46.324.943.517,00	52.079.016.939	67.398.727.303,00	82.335.296.457	628.220.566.928,00	495.600.218.304,00	674.386.334.632	888.438.419.143	986.537.000.000	7,82%
Kota Magelang	40.506.552.463,00	47.704.618.780,00	59.548.102.100	63.557.701.976,00	91.314.601.697	386.124.525.429,00	412.723.983.672,00	410.623.349.204	469.411.611.855	536.349.000.000	13,42%
Kota Pekalongan	30.096.285.331,00	32.238.175.787,84	47.495.707.337	63.344.977.617,16	91.205.786.310	397.144.017.604,00	384.213.290.964,00	408.563.990.615	489.616.887.441	538.564.000.000	11,49%
Kota Salatiga	45.147.465.983,00	53.055.833.309,00	51.549.747.508	60.611.340.067,00	77.798.870.961	368.393.972.667,00	282.027.667.986,00	418.615.915.631	458.618.399.163	551.635.000.000	14,14%
Kota Semarang	267.914.250.403,00	306.112.422.821,00	327.992.258.750	521.538.058.477,00	779.617.000.000	1.325.301.609.216,00	1.288.608.724.329,00	1.732.662.151.376	2.036.582.638.750	2.053.330.000.000	25,30%

Kota Surakarta	102.989.919.369,00	101.972.318.682,00	113.946.007.542	181.096.816.152,00	231.672.000.000	760.080.852.467,00	747.265.480.803,00	825.858.500.472	982.645.954.738	1.145.170.000.000	15,93%
Kota Tegal	69.567.243.716,00	90.840.876.590,00	101.321.867.412	117.244.290.641,00	156.663.000.000	393.200.043.902,00	458.620.879.881,00	474.360.687.266	572.009.660.567	586.687.000.000	21,21%

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Kab/Kota	PAD (Rp)					Total Belanja (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bantul	69.800.761.508,85	88.691.362.690,38	81.637.099.293	128.896.456.173,41	166.598.000.000	1.045.423.303.527,78	792.019.021.918,01	1.010.580.537.908	1.151.885.952.328	1.280.930.000.000	10,03%
Kab. Gunung Kidul	32.907.614.695,97	38.455.406.172,11	42.542.031.389	54.462.418.772,18	67.050.781.893	717.302.227.232,29	557.392.233.795,32	722.210.904.272	938.850.017.618	1.024.040.000.000	5,95%
Kab. Kulon Progo	42.289.208.476,81	39.358.629.412,10	48.280.640.675	53.752.293.431,63	74.028.663.155	598.059.933.717,75	577.736.996.100,47	610.929.785.006	778.747.172.035	879.479.000.000	7,42%
Kab. Sleman	152.839.968.007,43	157.231.267.811,84	163.056.459.138	226.723.271.088,47	301.070.000.000	916.355.784.818,50	1.016.026.601.135,37	1.093.347.493.609	1.238.719.246.213	1.375.420.000.000	17,45%
Kota Yogyakarta	132.431.571.514,72	161.473.838.209,95	179.423.640.058	228.870.559.645,59	338.284.000.000	698.566.664.120,78	695.351.653.000,86	839.866.480.661	932.018.507.343	1.023.800.000.000	24,23%

JAWA TIMUR

Kab/Kota	PAD (Rp)					Total Belanja (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bangkalan	32.106.268.819,67	34.477.143.994,68	40.975.170.911	65.039.401.772,82	80.268.572.727	714.458.409.107,55	715.577.570.968,06	793.791.989.194	1.109.022.544.013	1.220.090.000.000	5,38%
Kab. Banyuwangi	71.203.727.583,41	86.977.565.944,72	90.656.905.526	113.364.553.469,87	139.515.000.000	924.243.283.674,85	870.984.822.619,83	1.219.931.614.411	1.442.970.170.072	1.680.900.000.000	8,26%
Kab. Blitar	49.203.530.155,41	58.268.283.130,58	63.888.553.129	76.190.965.173,02	95.782.155.449	929.891.723.246,06	931.141.880.303,06	1.093.846.750.921	1.157.037.244.882	1.371.130.000.000	6,19%
Kab. Bojonegoro	58.690.962.773,99	70.233.938.303,98	79.891.483.832	164.585.991.460,32	159.248.000.000	920.019.556.108,06	942.169.000.670,92	1.101.524.798.110	1.287.101.717.497	1.692.120.000.000	8,66%
Kab. Bondowoso	35.371.877.885,00	40.121.861.293,10	49.663.941.019	66.816.392.275,09	77.846.177.657	600.953.474.997,44	705.698.336.447,84	765.513.977.032	950.958.157.445	1.074.130.000.000	6,47%
Kab. Gresik	134.426.191.451,42	168.302.821.579,56	167.644.725.522	273.975.992.140,13	428.126.000.000	903.570.189.568,18	1.009.099.863.786,00	1.084.214.298.828	1.266.019.120.104	1.451.130.000.000	19,63%

Kab. Jember	136.470.706.867,88	135.022.286.377,97	150.935.737.792	182.494.390.158,79	255.805.000.000	1.264.383.610.315,28	1.336.917.498.921,87	1.503.014.965.569	1.784.063.653.425	2.087.010.000.000	10,68%
Kab. Jombang	97.601.053.792,45	90.214.137.927,09	109.154.035.428	124.799.217.856,05	164.389.000.000	835.844.210.095,41	782.890.278.361,67	957.068.785.546	1.089.798.641.007	1.299.540.000.000	11,74%
Kab. Kediri	61.186.214.010,62	77.825.221.397,44	72.006.347.303	96.820.637.689,38	129.299.000.000	873.523.092.995,30	759.110.862.180,99	1.093.679.742.011	1.328.592.643.219	1.482.120.000.000	7,97%
Kab. Lamongan	66.608.873.942,51	71.452.396.308,29	95.244.807.228	99.545.629.500,31	129.285.000.000	861.131.330.025,44	773.679.672.707,00	1.044.489.166.450	1.285.411.365.552	1.471.490.000.000	8,52%
Kab. Lumajang	54.974.535.912,05	65.341.361.835,39	77.540.295.111	84.336.944.496,24	101.174.000.000	727.011.267.375,39	684.008.729.471,00	846.558.522.874	995.031.166.987	1.100.510.000.000	8,79%
Kab. Madiun	26.559.118.423,49	30.112.862.499,21	45.034.305.945	57.998.223.512,34	68.545.790.751	661.944.333.869,57	571.493.876.073,28	769.219.684.704	871.703.984.370	1.025.750.000.000	5,69%
Kab. Magetan	39.019.023.997,89	48.831.608.108,61	51.964.929.107	61.760.661.908,04	78.423.247.877	643.511.648.453,35	591.560.595.742,82	735.704.240.755	918.770.369.016	1.020.430.000.000	7,16%
Kab. Malang	100.327.728.826,99	153.526.441.537,99	130.465.915.608	172.333.275.999,86	197.254.000.000	1.337.850.741.205,73	1.387.731.032.458,62	1.654.298.910.348	1.913.349.777.149	2.208.270.000.000	8,88%
Kab. Mojokerto	55.790.363.612,51	59.633.358.366,84	79.507.391.611	108.709.405.732,32	164.774.000.000	816.670.530.673,20	687.768.115.893,99	877.373.379.602	1.054.656.936.201	1.245.130.000.000	9,62%
Kab. Nganjuk	60.307.577.351,84	72.274.642.864,63	79.507.391.611	94.283.242.448,99	125.173.000.000	794.269.647.364,00	699.341.589.211,95	940.179.414.190	1.127.222.290.873	1.347.290.000.000	8,81%
Kab. Ngawi	23.670.907.767,01	25.567.881.123,83	27.489.942.064	61.539.122.182,19	61.631.823.113	760.344.101.207,44	700.445.011.803,67	873.716.733.308	1.078.529.191.903	1.167.650.000.000	4,18%
Kab. Pacitan	23.692.306.074,35	27.666.707.833,39	29.488.179.488	48.359.915.660,96	57.298.239.683	587.015.184.711,91	598.719.817.723,01	677.580.027.937	839.931.989.378	962.226.000.000	4,94%
Kab. Pamekasan	36.957.799.237,87	40.220.358.249,32	49.313.077.418	70.704.959.013,38	84.377.021.981	648.357.540.486,00	540.392.117.759,40	754.566.678.104	924.137.999.267	1.098.540.000.000	7,00%
Kab. Pasuruan	80.437.436.655,96	87.668.802.526,57	100.309.476.757	155.276.540.400,47	194.859.000.000	841.526.718.993,68	977.532.626.386,23	1.125.394.997.168	1.318.578.813.844	1.534.560.000.000	10,38%
Kab. Ponorogo	41.850.665.707,64	48.046.560.260,05	48.664.624.186	65.936.673.551,92	108.766.000.000	806.416.174.589,58	660.228.416.667,38	908.838.285.103	1.059.034.980.463	1.263.000.000.000	6,53%
Kab. Probolinggo	38.030.645.757,41	42.548.002.266,46	45.715.475.874	75.654.859.911,61	90.009.457.309	419.155.464.989,20	554.437.448.005,57	861.394.887.451	1.112.602.221.083	1.290.410.000.000	7,17%
Kab. Sampang	30.509.094.226,53	37.026.235.941,13	36.396.342.481	46.973.974.632,16	61.065.357.245	608.963.319.110,46	755.623.559.737,63	814.942.353.695	870.875.351.647	991.977.000.000	5,19%
Kab. Sidoarjo	213.693.758.966,37	284.660.711.556,09	356.161.848.548	484.313.737.307,27	669.618.000.000	1.225.225.622.873,30	1.371.659.766.870,92	1.573.179.360.771	1.804.862.168.851	2.196.170.000.000	23,63%
Kab. Situbondo	34.337.186.291,73	33.913.027.881,34	46.579.946.274	61.650.613.747,44	67.050.480.515	569.539.004.874,13	628.721.153.925,20	689.729.076.684	838.589.264.436	927.269.000.000	6,55%
Kab. Sumenep	44.177.295.843,42	44.292.310.516,41	46.702.756.752	57.940.353.705,10	85.886.851.769	808.642.431.499,87	873.780.204.174,14	948.049.327.983	1.108.144.268.084	1.276.780.000.000	5,48%
Kab. Trenggalek	35.187.914.905,19	40.435.991.178,08	53.553.783.140	63.084.029.481,88	70.197.613.639	701.361.479.494,00	615.453.745.903,00	799.556.660.994	935.917.289.032	1.041.200.000.000	6,35%
Kab. Tuban	91.912.061.932,13	103.952.860.252,42	106.369.268.225	137.296.864.044,53	192.499.000.000	780.217.131.524,41	627.380.297.385,12	944.072.665.658	1.057.094.488.312	1.313.890.000.000	13,45%
Kab. Tulungagung	59.140.300.539,86	82.324.974.129,07	94.380.356.788	124.517.804.186,07	162.162.000.000	837.437.250.318,27	836.316.707.074,84	1.099.341.172.342	1.296.018.918.673	1.576.890.000.000	9,08%
Kota Blitar	40.794.908.395,66	39.860.842.246,42	47.690.974.774	52.564.078.517,39	63.640.945.339	355.913.654.440,90	275.656.739.931,89	417.915.452.457	533.328.191.460	518.217.000.000	11,89%
Kota Kediri	74.775.278.043,96	88.849.647.034,61	92.787.297.151	119.467.321.122,09	122.523.000.000	524.519.962.240,31	707.190.775.420,48	714.706.093.480	721.685.076.250	843.608.000.000	14,18%

Kota Madiun	27.014.134.400,86	43.880.880.252,97	45.034.305.945	61.305.077.273,73	72.030.950.610	353.005.469.944,31	389.629.298.051,02	506.275.950.052	526.846.072.313	610.542.000.000	10,25%
Kota Malang	83.403.547.594,61	92.476.383.151,21	113.490.265.809	185.818.563.982,76	229.810.000.000	687.335.498.394,23	809.128.186.196,91	967.903.242.520	1.048.167.573.629	1.252.270.000.000	14,27%
Kota Mojokerto	22.437.275.801,33	28.154.863.948,45	31.596.313.387	42.165.056.510,12	53.439.861.756	320.426.713.882,60	279.002.712.830,34	403.716.058.238	409.664.911.212	488.946.000.000	9,23%
Kota Pasuruan	27.183.431.287,29	35.678.357.863,22	34.101.032.334	45.213.899.175,76	42.366.216.434	322.929.369.363,36	412.265.150.628,00	416.427.763.901	454.069.498.737	487.918.000.000	8,78%
Kota Probolinggo	38.030.645.757,41	40.085.223.843,97	45.715.475.874	57.455.035.686,11	69.261.488.711	419.155.464.989,20	455.036.254.429,51	499.429.844.388	578.773.995.563	611.171.000.000	9,66%
Kota Surabaya	728.392.849.558,00	809.795.526.042,00	908.647.775.730	1.886.514.301.580,72	2.279.610.000.000	2.019.238.286.368,00	3.127.363.165.158,00	3.637.069.260.868	3.753.710.413.891	4.297.950.000.000	38,05%
Kota Batu	18.625.013.463,76	17.386.741.568,44	17.735.602.954	30.241.864.301,14	38.794.059.670	286.689.994.653,44	251.217.356.723,50	400.760.875.755	435.856.317.399	435.189.000.000	6,74%

BANTEN

Kab/Kota	PAD (Rp)					Total Belanja (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Lebak	50.899.149.186,00	58.021.746.576,00	64.200.116.205	93.065.058.829,00	65.556.626.655	803.635.963.541,00	831.043.309.356,00	893.656.193.255	1.172.211.338.158	581.222.000.000	7,94%
Kab. Pandeglang	33.480.446.171,00	31.921.009.780,00	31.855.280.016	56.189.197.538,00	54.048.393.635	703.366.207.635,60	726.569.164.940,00	929.790.479.611	1.168.966.949.257	1.260.430.000.000	4,33%
Kab. Serang	138.558.617.173,00	118.585.763.408,00	134.718.556.929	216.956.155.419,00	253.775.000.000	1.066.296.711.069,00	872.701.732.579,00	991.762.757.790	1.173.739.190.170	1.413.900.000.000	15,32%
Kab. Tangerang	336.921.813.888,00	372.841.974.479,00	247.412.605.874	665.231.223.713,00	839.868.000.000	1.690.648.258.691,00	2.015.224.698.054,00	1.667.840.561.368	2.027.969.740.162	2.709.390.000.000	23,41%
Kota Cilegon	129.831.026.861,00	135.537.939.538,00	150.600.840.049	253.747.779.831,00	334.018.000.000	585.723.003.908,00	610.878.430.394,00	674.228.903.416	840.408.522.801	876.686.000.000	27,00%
Kota Tangerang	181.850.256.965,61	193.575.745.112,00	230.634.138.004	499.080.750.732,00	631.519.000.000	996.673.627.143,00	1.103.605.837.081,00	1.395.733.836.491	1.635.673.957.311	1.925.250.000.000	23,12%

BALI

Kab/Kota	PAD (Rp)					Total Belanja (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Badung	759.801.041.723,00	850.168.320.769,47	979.194.610.828	1.406.298.099.449,0	1.872.350.000.000	1.074.683.238.557,41	1.429.454.483.078,13	1.202.670.839.428	1.572.210.487.617	2.142.920.000.000	77,68%

Kab. Bangli	12.655.751.193,09	16.301.547.341,74	16.252.951.099	22.963.226.126,08	40.751.049.552	409.701.661.064,00	405.428.989.318,50	445.083.985.239	538.227.740.317	82.340.927.122	12,90%
Kab. Buleleng	52.662.170.356,94	63.487.192.136,76	86.962.001.695	109.167.026.217,90	129.004.000.000	715.166.643.598,50	769.647.356.303,52	834.791.001.691	1.035.052.478.085	1.123.510.000.000	9,61%
Kab. Gianyar	96.922.244.069,57	112.540.530.034,90	153.559.078.289	209.598.193.886,12	261.222.000.000	629.285.275.501,00	713.896.671.840,52	736.023.697.431	836.087.203.114	982.328.000.000	20,74%
Kab. Jembrana	21.235.505.863,05	33.952.879.718,41	34.380.822.968	41.330.605.674,41	46.470.110.901	445.271.547.173,00	479.134.809.118,71	478.614.320.165	524.017.678.887	664.723.000.000	6,78%
Kab. Karangasem	43.005.826.519,06	47.842.959.879,78	62.696.409.427	129.556.195.519,69	144.020.000.000	603.003.957.633,35	629.919.455.709,68	630.249.356.945	768.474.631.477	171.631.000.000	25,09%
Kab. Klungkung	29.028.565.012,08	29.566.916.897,61	31.331.319.426	40.735.838.605,58	48.561.524.509	404.370.158.961,54	449.263.176.198,40	441.661.039.136	494.114.120.027	81.223.181.917	17,78%
Kab. Tabanan	54.675.811.807,28	93.840.477.885,31	116.860.678.337	141.046.016.976,85	183.295.000.000	614.427.998.334,48	700.965.893.832,71	771.801.072.192	880.108.493.436	1.062.210.000.000	14,14%
Kota Denpasar	176.244.773.924,85	215.156.916.393,03	260.482.616.202	424.959.412.894,23	511.327.000.000	659.265.823.702,08	780.768.138.623,52	927.540.252.224	1.100.129.048.469	1.309.530.000.000	32,01%

4.2 GROWTH PAD

JAWA BARAT

Kab/Kota	PADn dan PADn-1 (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bandung	144.660.409.277,08	153.271.649.974,00	198.650.518.839	291.062.396.559,70	366.317.000.000	26,98%
Kab. Bekasi	249.063.806.936,00	287.299.507.395,00	258.671.098.123	599.070.130.849,00	801.853.000.000	42,71%
Kab. Bogor	307.634.448.365,00	337.903.884.329,00	399.263.956.504	696.986.388.875,99	1.048.230.000.000	38,24%
Kab. Ciamis	46.847.498.084,00	51.276.555.046,00	50.512.875.943	58.900.535.511,00	87.711.885.423	18,37%
Kab. Cianjur	77.905.506.963,00	93.628.876.522,20	114.305.535.968	147.346.021.050,00	215.803.000.000	29,41%
Kab. Cirebon	101.512.669.939,00	116.095.437.888,00	139.426.725.461	193.843.221.050,00	229.993.000.000	23,03%
Kab. Garut	83.306.424.295,00	102.702.673.665,00	108.914.763.969	122.418.643.665,00	184.270.000.000	23,06%
Kab. Indramayu	56.770.811.859,76	86.408.586.763,33	101.840.184.226	144.553.804.178,00	164.672.000.000	31,48%
Kab. Karawang	131.785.038.542,00	133.731.689.147,00	210.282.788.665	378.630.051.818,00	658.597.000.000	53,18%
Kab. Kuningan	42.825.180.706,00	63.573.538.311,00	68.158.790.368	82.917.043.803,00	97.605.695.930	23,76%

Kab. Majalengka	47.721.941.970,00	68.121.599.611,00	76.398.018.123	86.579.536.411,00	103.741.000.000	22,01%
Kab. Purwakarta	59.429.026.541,00	64.044.768.371,00	76.489.287.145	111.690.657.181,00	151.568.000.000	27,23%
Kab. Subang	64.034.543.366,00	67.665.304.446,00	75.532.291.693	94.181.846.520,00	120.972.000.000	17,61%
Kab. Sukabumi	87.402.424.551,00	80.616.078.322,80	98.442.632.628	151.825.718.336,01	185.191.000.000	22,64%
Kab. Sumedang	88.256.488.869,38	104.172.660.220,71	108.646.803.911	139.823.277.566,34	161.996.000.000	16,72%
Kab. Tasikmalaya	47.194.342.024,00	49.657.867.201,00	48.338.061.521	51.160.921.192,00	60.970.810.517	6,89%
Kota Bandung	314.627.155.412,00	360.152.627.690,00	441.863.068.294	833.254.175.288,00	1.005.580.000.000	36,60%
Kota Bekasi	189.492.858.525,12	231.694.925.185,00	296.046.878.712	568.344.298.997,36	730.735.000.000	42,65%
Kota Bogor	97.768.134.591,00	115.921.660.827,00	127.488.089.831	230.449.644.620,00	300.932.000.000	34,97%
Kota Cirebon	65.069.398.951,00	77.318.391.813,00	90.828.709.752	120.130.531.059,00	149.490.000.000	23,25%
Kota Depok	112.772.421.051,30	115.720.347.455,90	142.419.943.002	282.747.544.886,76	474.705.000.000	48,03%
Kota Sukabumi	64.281.971.384,00	66.190.680.359,00	91.472.357.185	115.473.386.833,00	148.388.000.000	23,98%
Kota Tasikmalaya	63.849.140.718,00	76.503.523.370,19	104.787.914.975	110.369.865.905,03	153.009.000.000	25,19%
Kota Cimahi	64.964.960.822,00	75.037.372.353,00	87.321.279.805	116.677.729.307,61	144.541.000.000	22,34%
Kota Banjar	23.782.320.837,31	25.849.341.608,85	37.358.705.002	45.952.391.987,00	54.684.690.641	23,81%
Kab. Bandung Barat	33.617.474.326,00	39.964.363.945,00	50.367.666.303	94.606.169.067,00	136.241.000.000	44,19%

JAWA TENGAH

Kab/Kota	PADn dan PADn-1 (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Banjarnegara	46.521.396.931,00	60.636.814.797,00	62.486.768.063	71.106.953.223,00	94.271.467.989	
Kab.	107.425.765.063,00	120.520.361.680,84	164.892.425.634	191.899.680.819,00	242.107.000.000	19,94%

Banyumas						
Kab. Batang	41.192.714.868,00	44.643.602.159,00	45.421.689.588	60.155.029.031,00	84.720.049.515	22,89%
Kab. Blora	48.954.140.914,00	49.696.650.709,00	47.087.584.059	67.021.769.902,00	81.987.007.133	20,85%
Kab. Boyolali	63.733.408.461,00	70.004.658.137,00	86.485.635.223	96.737.566.506,00	127.725.000.000	15,23%
Kab. Brebes	72.073.945.369,00	80.275.021.213,00	71.025.304.605	78.275.852.041,00	101.807.000.000	19,32%
Kab. Cilacap	102.780.340.747,00	120.746.425.475,65	149.709.123.163	172.327.030.144,82	196.673.000.000	10,03%
Kab. Demak	43.820.940.478,00	50.235.869.718,00	56.756.027.175	74.559.136.137,00	105.363.000.000	17,68%
Kab. Grobogan	59.924.849.995,00	77.079.602.181,00	78.366.420.899	87.912.458.185,00	105.463.000.000	25,08%
Kab. Jepara	71.267.901.105,00	71.919.859.343,00	84.713.357.594	103.642.014.200,00	129.077.000.000	15,61%
Kab. Karanganyar	64.470.676.168,00	66.971.682.994,00	79.510.216.512	104.080.774.286,00	116.707.000.000	16,40%
Kab. Kebumen	58.599.425.037,00	63.016.363.174,00	58.742.305.659	73.513.164.444,00	102.374.000.000	16,41%
Kab. Kendal	71.684.588.059,00	76.805.714.198,00	86.235.293.510	93.289.526.850,00	120.162.000.000	16,29%
Kab. Klaten	49.549.622.878,00	53.142.865.419,00	54.886.005.749	72.290.993.848,00	84.755.834.704	14,10%
Kab. Kudus	71.520.067.976,83	83.045.780.415,88	94.032.742.826	108.458.832.665,00	121.017.000.000	14,87%
Kab. Magelang	78.119.511.336,00	75.582.195.900,00	76.057.772.876	90.462.630.622,00	123.723.000.000	14,07%
Kab. Pati	80.495.293.572,01	90.667.623.138,54	112.526.536.706	134.475.561.623,00	163.734.000.000	13,27%
Kab. Pekalongan	55.278.780.755,50	58.468.319.642,00	67.580.239.029	81.362.869.869,00	114.793.000.000	19,50%
Kab. Pemalang	66.747.479.207,00	81.819.333.588,00	76.441.045.221	79.677.543.259,00	97.951.207.914	20,71%
Kab. Purbalingga	63.799.022.515,00	83.177.000.901,00	79.803.180.820	94.946.243.147,00	103.756.000.000	10,79%
Kab. Purworejo	51.174.860.039,00	60.814.316.979,00	69.609.314.290	88.941.781.923,00	98.262.003.374	13,64%
Kab. Rembang	51.125.558.424,00	56.887.895.318,00	65.699.258.995	73.931.945.930,62	103.305.000.000	17,89%
Kab. Semarang	82.942.880.537,00	90.389.871.349,00	98.831.140.360	133.198.913.306,00	156.104.000.000	19,76%
Kab. Sragen	65.803.095.551,00	72.681.309.220,00	79.627.347.874	94.518.999.398,00	127.696.000.000	17,57%
Kab. Sukoharjo	41.898.319.498,00	48.842.528.340,00	64.446.167.388	96.166.806.526,00	164.954.000.000	18,45%
Kab. Tegal	59.154.639.032,00	70.859.594.636,00	73.062.775.368	90.133.274.468,00	118.742.000.000	42,32%
Kab. Temanggung	37.923.898.939,00	47.327.328.141,00	55.211.017.361	63.343.494.510,00	78.514.689.212	19,50%
Kab. Wonogiri	54.129.294.926,00	57.092.965.296,00	64.968.769.365	77.141.691.388,00	100.037.000.000	20,03%

Kab. Wonosobo	38.158.243.909,00	46.324.943.517,00	52.079.016.939	67.398.727.303,00	82.335.296.457	16,92%
Kota Magelang	40.506.552.463,00	47.704.618.780,00	59.548.102.100	63.557.701.976,00	91.314.601.697	21,35%
Kota Pekalongan	30.096.285.331,00	32.238.175.787,84	47.495.707.337	63.344.977.617,16	91.205.786.310	23,25%
Kota Salatiga	45.147.465.983,00	53.055.833.309,00	51.549.747.508	60.611.340.067,00	77.798.870.961	32,95%
Kota Semarang	267.914.250.403,00	306.112.422.821,00	327.992.258.750	521.538.058.477,00	779.617.000.000	15,15%
Kota Surakarta	102.989.919.369,00	101.972.318.682,00	113.946.007.542	181.096.816.152,00	231.672.000.000	32,47%
Kota Tegal	69.567.243.716,00	90.840.876.590,00	101.321.867.412	117.244.290.641,00	156.663.000.000	24,40%

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Kab/Kota	PADn dan PADn-1 (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bantul	69.800.761.508,85	88.691.362.690,38	81.637.099.293	128.896.456.173,41	166.598.000.000	26,56%
Kab. Gunung Kidul	32.907.614.695,97	38.455.406.172,11	42.542.031.389	54.462.418.772,18	67.050.781.893	19,65%
Kab. Kulon Progo	42.289.208.476,81	39.358.629.412,10	48.280.640.675	53.752.293.431,63	74.028.663.155	16,20%
Kab. Sleman	152.839.968.007,43	157.231.267.811,84	163.056.459.138	226.723.271.088,47	301.070.000.000	19,60%
Kota Yogyakarta	132.431.571.514,72	161.473.838.209,95	179.423.640.058	228.870.559.645,59	338.284.000.000	27,10%

JAWA TIMUR

Kab/Kota	PADn dan PADn-1 (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bangkalan	32.106.268.819,67	34.477.143.994,68	40.975.170.911	65.039.401.772,82	80.268.572.727	27,09%

Kab. Banyuwangi	71.203.727.583,41	86.977.565.944,72	90.656.905.526	113.364.553.469,87	139.515.000.000	18,62%
Kab. Blitar	49.203.530.155,41	58.268.283.130,58	63.888.553.129	76.190.965.173,02	95.782.155.449	18,26%
Kab. Bojonegoro	58.690.962.773,99	70.233.938.303,98	79.891.483.832	164.585.991.460,32	159.248.000.000	34,05%
Kab. Bondowoso	35.371.877.885,00	40.121.861.293,10	49.663.941.019	66.816.392.275,09	77.846.177.657	22,06%
Kab. Gresik	134.426.191.451,42	168.302.821.579,56	167.644.725.522	273.975.992.140,13	428.126.000.000	36,13%
Kab. Jember	136.470.706.867,88	135.022.286.377,97	150.935.737.792	182.494.390.158,79	255.805.000.000	17,95%
Kab. Jombang	97.601.053.792,45	90.214.137.927,09	109.154.035.428	124.799.217.856,05	164.389.000.000	14,87%
Kab. Kediri	61.186.214.010,62	77.825.221.397,44	72.006.347.303	96.820.637.689,38	129.299.000.000	21,93%
Kab. Lamongan	66.608.873.942,51	71.452.396.308,29	95.244.807.228	99.545.629.500,31	129.285.000.000	18,74%
Kab. Lumajang	54.974.535.912,05	65.341.361.835,39	77.540.295.111	84.336.944.496,24	101.174.000.000	16,56%
Kab. Madiun	26.559.118.423,49	30.112.862.499,21	45.034.305.945	57.998.223.512,34	68.545.790.751	27,48%
Kab. Magetan	39.019.023.997,89	48.831.608.108,61	51.964.929.107	61.760.661.908,04	78.423.247.877	19,35%
Kab. Malang	100.327.728.826,99	153.526.441.537,99	130.465.915.608	172.333.275.999,86	197.254.000.000	21,14%
Kab. Mojokerto	55.790.363.612,51	59.633.358.366,84	79.507.391.611	108.709.405.732,32	164.774.000.000	32,13%
Kab. Nganjuk	60.307.577.351,84	72.274.642.864,63	79.507.391.611	94.283.242.448,99	125.173.000.000	20,30%
Kab. Ngawi	23.670.907.767,01	25.567.881.123,83	27.489.942.064	61.539.122.182,19	61.631.823.113	34,89%
Kab. Pacitan	23.692.306.074,35	27.666.707.833,39	29.488.179.488	48.359.915.660,96	57.298.239.683	26,46%
Kab. Pamekasan	36.957.799.237,87	40.220.358.249,32	49.313.077.418	70.704.959.013,38	84.377.021.981	23,54%
Kab. Pasuruan	80.437.436.655,96	87.668.802.526,57	100.309.476.757	155.276.540.400,47	194.859.000.000	25,92%
Kab. Ponorogo	41.850.665.707,64	48.046.560.260,05	48.664.624.186	65.936.673.551,92	108.766.000.000	29,13%
Kab. Probolinggo	38.030.645.757,41	42.548.002.266,46	45.715.475.874	75.654.859.911,61	90.009.457.309	25,95%
Kab. Sampang	30.509.094.226,53	37.026.235.941,13	36.396.342.481	46.973.974.632,16	61.065.357.245	19,68%
Kab. Sidoarjo	213.693.758.966,37	284.660.711.556,09	356.161.848.548	484.313.737.307,27	669.618.000.000	33,14%
Kab. Situbondo	34.337.186.291,73	33.913.027.881,34	46.579.946.274	61.650.613.747,44	67.050.480.515	19,31%

Kab. Sumenep	44.177.295.843,42	44.292.310.516,41	46.702.756.752	57.940.353.705,10	85.886.851.769	19,50%
Kab. Trenggalek	35.187.914.905,19	40.435.991.178,08	53.553.783.140	63.084.029.481,88	70.197.613.639	19,11%
Kab. Tuban	91.912.061.932,13	103.952.860.252,42	106.369.268.225	137.296.864.044,53	192.499.000.000	21,18%
Kab. Tulungagung	59.140.300.539,86	82.324.974.129,07	94.380.356.788	124.517.804.186,07	162.162.000.000	29,00%
Kota Blitar	40.794.908.395,66	39.860.842.246,42	47.690.974.774	52.564.078.517,39	63.640.945.339	12,16%
Kota Kediri	74.775.278.043,96	88.849.647.034,61	92.787.297.151	119.467.321.122,09	122.523.000.000	13,64%
Kota Madiun	27.014.134.400,86	43.880.880.252,97	45.034.305.945	61.305.077.273,73	72.030.950.610	29,67%
Kota Malang	83.403.547.594,61	92.476.383.151,21	113.490.265.809	185.818.563.982,76	229.810.000.000	30,25%
Kota Mojokerto	22.437.275.801,33	28.154.863.948,45	31.596.313.387	42.165.056.510,12	53.439.861.756	24,47%
Kota Pasuruan	27.183.431.287,29	35.678.357.863,22	34.101.032.334	45.213.899.175,76	42.366.216.434	13,28%
Kota Probolinggo	38.030.645.757,41	40.085.223.843,97	45.715.475.874	57.455.035.686,11	69.261.488.711	16,42%
Kota Surabaya	728.392.849.558,00	809.795.526.042,00	908.647.775.730	1.886.514.301.580,72	2.279.610.000.000	37,96%
Kota Batu	18.625.013.463,76	17.386.741.568,44	17.735.602.954	30.241.864.301,14	38.794.059.670	23,54%

BANTEN

Kab/Kota	PADn dan PADn-1 (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Lebak	50.899.149.186,00	58.021.746.576,00	64.200.116.205	93.065.058.829,00	65.556.626.655	10,01%
Kab. Pandeglang	33.480.446.171,00	31.921.009.780,00	31.855.280.016	56.189.197.538,00	54.048.393.635	16,93%
Kab. Serang	138.558.617.173,00	118.585.763.408,00	134.718.556.929	216.956.155.419,00	253.775.000.000	19,30%
Kab. Tangerang	336.921.813.888,00	372.841.974.479,00	247.412.605.874	665.231.223.713,00	839.868.000.000	43,04%
Kota Cilegon	129.831.026.861,00	135.537.939.538,00	150.600.840.049	253.747.779.831,00	334.018.000.000	28,91%
Kota	181.850.256.965,61	193.575.745.112,00	230.634.138.004	499.080.750.732,00	631.519.000.000	42,13%

Tangerang						
-----------	--	--	--	--	--	--

BALI

Kab/Kota	PADn dan PADn-1 (Rp)					Nilai (%)
	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Badung	759.801.041.723,00	850.168.320.769,47	979.194.610.828	1.406.298.099.449,0	1.872.350.000.000	15,18%
Kab. Bangli	12.655.751.193,09	16.301.547.341,74	16.252.951.099	22.963.226.126,08	40.751.049.552	-0,30%
Kab. Buleleng	52.662.170.356,94	63.487.192.136,76	86.962.001.695	109.167.026.217,90	129.004.000.000	36,98%
Kab. Gianyar	96.922.244.069,57	112.540.530.034,90	153.559.078.289	209.598.193.886,12	261.222.000.000	36,45%
Kab. Jembrana	21.235.505.863,05	33.952.879.718,41	34.380.822.968	41.330.605.674,41	46.470.110.901	1,26%
Kab. Karangasem	43.005.826.519,06	47.842.959.879,78	62.696.409.427	129.556.195.519,69	144.020.000.000	31,05%
Kab. Klungkung	29.028.565.012,08	29.566.916.897,61	31.331.319.426	40.735.838.605,58	48.561.524.509	5,97%
Kab. Tabanan	54.675.811.807,28	93.840.477.885,31	116.860.678.337	141.046.016.976,85	183.295.000.000	24,53%
Kota Denpasar	176.244.773.924,85	215.156.916.393,03	260.482.616.202	424.959.412.894,23	511.327.000.000	21,07%

Lampiran 5

RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

METODE INDEKS

5.1 INDEKS GROWTH PAD

JAWA BARAT

Kabupaten/ Kota	PAD (Rp)					Nilai Max (Rp)	Nilai Min (Rp)	INDEKS (%)					Indeks Growth
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bandung	144.660.409.277,08	153.271.649.974,00	198.650.518.839	291.062.396.559,70	366.317.000.000	366317000000	144.660.409.277,08	0,0000	0,0388	0,2436	0,6605	1,0000	0,3886
Kab. Bekasi	249.063.806.936,00	287.299.507.395,00	258.671.098.123	599.070.130.849,00	801.853.000.000	801853000000	249.063.806.936,00	0,0000	0,0692	0,0174	0,6332	1,0000	0,3439
Kab. Bogor	307.634.448.365,00	337.903.884.329,00	399.263.956.504	696.986.388.875,99	1.048.230.000.000	1048230000000	307.634.448.365,00	0,0000	0,0409	0,1237	0,5257	1,0000	0,3381
Kab. Ciamis	46.847.498.084,00	51.276.555.046,00	50.512.875.943	58.900.535.511,00	87.711.885.423	87711885423	46.847.498.084,00	0,0000	0,1084	0,0897	0,2950	1,0000	0,2986
Kab. Cianjur	77.905.506.963,00	93.628.876.522,20	114.305.535.968	147.346.021.050,00	215.803.000.000	215803000000	77.905.506.963,00	0,0000	0,1140	0,2640	0,5036	1,0000	0,3763
Kab. Cirebon	101.512.669.939,00	116.095.437.888,00	139.426.725.461	193.843.221.050,00	229.993.000.000	229993000000	101.512.669.939,00	0,0000	0,1135	0,2951	0,7186	1,0000	0,4254
Kab. Garut	83.306.424.295,00	102.702.673.665,00	108.914.763.969	122.418.643.665,00	184.270.000.000	184270000000	83.306.424.295,00	0,0000	0,1921	0,2536	0,3874	1,0000	0,3666
Kab. Indramayu	56.770.811.859,76	86.408.586.763,33	101.840.184.226	144.553.804.178,00	164.672.000.000	164672000000	56.770.811.859,76	0,0000	0,2747	0,4177	0,8135	1,0000	0,5012
Kab. Karawang	131.785.038.542,00	133.731.689.147,00	210.282.788.665	378.630.051.818,00	658.597.000.000	658597000000	131.785.038.542,00	0,0000	0,0037	0,1490	0,4686	1,0000	0,3243
Kab. Kuningan	42.825.180.706,00	63.573.538.311,00	68.158.790.368	82.917.043.803,00	97.605.695.930	97605695930	42.825.180.706,00	0,0000	0,3788	0,4625	0,7319	1,0000	0,5146
Kab. Majalengka	47.721.941.970,00	68.121.599.611,00	76.398.018.123	86.579.536.411,00	103.741.000.000	103741000000	47.721.941.970,00	0,0000	0,3642	0,5119	0,6936	1,0000	0,5139
Kab. Purwakarta	59.429.026.541,00	64.044.768.371,00	76.489.287.145	111.690.657.181,00	151.568.000.000	151568000000	59.429.026.541,00	0,0000	0,0501	0,1852	0,5672	1,0000	0,3605
Kab. Subang	64.034.543.366,00	67.665.304.446,00	75.532.291.693	94.181.846.520,00	120.972.000.000	120972000000	64.034.543.366,00	0,0000	0,0638	0,2019	0,5295	1,0000	0,3590

Kab. Sukabumi	87.402.424.551,00	80.616.078.322,80	98.442.632.628	151.825.718.336,01	185.191.000.000	185191000000	80.616.078.322,80	0,0649	0,0000	0,1705	0,6809	1,0000	0,3833
Kab. Sumedang	88.256.488.869,38	104.172.660.220,71	108.646.803.911	139.823.277.566,34	161.996.000.000	161996000000	88.256.488.869,38	0,0000	0,2158	0,2765	0,6993	1,0000	0,4383
Kab. Tasikmalaya	47.194.342.024,00	49.657.867.201,00	48.338.061.521	51.160.921.192,00	60.970.810.517	60970810517	47.194.342.024,00	0,0000	0,1788	0,0830	0,2879	1,0000	0,3100
Kota Bandung	314.627.155.412,00	360.152.627.690,00	441.863.068.294	833.254.175.288,00	1.005.580.000.000	1005580000000	314.627.155.412,00	0,0000	0,0659	0,1841	0,7506	1,0000	0,4001
Kota Bekasi	189.492.858.525,12	231.694.925.185,00	296.046.878.712	568.344.298.997,36	730.735.000.000	730735000000	189.492.858.525,12	0,0000	0,0780	0,1969	0,7000	1,0000	0,3950
Kota Bogor	97.768.134.591,00	115.921.660.827,00	127.488.089.831	230.449.644.620,00	300.932.000.000	300932000000	97.768.134.591,00	0,0000	0,0894	0,1463	0,6531	1,0000	0,3777
Kota Cirebon	65.069.398.951,00	77.318.391.813,00	90.828.709.752	120.130.531.059,00	149.490.000.000	149490000000	65.069.398.951,00	0,0000	0,1451	0,3051	0,6522	1,0000	0,4205
Kota Depok	112.772.421.051,30	115.720.347.455,90	142.419.943.002	282.747.544.886,76	474.705.000.000	474705000000	112.772.421.051,30	0,0000	0,0081	0,0819	0,4696	1,0000	0,3119
Kota Sukabumi	64.281.971.384,00	66.190.680.359,00	91.472.357.185	115.473.386.833,00	148.388.000.000	148388000000	64.281.971.384,00	0,0000	0,0227	0,3233	0,6087	1,0000	0,3909
Kota Tasikmalaya	63.849.140.718,00	76.503.523.370,19	104.787.914.975	110.369.865.905,03	153.009.000.000	153009000000	63.849.140.718,00	0,0000	0,1419	0,4592	0,5218	1,0000	0,4246
Kota Cimahi	64.964.960.822,00	75.037.372.353,00	87.321.279.805	116.677.729.307,61	144.541.000.000	144541000000	64.964.960.822,00	0,0000	0,1266	0,2809	0,6499	1,0000	0,4115
Kota Banjar	23.782.320.837,31	25.849.341.608,85	37.358.705.002	45.952.391.987,00	54.684.690.641	54684690641	23.782.320.837,31	0,0000	0,0669	0,4393	0,7174	1,0000	0,4447
Kab. Bandung Barat	33.617.474.326,00	39.964.363.945,00	50.367.666.303	94.606.169.067,00	136.241.000.000	136241000000	33.617.474.326,00	0,0000	0,0618	0,1632	0,5943	1,0000	0,3639

JAWA TENGAH

Kab./ Kota	PAD					Nilai Max	Nilai Min	INDEKS (%)					Indeks Growth
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Banjarnegara	46.521.396.931,00	60.636.814.797,00	62.486.768.063	71.106.953.223,00	94.271.467.989	94271467989	46.521.396.931,00	0,0000	0,2956	0,3344	0,5149	1,0000	0,4290
Kab. Banyumas	107.425.765.063,0	120.520.361.680,84	164.892.425.634	191.899.680.819,00	242.107.000.000	242107000000	107.425.765.063,00	0,0000	0,0972	0,4267	0,6272	1,0000	0,4302
Kab. Batang	41.192.714.868,00	44.643.602.159,00	45.421.689.588	60.155.029.031,00	84.720.049.515	84720049515	41.192.714.868,00	0,0000	0,0793	0,0972	0,4356	1,0000	0,3224
Kab. Blora	48.954.140.914,00	49.696.650.709,00	47.087.584.059	67.021.769.902,00	81.987.007.133	81987007133	47.087.584.059,00	0,0535	0,0748	0,0000	0,5712	1,0000	0,3399
Kab. Boyolali	63.733.408.461,00	70.004.658.137,00	86.485.635.223	96.737.566.506,00	127.725.000.000	127725000000	63.733.408.461,00	0,0000	0,0980	0,3556	0,5158	1,0000	0,3939

Kab. Brebes	72.073.945.369,00	80.275.021.213,00	71.025.304.605	78.275.852.041,00	101.807.000.000	101807000000	71.025.304.605,00	0,0341	0,3005	0,0000	0,2355	1,0000	0,3140
Kab. Cilacap	102.780.340.747,0	120.746.425.475,65	149.709.123.163	172.327.030.144,82	196.673.000.000	196673000000	102.780.340.747,00	0,0000	0,1913	0,4998	0,7407	1,0000	0,4864
Kab. Demak	43.820.940.478,00	50.235.869.718,00	56.756.027.175	74.559.136.137,00	105.363.000.000	105363000000	43.820.940.478,00	0,0000	0,1042	0,2102	0,4995	1,0000	0,3628
Kab. Grobogan	59.924.849.995,00	77.079.602.181,00	78.366.420.899	87.912.458.185,00	105.463.000.000	105463000000	59.924.849.995,00	0,0000	0,3767	0,4050	0,6146	1,0000	0,4793
Kab. Jepara	71.267.901.105,00	71.919.859.343,00	84.713.357.594	103.642.014.200,00	129.077.000.000	129077000000	71.267.901.105,00	0,0000	0,0113	0,2326	0,5600	1,0000	0,3608
Kab. Karanganyar	64.470.676.168,00	66.971.682.994,00	79.510.216.512	104.080.774.286,00	116.707.000.000	116707000000	64.470.676.168,00	0,0000	0,0479	0,2879	0,7583	1,0000	0,4188
Kab. Kebumen	58.599.425.037,00	63.016.363.174,00	58.742.305.659	73.513.164.444,00	102.374.000.000	102374000000	58.599.425.037,00	0,0000	0,1009	0,0033	0,3407	1,0000	0,2890
Kab. Kendal	71.684.588.059,00	76.805.714.198,00	86.235.293.510	93.289.526.850,00	120.162.000.000	120162000000	71.684.588.059,00	0,0000	0,1056	0,3002	0,4457	1,0000	0,3703
Kab. Klaten	49.549.622.878,00	53.142.865.419,00	54.886.005.749	72.290.993.848,00	84.755.834.704	84755834704	49.549.622.878,00	0,0000	0,1021	0,1516	0,6459	1,0000	0,3799
Kab. Kudus	71.520.067.976,83	83.045.780.415,88	94.032.742.826	108.458.832.665,00	121.017.000.000	121017000000	71.520.067.976,83	0,0000	0,2329	0,4548	0,7463	1,0000	0,4868
Kab. Magelang	78.119.511.336,00	75.582.195.900,00	76.057.772.876	90.462.630.622,00	123.723.000.000	123723000000	75.582.195.900,00	0,0527	0,0000	0,0099	0,3091	1,0000	0,2743
Kab. Pati	80.495.293.572,01	90.667.623.138,54	112.526.536.706	134.475.561.623,00	163.734.000.000	163734000000	80.495.293.572,01	0,0000	0,1222	0,3848	0,6485	1,0000	0,4311
Kab. Pekalongan	55.278.780.755,50	58.468.319.642,00	67.580.239.029	81.362.869.869,00	114.793.000.000	114793000000	55.278.780.755,50	0,0000	0,0536	0,2067	0,4383	1,0000	0,3397
Kab. Pemalang	66.747.479.207,00	81.819.333.588,00	76.441.045.221	79.677.543.259,00	97.951.207.914	97951207914	66.747.479.207,00	0,0000	0,4830	0,3107	0,4144	1,0000	0,4416
Kab. Purbalingga	63.799.022.515,00	83.177.000.901,00	79.803.180.820	94.946.243.147,00	103.756.000.000	103756000000	63.799.022.515,00	0,0000	0,4850	0,4005	0,7795	1,0000	0,5330
Kab. Purworejo	51.174.860.039,00	60.814.316.979,00	69.609.314.290	88.941.781.923,00	98.262.003.374	98262003374	51.174.860.039,00	0,0000	0,2047	0,3915	0,8021	1,0000	0,4797
Kab. Rembang	51.125.558.424,00	56.887.895.318,00	65.699.258.995	73.931.945.930,62	103.305.000.000	103305000000	51.125.558.424,00	0,0000	0,1104	0,2793	0,4371	1,0000	0,3654
Kab. Semarang	82.942.880.537,00	90.389.871.349,00	98.831.140.360	133.198.913.306,00	156.104.000.000	156104000000	82.942.880.537,00	0,0000	0,1018	0,2172	0,6869	1,0000	0,4012
Kab. Sragen	65.803.095.551,00	72.681.309.220,00	79.627.347.874	94.518.999.398,00	127.696.000.000	127696000000	65.803.095.551,00	0,0000	0,1111	0,2234	0,4640	1,0000	0,3597
Kab. Sukoharjo	41.898.319.498,00	48.842.528.340,00	64.446.167.388	96.166.806.526,00	164.954.000.000	164954000000	41.898.319.498,00	0,0000	0,0564	0,1832	0,4410	1,0000	0,3361
Kab. Tegal	59.154.639.032,00	70.859.594.636,00	73.062.775.368	90.133.274.468,00	118.742.000.000	118742000000	59.154.639.032,00	0,0000	0,1964	0,2334	0,5199	1,0000	0,3899
Kab. Temanggung	37.923.898.939,00	47.327.328.141,00	55.211.017.361	63.343.494.510,00	78.514.689.212	78514689212	37.923.898.939,00	0,0000	0,2317	0,4259	0,6262	1,0000	0,4568

Kab. Wonogiri	54.129.294.926,00	57.092.965.296,00	64.968.769.365	77.141.691.388,00	100.037.000.000	100037000000	54.129.294.926,00	0,0000	0,0646	0,2361	0,5013	1,0000	0,3604
Kab. Wonosobo	38.158.243.909,00	46.324.943.517,00	52.079.016.939	67.398.727.303,00	82.335.296.457	82335296457	38.158.243.909,00	0,0000	0,1849	0,3151	0,6619	1,0000	0,4324
Kota Magelang	40.506.552.463,00	47.704.618.780,00	59.548.102.100	63.557.701.976,00	91.314.601.697	91314601697	40.506.552.463,00	0,0000	0,1417	0,3748	0,4537	1,0000	0,3940
Kota Pekalongan	30.096.285.331,00	32.238.175.787,84	47.495.707.337	63.344.977.617,16	91.205.786.310	91205786310	30.096.285.331,00	0,0000	0,0351	0,2847	0,5441	1,0000	0,3728
Kota Salatiga	45.147.465.983,00	53.055.833.309,00	51.549.747.508	60.611.340.067,00	77.798.870.961	77798870961	45.147.465.983,00	0,0000	0,2422	0,1961	0,4736	1,0000	0,3824
Kota Semarang	267.914.250.403,0	306.112.422.821,00	327.992.258.750	521.538.058.477,00	779.617.000.000	779617000000	267.914.250.403,00	0,0000	0,0746	0,1174	0,4956	1,0000	0,3375
Kota Surakarta	102.989.919.369,0	101.972.318.682,00	113.946.007.542	181.096.816.152,00	231.672.000.000	231672000000	101.972.318.682,00	0,0078	0,0000	0,0923	0,6101	1,0000	0,3420
Kota Tegal	69.567.243.716,00	90.840.876.590,00	101.321.867.412	117.244.290.641,00	156.663.000.000	156663000000	69.567.243.716,00	0,0000	0,2443	0,3646	0,5474	1,0000	0,4313

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Kabupaten/ Kota	PAD					Nilai Max	Nilai Min	INDEKS (%)					Indeks Growth
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bantul	69.800.761.508,85	88.691.362.690,38	81.637.099.293	128.896.456.173,41	166.598.000.000	166598000000	69.800.761.508,85	0,0000	0,1952	0,1223	0,6105	1,0000	0,3856
Kab. Gunung Kidul	32.907.614.695,97	38.455.406.172,11	42.542.031.389	54.462.418.772,18	67.050.781.893	67050781893	32.907.614.695,97	0,0000	0,1625	0,2822	0,6313	1,0000	0,4152
Kab. Kulon Progo	42.289.208.476,81	39.358.629.412,10	48.280.640.675	53.752.293.431,63	74.028.663.155	74028663155	39.358.629.412,10	0,0845	0,0000	0,2573	0,4152	1,0000	0,3514
Kab. Sleman	152.839.968.007,4 3	157.231.267.811,84	163.056.459.138	226.723.271.088,47	301.070.000.000	301070000000	152.839.968.007,43	0,0000	0,0296	0,0689	0,4984	1,0000	0,3194
Kota Yogyakarta	132.431.571.514,7 2	161.473.838.209,95	179.423.640.058	228.870.559.645,59	338.284.000.000	338284000000	132.431.571.514,72	0,0000	0,1411	0,2283	0,4685	1,0000	0,3676

JAWA TIMUR

Kab/ Kota	PAD					Nilai Max	Nilai Min	INDEKS (%)					Indeks Growth
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bangkalan	32.106.268.819,67	34.477.143.994,68	40.975.170.911	65.039.401.772,82	80.268.572.727	80268572727	32.106.268.819,67	0,0000	0,0492	0,1841	0,6838	1,0000	0,3834
Kab. Banyuwangi	71.203.727.583,41	86.977.565.944,72	90.656.905.526	113.364.553.469,87	139.515.000.000	139515000000	71.203.727.583,41	0,0000	0,2309	0,2848	0,6172	1,0000	0,4266
Kab. Blitar	49.203.530.155,41	58.268.283.130,58	63.888.553.129	76.190.965.173,02	95.782.155.449	95782155449	49.203.530.155,41	0,0000	0,1946	0,3153	0,5794	1,0000	0,4179
Kab. Bojonegoro	58.690.962.773,99	70.233.938.303,98	79.891.483.832	164.585.991.460,32	159.248.000.000	164585991460	58.690.962.773,99	0,0000	0,1090	0,2002	1,0000	0,9496	0,4518
Kab. Bondowoso	35.371.877.885,00	40.121.861.293,10	49.663.941.019	66.816.392.275,09	77.846.177.657	77846177657	35.371.877.885,00	0,0000	0,1118	0,3365	0,7403	1,0000	0,4377
Kab. Gresik	134.426.191.451,42	168.302.821.579,56	167.644.725.522	273.975.992.140,13	428.126.000.000	428126000000	134.426.191.451,42	0,0000	0,1153	0,1131	0,4751	1,0000	0,3407
Kab. Jember	136.470.706.867,88	135.022.286.377,97	150.935.737.792	182.494.390.158,79	255.805.000.000	255805000000	135.022.286.377,97	0,0120	0,0000	0,1318	0,3930	1,0000	0,3074
Kab. Jombang	97.601.053.792,45	90.214.137.927,09	109.154.035.428	124.799.217.856,05	164.389.000.000	164389000000	90.214.137.927,09	0,0996	0,0000	0,2553	0,4663	1,0000	0,3642
Kab. Kediri	61.186.214.010,62	77.825.221.397,44	72.006.347.303	96.820.637.689,38	129.299.000.000	129299000000	61.186.214.010,62	0,0000	0,2443	0,1589	0,5232	1,0000	0,3853
Kab. Lamongan	66.608.873.942,51	71.452.396.308,29	95.244.807.228	99.545.629.500,31	129.285.000.000	129285000000	66.608.873.942,51	0,0000	0,0773	0,4569	0,5255	1,0000	0,4119
Kab. Lumajang	54.974.535.912,05	65.341.361.835,39	77.540.295.111	84.336.944.496,24	101.174.000.000	101174000000	54.974.535.912,05	0,0000	0,2244	0,4884	0,6356	1,0000	0,4697
Kab. Madiun	26.559.118.423,49	30.112.862.499,21	45.034.305.945	57.998.223.512,34	68.545.790.751	68545790751	26.559.118.423,49	0,0000	0,0846	0,4400	0,7488	1,0000	0,4547
Kab. Magetan	39.019.023.997,89	48.831.608.108,61	51.964.929.107	61.760.661.908,04	78.423.247.877	78423247877	39.019.023.997,89	0,0000	0,2490	0,3285	0,5771	1,0000	0,4309
Kab. Malang	100.327.728.826,99	153.526.441.537,99	130.465.915.608	172.333.275.999,86	197.254.000.000	197254000000	100.327.728.826,99	0,0000	0,5489	0,3109	0,7429	1,0000	0,5205
Kab. Mojokerto	55.790.363.612,51	59.633.358.366,84	79.507.391.611	108.709.405.732,32	164.774.000.000	164774000000	55.790.363.612,51	0,0000	0,0353	0,2176	0,4856	1,0000	0,3477
Kab. Nganjuk	60.307.577.351,84	72.274.642.864,63	79.507.391.611	94.283.242.448,99	125.173.000.000	125173000000	60.307.577.351,84	0,0000	0,1845	0,2960	0,5238	1,0000	0,4009
Kab. Ngawi	23.670.907.767,01	25.567.881.123,83	27.489.942.064	61.539.122.182,19	61.631.823.113	61631823113	23.670.907.767,01	0,0000	0,0500	0,1006	0,9976	1,0000	0,4296
Kab. Pacitan	23.692.306.074,35	27.666.707.833,39	29.488.179.488	48.359.915.660,96	57.298.239.683	57298239683	23.692.306.074,35	0,0000	0,1183	0,1725	0,7340	1,0000	0,4050
Kab.	36.957.799.237,87	40.220.358.249,32	49.313.077.418	70.704.959.013,38	84.377.021.981	84377021981	36.957.799.237,87	0,0000	0,0688	0,2606	0,7117	1,0000	0,4082

Pamekasan													
Kab. Pasuruan	80.437.436.655,96	87.668.802.526,57	100.309.476.757	155.276.540.400,47	194.859.000.000	194859000000	80.437.436.655,96	0,0000	0,0632	0,1737	0,6541	1,0000	0,3782
Kab. Ponorogo	41.850.665.707,64	48.046.560.260,05	48.664.624.186	65.936.673.551,92	108.766.000.000	108766000000	41.850.665.707,64	0,0000	0,0926	0,1018	0,3599	1,0000	0,3109
Kab. Probolinggo	38.030.645.757,41	42.548.002.266,46	45.715.475.874	75.654.859.911,61	90.009.457.309	90009457309	38.030.645.757,41	0,0000	0,0869	0,1478	0,7238	1,0000	0,3917
Kab. Sampang	30.509.094.226,53	37.026.235.941,13	36.396.342.481	46.973.974.632,16	61.065.357.245	61065357245	30.509.094.226,53	0,0000	0,2133	0,1927	0,5388	1,0000	0,3890
Kab. Sidoarjo	213.693.758.966,37	284.660.711.556,09	356.161.848.548	484.313.737.307,27	669.618.000.000	669618000000	213.693.758.966,37	0,0000	0,1557	0,3125	0,5936	1,0000	0,4123
Kab. Situbondo	34.337.186.291,73	33.913.027.881,34	46.579.946.274	61.650.613.747,44	67.050.480.515	67050480515	33.913.027.881,34	0,0128	0,0000	0,3823	0,8370	1,0000	0,4464
Kab. Sumenep	44.177.295.843,42	44.292.310.516,41	46.702.756.752	57.940.353.705,10	85.886.851.769	85886851769	44.177.295.843,42	0,0000	0,0028	0,0605	0,3300	1,0000	0,2787
Kab. Trenggalek	35.187.914.905,19	40.435.991.178,08	53.553.783.140	63.084.029.481,88	70.197.613.639	70197613639	35.187.914.905,19	0,0000	0,1499	0,5246	0,7968	1,0000	0,4943
Kab. Tuban	91.912.061.932,13	103.952.860.252,42	106.369.268.225	137.296.864.044,53	192.499.000.000	192499000000	91.912.061.932,13	0,0000	0,1197	0,1437	0,4512	1,0000	0,3429
Kab. Tulungagung	59.140.300.539,86	82.324.974.129,07	94.380.356.788	124.517.804.186,07	162.162.000.000	162162000000	59.140.300.539,86	0,0000	0,2250	0,3421	0,6346	1,0000	0,4403
Kota Blitar	40.794.908.395,66	39.860.842.246,42	47.690.974.774	52.564.078.517,39	63.640.945.339	63640945339	39.860.842.246,42	0,0393	0,0000	0,3293	0,5342	1,0000	0,3805
Kota Kediri	74.775.278.043,96	88.849.647.034,61	92.787.297.151	119.467.321.122,09	122.523.000.000	122523000000	74.775.278.043,96	0,0000	0,2948	0,3772	0,9360	1,0000	0,5216
Kota Madiun	27.014.134.400,86	43.880.880.252,97	45.034.305.945	61.305.077.273,73	72.030.950.610	72030950610	27.014.134.400,86	0,0000	0,3747	0,4003	0,7617	1,0000	0,5073
Kota Malang	83.403.547.594,61	92.476.383.151,21	113.490.265.809	185.818.563.982,76	229.810.000.000	229810000000	83.403.547.594,61	0,0000	0,0620	0,2055	0,6995	1,0000	0,3934
Kota Mojokerto	22.437.275.801,33	28.154.863.948,45	31.596.313.387	42.165.056.510,12	53.439.861.756	53439861756	22.437.275.801,33	0,0000	0,1844	0,2954	0,6363	1,0000	0,4232
Kota Pasuruan	27.183.431.287,29	35.678.357.863,22	34.101.032.334	45.213.899.175,76	42.366.216.434	45213899176	27.183.431.287,29	0,0000	0,4711	0,3837	1,0000	0,8421	0,5394
Kota Probolinggo	38.030.645.757,41	40.085.223.843,97	45.715.475.874	57.455.035.686,11	69.261.488.711	69261488711	38.030.645.757,41	0,0000	0,0658	0,2461	0,6220	1,0000	0,3868
Kota Surabaya	728.392.849.558,00	809.795.526.042,00	908.647.775.730	1.886.514.301.580,72	2.279.610.000.000	2279610000000	728.392.849.558,00	0,0000	0,0525	0,1162	0,7466	1,0000	0,3831
Kota Batu	18.625.013.463,76	17.386.741.568,44	17.735.602.954	30.241.864.301,14	38.794.059.670	38794059670	17.386.741.568,44	0,0578	0,0000	0,0163	0,6005	1,0000	0,3349

BANTEN

Kab/ Kota	PAD					Nilai Max	Nilai Min	INDEKS (%)					Indeks Growth
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Lebak	50.899.149.186,00	58.021.746.576,00	64.200.116.205	93.065.058.829,00	65.556.626.655	93065058829	50.899.149.186,00	0,0000	0,1689	0,3154	1,0000	0,3476	0,3664
Kab. Pandeglang	33.480.446.171,00	31.921.009.780,00	31.855.280.016	56.189.197.538,00	54.048.393.635	56189197538	31.855.280.016,00	0,0668	0,0027	0,0000	1,0000	0,9120	0,3963
Kab. Serang	138.558.617.173,00	118.585.763.408,00	134.718.556.929	216.956.155.419,00	253.775.000.000	253775000000	118.585.763.408,00	0,1477	0,0000	0,1193	0,7276	1,0000	0,3989
Kab. Tangerang	336.921.813.888,00	372.841.974.479,00	247.412.605.874	665.231.223.713,00	839.868.000.000	839868000000	247.412.605.874,00	0,1511	0,2117	0,0000	0,7052	1,0000	0,4136
Kota Cilegon	129.831.026.861,00	135.537.939.538,00	150.600.840.049	253.747.779.831,00	334.018.000.000	334018000000	129.831.026.861,00	0,0000	0,0279	0,1017	0,6069	1,0000	0,3473
Kota Tangerang	181.850.256.965,61	193.575.745.112,00	230.634.138.004	499.080.750.732,00	631.519.000.000	631519000000	181.850.256.965,61	0,0000	0,0261	0,1085	0,7055	1,0000	0,3680

BALI

Kab/ Kota	PAD					Nilai Max	Nilai Min	INDEKS (%)					Indeks Growth
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Badung	759.801.041.723,00	850.168.320.769,47	979.194.610.828	1.406.298.099.449,01	1.872.350.000.000	1872350000000	759.801.041.723,00	0,0000	0,0812	0,1972	0,5811	1,0000	0,3719
Kab. Bangli	12.655.751.193,09	16.301.547.341,74	16.252.951.099	22.963.226.126,08	40.751.049.552	40751049552	12.655.751.193,09	0,0000	0,1298	0,1280	0,3669	1,0000	0,3249
Kab. Buleleng	52.662.170.356,94	63.487.192.136,76	86.962.001.695	109.167.026.217,90	129.004.000.000	129004000000	52.662.170.356,94	0,0000	0,1418	0,4493	0,7402	1,0000	0,4662

Kab. Gianyar	96.922.244.069,57	112.540.530.034,90	153.559.078.289	209.598.193.886,12	261.222.000.000	261222000000	96.922.244.069,57	0,0000	0,0951	0,3447	0,6858	1,0000	0,4251
Kab. Jembrana	21.235.505.863,05	33.952.879.718,41	34.380.822.968	41.330.605.674,41	46.470.110.901	46470110901	21.235.505.863,05	0,0000	0,5040	0,5209	0,7963	1,0000	0,5642
Kab. Karangasem	43.005.826.519,06	47.842.959.879,78	62.696.409.427	129.556.195.519,69	144.020.000.000	144020000000	43.005.826.519,06	0,0000	0,0479	0,1949	0,8568	1,0000	0,4199
Kab. Klungkung	29.028.565.012,08	29.566.916.897,61	31.331.319.426	40.735.838.605,58	48.561.524.509	48561524509	29.028.565.012,08	0,0000	0,0276	0,1179	0,5994	1,0000	0,3490
Kab. Tabanan	54.675.811.807,28	93.840.477.885,31	116.860.678.337	141.046.016.976,85	183.295.000.000	183295000000	54.675.811.807,28	0,0000	0,3045	0,4835	0,6715	1,0000	0,4919
Kota Denpasar	176.244.773.924,85	215.156.916.393,03	260.482.616.202	424.959.412.894,23	511.327.000.000	511327000000	176.244.773.924,85	0,0000	0,1161	0,2514	0,7422	1,0000	0,4220

5.2 INDEKS SHARE PAD

JAWA BARAT

Kabupaten /Kota	SHARE PAD					MAKS. (%)	MIN. (%)	INDEKS (%)					RATA INDEKS (%)
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bandung	0,097737	0,103484	0,0958	0,119858	0,131345	0,131345	0,0958	0,054496	0,216183	0	0,67685	1	0,389506
Kab. Bekasi	0,239449	0,2339	0,153785	0,25786	0,30831	0,30831	0,153785	0,554372	0,518459	0	0,673514	1	0,549269
Kab. Bogor	0,174914	0,205638	0,153355	0,217145	0,289401	0,289401	0,153355	0,158467	0,384301	0	0,468882	1	0,40233
Kab. Ciamis	0,035699	0,04582	0,036579	0,036221	0,049718	0,049718	0,035699	0	0,721912	0,062739	0,037213	1	0,364373

Kab. Cianjur	0,063492	0,087219	0,07969	0,08289	0,109406	0,109406	0,063492	0	0,516768	0,3528	0,422491	1	0,458412
Kab. Cirebon	0,088924	0,112948	0,09696	0,115135	0,113122	0,115135	0,088924	0	0,916546	0,306577	1	0,923194	0,629263
Kab. Garut	0,06019	0,076741	0,064482	0,06087	0,086433	0,086433	0,06019	0	0,630675	0,163554	0,025907	1	0,364027
Kab. Indramayu	0,053514	0,085693	0,07835	0,09213	0,089328	0,09213	0,053514	0	0,833302	0,643161	1	0,927442	0,680781
Kab. Karawang	0,107658	0,10489	0,138072	0,206642	0,276403	0,276403	0,10489	0,016138	0	0,193467	0,593261	1	0,360573
Kab. Kuningan	0,049214	0,07902	0,060445	0,066473	0,068065	0,07902	0,049214	0	1	0,376793	0,579048	0,632455	0,517659
Kab. Majalengka	0,054059	0,073396	0,067339	0,067262	0,068023	0,073396	0,054059	0	1	0,686763	0,682803	0,722161	0,618345
Kab. Purwakarta	0,095232	0,103553	0,088645	0,11601	0,136004	0,136004	0,088645	0,139095	0,314787	0	0,577818	1	0,40634
Kab. Subang	0,060959	0,07475	0,060945	0,069672	0,081649	0,081649	0,060945	0,000704	0,666782	0	0,421501	1	0,417797
Kab. Sukabumi	0,070194	0,072673	0,060951	0,082644	0,093328	0,093328	0,060951	0,285487	0,362029	0	0,670017	1	0,463507
Kab. Sumedang	0,097438	0,109461	0,096984	0,112597	0,11372	0,11372	0,096984	0,027127	0,745501	0	0,932907	1	0,541107
Kab. Tasikmalaya	0,045798	0,039607	0,035643	0,034076	0,033486	0,045798	0,033486	1	0,497169	0,175247	0,047961	0	0,344075
Kota Bandung	0,152812	0,194748	0,175156	0,270507	0,288129	0,288129	0,152812	0	0,309914	0,165127	0,869773	1	0,468963
Kota Bekasi	0,15101	0,1999	0,18579	0,286848	0,292345	0,292345	0,15101	0	0,345917	0,246083	0,961102	1	0,51062
Kota Bogor	0,145131	0,177411	0,133261	0,214456	0,23972	0,23972	0,133261	0,111505	0,414721	0	0,762694	1	0,457784
Kota Cirebon	0,122486	0,124581	0,121137	0,146805	0,183723	0,183723	0,121137	0,021559	0,055032	0	0,410127	1	0,297344
Kota Depok	0,12776	0,162792	0,13082	0,209429	0,346136	0,346136	0,12776	0	0,160424	0,014016	0,373986	1	0,309685
Kota Sukabumi	0,140508	0,118659	0,16086	0,184904	0,2077	0,2077	0,118659	0,245375	0	0,473953	0,743987	1	0,492663
Kota Tasikmalaya	0,100387	0,134429	0,119031	0,12029	0,14783	0,14783	0,100387	0	0,717528	0,392977	0,419511	1	0,506003
Kota Cimahi	0,127023	0,168311	0,137254	0,158035	0,173433	0,173433	0,127023	0	0,889649	0,220462	0,668222	1	0,555666

Kota Banjar	0,069779	0,065675	0,103212	0,094852	0,106544	0,106544	0,065675	0,100431	0	0,918457	0,713909	1	0,546559
Kab. Bandung Barat	0,057505	0,060603	0,049855	0,075588	0,090755	0,090755	0,049855	0,187027	0,262768	0	0,629171	1	0,415793

JAWA TENGAH

Kabupaten /Kota	SHARE PAD					MAKS. (%)	MIN. (%)	INDEKS (%)					RATA INDEKS (%)
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Banjarnegara	0,064953	0,092277	0,072317	0,068506	0,084841	0,092277	0,064953	0	1	0,269536	0,130055	0,727886	0,425495
Kab. Banyumas	0,110301	0,112635	0,139931	0,12999	0,139765	0,139931	0,110301	0	0,078766	1	0,664483	0,994392	0,547528
Kab. Batang	0,071197	0,07108	0,079725	0,080451	0,098272	0,098272	0,07108	0,004321	0	0,31794	0,344642	1	0,333381
Kab. Blora	0,063782	0,067729	0,059075	0,072392	0,072868	0,072868	0,059075	0,341232	0,627398	0	0,965448	1	0,586816
Kab. Boyolali	0,080343	0,086638	0,095134	0,088033	0,100866	0,100866	0,080343	0	0,306688	0,720694	0,374677	1	0,480412
Kab. Brebes	0,074055	0,101051	0,064568	0,060032	0,073346	0,101051	0,060032	0,341876	1	0,110589	0	0,324577	0,355408
Kab. Cilacap	0,08766	0,103381	0,121003	0,111159	0,114726	0,121003	0,08766	0	0,471505	1	0,704772	0,811745	0,597604
Kab. Demak	0,063374	0,084547	0,068771	0,057182	0,08723	0,08723	0,057182	0,206063	0,910692	0,385672	0	1	0,500486
Kab. Grobogan	0,068828	0,111783	0,08693	0,075003	0,087726	0,111783	0,068828	0	1	0,421425	0,143768	0,439946	0,401028
Kab. Jepara	0,095781	0,107768	0,099392	0,094586	0,102683	0,107768	0,094586	0,090653	1	0,364582	0	0,614277	0,413902
Kab. Karanganyar	0,083421	0,09265	0,090742	0,106402	0,099647	0,106402	0,083421	0	0,401566	0,318542	1	0,706027	0,485227
Kab. Kebumen	0,068199	0,080189	0,058212	0,062542	0,075272	0,080189	0,058212	0,454411	1	0	0,197045	0,776265	0,485544
Kab. Kendal	0,09478	0,097645	0,09496	0,084053	0,103233	0,103233	0,084053	0,559264	0,708668	0,568689	0	1	0,567324
Kab. Klaten	0,049543	0,054165	0,052578	0,054921	0,058893	0,058893	0,049543	0	0,494402	0,324658	0,575213	1	0,478855
Kab. Kudus	0,098469	0,095546	0,104121	0,114435	0,10542	0,114435	0,095546	0,154736	0	0,453982	1	0,522748	0,426293
Kab. Magelang	0,091515	0,101955	0,078244	0,085203	0,107914	0,107914	0,078244	0,447283	0,799164	0	0,234537	1	0,496197

Kab. Pati	0,089418	0,114527	0,113722	0,112319	0,115148	0,115148	0,089418	0	0,975868	0,944556	0,890029	1	0,762091
Kab. Pekalongan	0,082145	0,084776	0,093193	0,090906	0,113816	0,113816	0,082145	0	0,083072	0,34884	0,276642	1	0,341711
Kab. Pemalang	0,087005	0,114352	0,082476	0,067595	0,081868	0,114352	0,067595	0,415133	1	0,318263	0	0,305271	0,407733
Kab. Purbalingga	0,09014	0,111645	0,116225	0,105198	0,095708	0,116225	0,09014	0	0,824416	1	0,577282	0,213444	0,523028
Kab. Purworejo	0,073953	0,093862	0,08532	0,091853	0,087475	0,093862	0,073953	0	1	0,570971	0,89909	0,679227	0,629858
Kab. Rembang	0,086284	0,107242	0,096275	0,085169	0,106595	0,107242	0,085169	0,050547	1	0,503143	0	0,970686	0,504875
Kab. Semarang	0,10441	0,114447	0,122208	0,127827	0,132443	0,132443	0,10441	0	0,358052	0,634887	0,835327	1	0,565653
Kab. Sragen	0,081638	0,103124	0,088196	0,091754	0,106704	0,106704	0,081638	0	0,857178	0,261634	0,403559	1	0,504474
Kab. Sukoharjo	0,058426	0,074588	0,0826	0,099321	0,137829	0,137829	0,058426	0	0,203549	0,304445	0,515034	1	0,404606
Kab. Tegal	0,067781	0,100705	0,076126	0,08078	0,088133	0,100705	0,067781	0	1	0,253458	0,39482	0,618149	0,453285
Kab. Temanggung	0,062032	0,077974	0,083381	0,077612	0,086027	0,086027	0,062032	0	0,664378	0,88976	0,649292	1	0,640686
Kab. Wonogiri	0,063957	0,071747	0,067396	0,070662	0,076823	0,076823	0,063957	0	0,60549	0,267295	0,521148	1	0,478787
Kab. Wonosobo	0,06074	0,093472	0,077224	0,075862	0,083459	0,093472	0,06074	0	1	0,503605	0,461986	0,694078	0,531934
Kota Magelang	0,104905	0,115585	0,145019	0,135399	0,170252	0,170252	0,104905	0	0,163426	0,613854	0,466637	1	0,448783
Kota Pekalongan	0,075782	0,083907	0,11625	0,129377	0,16935	0,16935	0,075782	0	0,086837	0,432504	0,572789	1	0,418426
Kota Salatiga	0,122552	0,188123	0,123143	0,132161	0,141033	0,188123	0,122552	0	1	0,009016	0,146538	0,28185	0,287481
Kota Semarang	0,202153	0,237553	0,1893	0,256085	0,379684	0,379684	0,1893	0,067515	0,25345	0	0,350791	1	0,334351
Kota Surakarta	0,135499	0,136461	0,137973	0,184295	0,202304	0,202304	0,135499	0	0,0144	0,037036	0,730432	1	0,356373
Kota Tegal	0,176926	0,198074	0,213597	0,204969	0,26703	0,26703	0,176926	0	0,234708	0,406983	0,311232	1	0,390585

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Kabupaten /Kota	SHARE PAD					MAKS. (%)	MIN. (%)	INDEKS (%)					RATA INDEKS (%)
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bantul	0,066768	0,111981	0,080782	0,1119	0,13006	0,13006	0,066768	0	0,714359	0,221424	0,71308	1	0,529773
Kab. Gunung Kidul	0,045877	0,068992	0,058905	0,05801	0,065477	0,068992	0,045877	0	1	0,563639	0,524895	0,847936	0,587294
Kab. Kulon Progo	0,070711	0,068126	0,079028	0,069024	0,084173	0,084173	0,068126	0,16109	0	0,679384	0,055992	1	0,379293
Kab. Sleman	0,166791	0,154751	0,149135	0,18303	0,218893	0,218893	0,149135	0,253103	0,080508	0	0,485898	1	0,363902
Kota Yogyakarta	0,189576	0,232219	0,213634	0,245564	0,33042	0,33042	0,189576	0	0,302767	0,170809	0,39752	1	0,374219
Kab. Bantul	0,066768	0,111981	0,080782	0,1119	0,13006	0,13006	0,066768	0	0,714359	0,221424	0,71308	1	0,529773

JAWA TIMUR

Kabupaten /Kota	SHARE PAD (%)					MAKS. (%)	MIN. (%)	INDEKS (%)					RATA INDEKS (%)
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bangkalan	0,044938	0,048181	0,05162	0,058646	0,065789	0,065789	0,044938	0	0,155529	0,320444	0,657412	1	0,426677
Kab. Banyuwangi	0,07704	0,099861	0,074313	0,078563	0,083	0,099861	0,074313	0,106737	1	0	0,166362	0,340029	0,322626
Kab. Blitar	0,052913	0,062577	0,058407	0,06585	0,069856	0,069856	0,052913	0	0,57038	0,324263	0,763544	1	0,531637
Kab. Bojonegoro	0,063793	0,074545	0,072528	0,127873	0,094112	0,127873	0,063793	0	0,167786	0,136312	1	0,473132	0,355446
Kab. Bondowoso	0,05886	0,056854	0,064877	0,070262	0,072474	0,072474	0,056854	0,128395	0	0,513616	0,858413	1	0,500085
Kab. Gresik	0,148772	0,166785	0,154623	0,216407	0,295029	0,295029	0,148772	0	0,123159	0,040005	0,46244	1	0,325121

Kab. Jember	0,107935	0,100995	0,100422	0,102291	0,12257	0,12257	0,100422	0,339198	0,025882	0	0,084406	1	0,289897
Kab. Jombang	0,116769	0,115232	0,11405	0,114516	0,126498	0,126498	0,11405	0,218444	0,094943	0	0,037397	1	0,270157
Kab. Kediri	0,070045	0,102522	0,065839	0,072875	0,087239	0,102522	0,065839	0,114678	1	0	0,191805	0,583394	0,377976
Kab. Lamongan	0,07735	0,092354	0,091188	0,077443	0,08786	0,092354	0,07735	0	1	0,922282	0,006145	0,700467	0,525779
Kab. Lumajang	0,075617	0,095527	0,091595	0,084758	0,091934	0,095527	0,075617	0	1	0,802492	0,459114	0,81952	0,616225
Kab. Madiun	0,040123	0,052691	0,058545	0,066534	0,066825	0,066825	0,040123	0	0,470696	0,689928	0,989112	1	0,629947
Kab. Magetan	0,060635	0,082547	0,070633	0,067221	0,076853	0,082547	0,060635	0	1	0,456285	0,30058	0,740151	0,499403
Kab. Malang	0,074992	0,110631	0,078865	0,090069	0,089325	0,110631	0,074992	0	1	0,108673	0,423046	0,402177	0,386779
Kab. Mojokerto	0,068314	0,086706	0,09062	0,103076	0,132335	0,132335	0,068314	0	0,287271	0,348411	0,542971	1	0,435731
Kab. Nganjuk	0,075928	0,103347	0,084566	0,083642	0,092907	0,103347	0,075928	0	1	0,315039	0,281336	0,619253	0,443126
Kab. Ngawi	0,031132	0,036502	0,031463	0,057058	0,052783	0,057058	0,031132	0	0,207143	0,012782	1	0,835088	0,411003
Kab. Pacitan	0,040361	0,04621	0,04352	0,057576	0,059548	0,059548	0,040361	0	0,30485	0,164654	0,897243	1	0,473349
Kab. Pamekasan	0,057002	0,074428	0,065353	0,076509	0,076808	0,076808	0,057002	0	0,879824	0,421619	0,984892	1	0,657267
Kab. Pasuruan	0,095585	0,089684	0,089133	0,117761	0,12698	0,12698	0,089133	0,170484	0,01456	0	0,756396	1	0,388288
Kab. Ponorogo	0,051897	0,072773	0,053546	0,062261	0,086117	0,086117	0,051897	0	0,610037	0,048184	0,302863	1	0,392217
Kab. Probolinggo	0,090732	0,076741	0,053071	0,067998	0,069753	0,090732	0,053071	1	0,6285	0	0,396352	0,442939	0,493558
Kab. Sampang	0,0501	0,049001	0,044661	0,053939	0,061559	0,061559	0,044661	0,321861	0,256815	0	0,549033	1	0,425542
Kab. Sidoarjo	0,174412	0,20753	0,226396	0,268338	0,304903	0,304903	0,174412	0	0,253798	0,398376	0,719794	1	0,474394
Kab. Situbondo	0,060289	0,05394	0,067534	0,073517	0,07231	0,073517	0,05394	0,324341	0	0,694373	1	0,938326	0,591408
Kab. Sumenep	0,054631	0,05069	0,049262	0,052286	0,067268	0,067268	0,049262	0,298199	0,079333	0	0,16794	1	0,309094
Kab. Trenggalek	0,050171	0,065701	0,066979	0,067403	0,06742	0,06742	0,050171	0	0,900353	0,974459	0,999044	1	0,774771
Kab. Tuban	0,117803	0,165694	0,112671	0,129881	0,146511	0,165694	0,112671	0,096799	1	0	0,32459	0,638217	0,411921
Kab. Tulungagung	0,070621	0,098438	0,085852	0,096077	0,102837	0,102837	0,070621	0	0,863452	0,472782	0,790184	1	0,625284
Kota Blitar	0,11462	0,144603	0,114116	0,098559	0,122808	0,144603	0,098559	0,348828	1	0,337884	0	0,52664	0,44267
Kota Kediri	0,142559	0,125637	0,129826	0,165539	0,145237	0,165539	0,125637	0,424089	0	0,104966	1	0,49119	0,404049

Kota Madiun	0,076526	0,112622	0,088952	0,116362	0,117979	0,117979	0,076526	0	0,870778	0,299764	0,961009	1	0,62631
Kota Malang	0,121343	0,114291	0,117254	0,177279	0,183515	0,183515	0,114291	0,101872	0	0,042794	0,909925	1	0,410918
Kota Mojokerto	0,070023	0,100913	0,078264	0,102926	0,109296	0,109296	0,070023	0	0,786532	0,209829	0,837794	1	0,566831
Kota Pasuruan	0,084178	0,086542	0,081889	0,099575	0,086831	0,099575	0,081889	0,129384	0,263089	0	1	0,279393	0,334373
Kota Probolinggo	0,090732	0,088092	0,091535	0,09927	0,113326	0,113326	0,088092	0,104592	0	0,136444	0,442977	1	0,336803
Kota Surabaya	0,360727	0,258939	0,24983	0,502573	0,530395	0,530395	0,24983	0,395263	0,032467	0	0,900838	1	0,465713
Kota Batu	0,064966	0,06921	0,044255	0,069385	0,089143	0,089143	0,044255	0,461388	0,55594	0	0,559838	1	0,515433

BANTEN

Kabupaten /Kota	SHARE PAD					MAKS. (%)	MIN. (%)	INDEKS (%)					RATA INDEKS (%)
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Lebak	0,063336	0,069818	0,07184	0,079393	0,112791	0,112791	0,063336	0	0,131066	0,17195	0,324672	1	0,325538
Kab. Pandeglang	0,0476	0,043934	0,034261	0,048067	0,042881	0,048067	0,034261	0,966169	0,700616	0	1	0,62435	0,658227
Kab. Serang	0,129944	0,135883	0,135837	0,184842	0,179486	0,184842	0,129944	0	0,108195	0,107357	1	0,902436	0,423598
Kab. Tangerang	0,199286	0,185013	0,148343	0,328028	0,309984	0,328028	0,148343	0,28351	0,204077	0	1	0,89958	0,477433
Kota Cilegon	0,221659	0,221874	0,223368	0,301934	0,381001	0,381001	0,221659	0	0,001346	0,01072	0,503789	1	0,303171
Kota Tangerang	0,182457	0,175403	0,165242	0,305122	0,328019	0,328019	0,165242	0,105758	0,062421	0	0,859336	1	0,405503

BALI

Kabupaten /Kota	SHARE PAD					MAKS. (%)	MIN. (%)	INDEKS (%)					RATA INDEKS (%)
	2008	2009	2010	2011	2012			2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Badung	0,707	0,59475	0,814183	0,894472	0,873738	0,894472	0,59475	0,374513	0	0,732123	1	0,930822	0,607492
Kab. Bangli	0,03089	0,040208	0,036517	0,042665	0,494906	0,494906	0,03089	0	0,020081	0,012126	0,025375	1	0,211516
Kab. Buleleng	0,073636	0,082489	0,104172	0,10547	0,114822	0,114822	0,073636	0	0,214938	0,741415	0,772927	1	0,545856
Kab. Gianyar	0,15402	0,157643	0,208633	0,250689	0,265921	0,265921	0,15402	0	0,032377	0,488051	0,863881	1	0,476862
Kab. Jembrana	0,047691	0,070863	0,071834	0,078873	0,069909	0,078873	0,047691	0	0,743127	0,774274	1	0,712535	0,645987
Kab. Karangasem	0,071319	0,075951	0,099479	0,168589	0,839126	0,839126	0,071319	0	0,006032	0,036675	0,126685	1	0,233878
Kab. Klungkung	0,071787	0,065812	0,07094	0,082442	0,597878	0,597878	0,065812	0,01123	0	0,009637	0,031256	1	0,210425
Kab. Tabanan	0,088987	0,133873	0,151413	0,16026	0,17256	0,17256	0,088987	0	0,537091	0,746964	0,852821	1	0,627375
Kota Denpasar	0,267335	0,275571	0,280832	0,386281	0,390466	0,390466	0,267335	0	0,066887	0,109612	0,966015	1	0,428503

5.3 INDEKS ELASTISITAS

JAWA BARAT

KOTA	ELASTISITAS (%)							INDEKS ELASTISITAS (%)					INDEKS ELASTISITAS
	2008	2009	2010	2011	2012	MAKS.	MIN	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bandung	0,003779	0,003715	0,00431	0,005675	0,006419	0,006419	0,003715	0,023748	0	0,220144	0,724853	1	0,486249
Kab. Bekasi	0,003002	0,003202	0,002652	0,005611	0,006885	0,006885	0,002652	0,082522	0,129788	0	0,698997	1	0,457196
Kab. Bogor	0,005269	0,005113	0,005463	0,008394	0,01093	0,01093	0,005113	0,026727	0	0,060184	0,564073	1	0,406064
Kab. Ciamis	0,00323	0,003237	0,002875	0,003045	0,004141	0,004141	0,002875	0,280896	0,286056	0	0,134308	1	0,355091
Kab. Cianjur	0,005027	0,005594	0,000619	0,007162	0,009691	0,009691	0,000619	0,485872	0,548336	0	0,721215	1	0,567388
Kab. Cirebon	0,006522	0,00675	0,007074	0,009552	0,010054	0,010054	0,006522	0	0,064621	0,156279	0,857857	1	0,519689
Kab. Garut	0,004091	0,004611	0,004384	0,004453	0,006112	0,006112	0,004091	0	0,257323	0,144638	0,178836	1	0,395199
Kab. Indramayu	0,004001	0,00524	0,005585	0,006974	0,006862	0,006974	0,004001	0	0,416729	0,532936	1	0,962246	0,727978
Kab. Karawang	0,003244	0,002864	0,003721	0,005793	0,009489	0,009489	0,002864	0,05736	0	0,129349	0,442073	1	0,392855
Kab. Kuningan	0,006076	0,007773	0,007464	0,008276	0,00885	0,00885	0,006076	0	0,61166	0,50024	0,79308	1	0,726245
Kab. Majalengka	0,005866	0,007676	0,00762	0,007958	0,008783	0,008783	0,005866	0	0,62036	0,601277	0,717257	1	0,734724
Kab. Purwakarta	0,004497	0,004524	0,004793	0,006384	0,007882	0,007882	0,004497	0	0,008113	0,087642	0,557385	1	0,413285
Kab. Subang	0,005207	0,004974	0,005138	0,005917	0,007035	0,007035	0,004974	0,112887	0	0,079399	0,457521	1	0,38423
Kab. Sukabumi	0,005516	0,004758	0,005375	0,007639	0,008684	0,008684	0,004758	0,193214	0	0,157186	0,733708	1	0,472723
Kab. Sumedang	0,008568	0,009311	0,008858	0,010333	0,010842	0,010842	0,008568	0	0,326905	0,127446	0,776213	1	0,557641
Kab. Tasikmalaya	0,004506	0,004168	0,003785	0,00382	0,004009	0,004506	0,003785	1	0,53155	0	0,049323	0,310483	0,222839
Kota Bandung	0,005205	0,005124	0,005388	0,008715	0,090495	0,090495	0,005124	0,000946	0	0,003092	0,042057	1	0,261287
Kota Bekasi	0,006418	0,007361	0,008298	0,014023	0,015935	0,015935	0,006418	0	0,099105	0,197484	0,799104	1	0,523923

Kota Bogor	0,00969	0,009737	0,009166	0,01488	0,017464	0,017464	0,009166	0,063118	0,068857	0	0,688665	1	0,439381
Kota Cirebon	0,007283	0,007828	0,008309	0,009914	0,011131	0,011131	0,007283	0	0,135279	0,254758	0,653293	1	0,510833
Kota Depok	0,008992	0,008228	0,008821	0,015784	0,023733	0,023733	0,008228	0,04924	0	0,038258	0,487358	1	0,381404
Kota Sukabumi	0,017383	0,01506	0,017676	0,021824	0,022287	0,022287	0,01506	0,32137	0	0,361902	0,935976	1	0,57447
Kota Tasikmalaya	0,008929	0,009846	0,012373	0,0119	0,015072	0,015072	0,008929	0	0,149324	0,560696	0,483634	1	0,548413
Kota Cimahi	0,006062	0,006422	0,006798	0,008237	0,009299	0,009299	0,006062	0	0,111154	0,227099	0,6718	1	0,502513
Kota Banjar	0,016585	0,016227	0,021107	0,023577	0,025589	0,025589	0,016227	0,038213	0	0,521197	0,785098	1	0,576574
Kab. Bandung Barat	0,000556	0,000569	0,000614	0,000989	0,001226	0,001226	0,000556	0	0,018599	0,086643	0,646724	1	0,437991

JAWA TENGAH

KOTA	ELASTISITAS (%)							INDEKS ELASTISITAS (%)					INDEKS ELASTISITAS
	2008	2009	2010	2011	2012	MAKS.	MIN	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Banjarnegara	0,017756	0,022018	0,021633	0,023463	0,029552	0,029552	0,017756	0	0,361306	0,328627	0,483824	1	0,543439
Kab. Banyumas	0,025753	0,027388	0,035425	0,038946	0,046363	0,046363	0,025753	0	0,079334	0,469323	0,640129	1	0,547197
Kab. Batang	0,018984	0,019836	0,019226	0,02419	0,032435	0,032435	0,018984	0	0,063347	0,018004	0,387037	1	0,367097
Kab. Blora	0,02558	0,024714	0,02226	0,030883	0,035975	0,035975	0,02226	0,242088	0,17891	0	0,628723	1	0,451908
Kab. Boyolali	0,016345	0,017072	0,020359	0,021631	0,027026	0,027026	0,016345	0	0,068119	0,375826	0,494899	1	0,484711
Kab. Brebes	0,014419	0,015297	0,012896	0,01354	0,016739	0,016739	0,012896	0,396254	0,624627	0	0,167627	1	0,448063
Kab. Cilacap	0,008793	0,009815	0,011518	0,012534	0,013547	0,013547	0,008793	0	0,214905	0,573181	0,786885	1	0,643743
Kab. Demak	0,01572	0,017316	0,018788	0,023624	0,031899	0,031899	0,01572	0	0,098614	0,189625	0,488494	1	0,444183
Kab. Grobogan	0,020322	0,024888	0,024088	0,026084	0,029475	0,029475	0,020322	0	0,498811	0,411395	0,629513	1	0,63493
Kab. Jepara	0,018321	0,017604	0,019838	0,023008	0,0271	0,0271	0,017604	0,075495	0	0,235262	0,569118	1	0,451095
Kab. Karanganyar	0,013155	0,012948	0,014583	0,018095	0,019173	0,019173	0,012948	0,033286	0	0,26254	0,826721	1	0,522315
Kab. Kebumen	0,021534	0,02228	0,019941	0,023794	0,031714	0,031714	0,019941	0,135315	0,198671	0	0,32726	1	0,381483
Kab. Kendal	0,014869	0,015089	0,01599	0,016317	0,019914	0,019914	0,014869	0	0,043604	0,222308	0,287004	1	0,388229

Kab. Klaten	0,010849	0,011162	0,011332	0,01464	0,016262	0,016262	0,010849	0	0,05784	0,089322	0,700315	1	0,461869
Kab. Kudus	0,006121	0,006838	0,007433	0,008227	0,008798	0,008798	0,006121	0	0,26771	0,490127	0,786591	1	0,636107
Kab. Magelang	0,020769	0,019189	0,018477	0,021075	0,027234	0,027234	0,018477	0,261733	0,081364	0	0,296733	1	0,344524
Kab. Pati	0,01934	0,020809	0,02457	0,027849	0,031762	0,031762	0,01934	0	0,118242	0,421007	0,684989	1	0,556059
Kab. Pekalongan	0,018611	0,018872	0,02092	0,024041	0,0322	0,0322	0,018611	0	0,01924	0,169944	0,39956	1	0,397186
Kab. Pemalang	0,021238	0,024846	0,02212	0,021994	0,025682	0,025682	0,021238	0	0,811875	0,198483	0,170167	1	0,545131
Kab. Purbalingga	0,028262	0,034799	0,031594	0,035439	0,036457	0,036457	0,028262	0	0,797639	0,406618	0,875816	1	0,770018
Kab. Purworejo	0,018697	0,02117	0,023075	0,028074	0,029526	0,029526	0,018697	0	0,228343	0,40434	0,865935	1	0,624655
Kab. Rembang	0,024422	0,026015	0,028765	0,031006	0,041305	0,041305	0,024422	0	0,094345	0,257254	0,389948	1	0,435387
Kab. Semarang	0,016331	0,017052	0,017774	0,022664	0,025085	0,025085	0,016331	0	0,082452	0,164839	0,723421	1	0,492678
Kab. Sragen	0,024109	0,025119	0,025947	0,028904	0,036631	0,036631	0,024109	0	0,080726	0,146799	0,382979	1	0,402626
Kab. Sukoharjo	0,009227	0,010268	0,012946	0,01847	0,030162	0,030162	0,009227	0	0,049705	0,177618	0,441506	1	0,417207
Kab. Tegal	0,018001	0,020479	0,020143	0,023708	0,029678	0,029678	0,018001	0	0,212228	0,183469	0,488769	1	0,471117
Kab. Temanggung	0,017089	0,020489	0,022915	0,025122	0,029651	0,029651	0,017089	0	0,270681	0,463779	0,639478	1	0,593485
Kab. Wonogiri	0,019538	0,019677	0,021708	0,024613	0,030077	0,030077	0,019538	0	0,013126	0,20592	0,481525	1	0,425143
Kab. Wonosobo	0,021916	0,025578	0,027572	0,034141	0,039622	0,039622	0,021916	0	0,206863	0,319474	0,690451	1	0,554197
Kota Magelang	0,040758	0,045666	0,053715	0,054353	0,073345	0,073345	0,040758	0	0,150606	0,3976	0,417204	1	0,491352
Kota Pekalongan	0,015942	0,016298	0,022757	0,028782	0,039245	0,039245	0,015942	0	0,015261	0,292432	0,551011	1	0,464676
Kota Salatiga	0,054254	0,061022	0,056461	0,06291	0,076574	0,076574	0,054254	0	0,303244	0,098881	0,387839	1	0,447491
Kota Semarang	0,013985	0,015169	0,015351	0,022939	0,032221	0,032221	0,013985	0	0,064892	0,074905	0,490985	1	0,407696
Kota Surakarta	0,022638	0,021165	0,022325	0,033463	0,04034	0,04034	0,021165	0,076822	0	0,060494	0,641333	1	0,425457
Kota Tegal	0,059633	0,07415	0,079063	0,087481	0,111266	0,111266	0,059633	0	0,281147	0,376312	0,539338	1	0,549199

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KOTA	ELASTISITAS (%)							INDEKS ELASTISITAS (%)					INDEKS ELASTISITAS
	2008	2009	2010	2011	2012	MAKS.	MIN	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bantul	0,019282	0,023463	0,020564	0,030836	0,037863	0,037863	0,019282	0	0,225031	0,068969	0,621838	1	0,478959
Kab. Gunung Kidul	0,010719	0,012017	0,012775	0,015695	0,018405	0,018405	0,010719	0	0,168901	0,267528	0,647404	1	0,520958
Kab. Kulon Progo	0,025475	0,022751	0,027124	0,028745	0,037712	0,037712	0,022751	0,182121	0	0,292307	0,400625	1	0,423233
Kab. Sleman	0,026171	0,025776	0,025598	0,033941	0,042428	0,042428	0,025598	0,034085	0,010579	0	0,495708	1	0,376572
Kota Yogyakarta	0,026381	0,030757	0,032563	0,038595	0,054988	0,054988	0,026381	0	0,152975	0,216119	0,426981	1	0,449019

JAWA TIMUR

KOTA	ELASTISITAS (%)							INDEKS ELASTISITAS (%)					INDEKS ELASTISITAS
	2008	2009	2010	2011	2012	MAKS.	MIN	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Bangkalan	0,005308	0,005171	0,005511	0,007791	0,008476	0,008476	0,005171	0,041494	0	0,103033	0,792751	1	0,473946
Kab. Banyuwangi	0,003874	0,004196	0,003848	0,004189	0,004545	0,004545	0,003848	0,037348	0,499545	0	0,489889	1	0,497359
Kab. Blitar	0,009597	0,010804	0,011169	0,012527	0,014809	0,014809	0,009597	0	0,231688	0,301704	0,562265	1	0,523914
Kab. Bojonegoro	5,320066	5,653996	3,597847	5,959851	5,300637	5,959851	3,597847	0,729135	0,87051	0	1	0,720909	0,647855
Kab. Bondowoso	0,006259	0,006415	0,007104	0,008534	0,008817	0,008817	0,006259	0	0,060868	0,330325	0,889118	1	0,570078
Kab. Gresik	0,004741	0,005227	0,004432	0,006091	0,008531	0,008531	0,004432	0,075427	0,193946	0	0,404676	1	0,399655
Kab. Jember	0,006736	0,010916	0,005969	0,006428	0,007952	0,010916	0,005969	0,154909	1	0	0,092775	0,400855	0,373408
Kab. Jombang	0,008635	0,007206	0,007763	0,007826	0,009099	0,009099	0,007206	0,754913	0	0,294237	0,32772	1	0,405489
Kab. Kediri	0,00489	5,60123	4,602718	5,539144	6,582869	6,582869	0,00489	0	0,850769	0,698973	0,84133	1	0,847768
Kab. Lamongan	0,0073	0,006899	0,008089	0,007395	0,008428	0,008428	0,006899	0,262548	0	0,778321	0,324583	1	0,525726
Kab. Lumajang	0,004938	0,005283	0,004977	0,004777	0,005794	0,005794	0,004777	0,158484	0,497222	0,196882	0	1	0,423526

Kab. Madiun	0,004778	0,004924	0,006528	0,007458	0,007807	0,007807	0,004778	0	0,048441	0,577673	0,884669	1	0,627696
Kab. Magetan	0,006561	0,007429	0,007039	0,007461	0,008435	0,008435	0,006561	0	0,463037	0,254858	0,480033	1	0,549482
Kab. Malang	0,004009	0,005532	0,004156	0,004831	0,004839	0,005532	0,004009	0	1	0,09681	0,539669	0,545121	0,5454
Kab. Mojokerto	0,00386	0,003719	0,004356	0,005235	0,006969	0,006969	0,003719	0,043348	0	0,19585	0,466433	1	0,415571
Kab. Nganjuk	0,006807	0,00735	0,007227	0,007662	0,009012	0,009012	0,006807	0	0,246215	0,190377	0,387722	1	0,456079
Kab. Ngawi	0,004102	0,003967	0,003794	0,007582	0,006728	0,007582	0,003794	0,081458	0,045739	0	1	0,77439	0,455032
Kab. Pacitan	0,00884	0,009265	0,008795	0,012924	0,013604	0,013604	0,008795	0,009534	0,097922	0	0,858594	1	0,489129
Kab. Pamekasan	0,009319	0,00818	0,008782	0,01112	0,013269	0,013269	0,00818	0,223751	0	0,118271	0,577667	1	0,423985
Kab. Pasuruan	0,006523	0,006388	0,006439	0,008795	0,009732	0,009732	0,006388	0,040429	0	0,015113	0,719675	1	0,433697
Kab. Ponorogo	0,007367	0,00747	0,006532	0,007845	0,011466	0,011466	0,006532	0,169163	0,190069	0	0,266078	1	0,364037
Kab. Probolinggo	0,003214	0,003224	0,003069	0,004513	0,004771	0,004771	0,003069	0,085049	0,091296	0	0,848617	1	0,484978
Kab. Sampang	0,006404	0,007039	0,006362	0,007296	0,008484	0,008484	0,006362	0,01967	0,318899	0	0,440292	1	0,439798
Kab. Sidoarjo	0,004755	0,005678	0,006303	0,007513	0,009072	0,009072	0,004755	0	0,213951	0,358698	0,638906	1	0,552889
Kab. Situbondo	0,005189	0,004601	0,00563	0,006641	0,006388	0,006641	0,004601	0,28814	0	0,504082	1	0,875682	0,594941
Kab. Sumenep	0,005296	0,004784	0,00417	0,004592	0,00706	0,00706	0,00417	0,389395	0,212217	0	0,14603	1	0,339562
Kab. Trenggalek	0,007587	0,007781	0,009123	0,009492	0,009324	0,009492	0,007587	0	0,101707	0,806458	1	0,911609	0,704944
Kab. Tuban	0,006082	0,006188	0,005586	0,006407	0,008004	0,008004	0,005586	0,205213	0,249035	0	0,339264	1	0,397075
Kab. Tulungagung	0,036765	0,046196	0,048383	0,057608	0,067591	0,067591	0,036765	0	0,305958	0,376904	0,676167	1	0,589757
Kota Blitar	0,025506	0,022145	0,023486	0,023121	0,024828	0,025506	0,022145	1	0	0,399107	0,290461	0,798284	0,371963
Kota Kediri	0,001689	0,001762	0,001621	0,001829	0,001638	0,001829	0,001621	0,329847	0,680414	0	1	0,081728	0,440535
Kota Madiun	0,000486	0,007129	0,006528	0,010776	0,01122	0,01122	0,000486	0	0,618893	0,562841	0,958593	1	0,785082
Kota Malang	0,003395	0,003404	0,003684	0,005429	0,005967	0,005967	0,003395	0	0,003778	0,11269	0,790851	1	0,47683
Kota Mojokerto	0,010196	0,011487	0,011288	0,019714	0,015105	0,019714	0,010196	0	0,135641	0,114791	1	0,515763	0,441549
Kota Pasuruan	0,012895	0,015228	0,013129	0,015218	0,012803	0,015228	0,012803	0,03815	1	0,134366	0,996085	0	0,532613
Kota Probolinggo	0,010027	0,009476	0,009588	0,012186	0,011778	0,012186	0,009476	0,203059	0	0,04118	1	0,84945	0,472658
Kota Surabaya	0,004472	0,004535	0,004429	0,008027	0,008624	0,008624	0,004429	0,010233	0,025321	0	0,857603	1	0,470731
Kota Batu	0,007378	0,006097	0,005447	0,008178	0,009268	0,009268	0,005447	0,505243	0,170032	0	0,714877	1	0,471227

BANTEN

KOTA	ELASTISITAS (%)							INDEKS ELASTISITAS (%)					INDEKS ELASTISITAS
	2008	2009	2010	2011	2012	MAKS.	MIN	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Lebak	0,007536	0,007999	0,007589	0,009996	0,006382	0,009996	0,006382	0,319319	0,44727	0,33385	1	0	0,44528
Kab. Pandeglang	0,004825	0,004167	0,003666	0,005841	0,005049	0,005841	0,003666	0,532945	0,230558	0	1	0,635824	0,466595
Kab. Serang	0,012913	0,010314	0,010612	0,015271	0,016149	0,016149	0,010314	0,445427	0	0,051013	0,849544	1	0,475139
Kab. Tangerang	0,011848	0,012072	0,007096	0,01688	0,019036	0,019036	0,007096	0,397968	0,416746	0	0,819394	1	0,559035
Kota Cilegon	0,007207	0,006783	0,00675	0,008058	0,00874	0,00874	0,00675	0,229688	0,01638	0	0,657361	1	0,418435
Kota Tangerang	0,004069	0,006909	0,007378	0,007837	0,008996	0,008996	0,004069	0	0,57637	0,671652	0,764847	1	0,753217

BALI

KOTA	ELASTISITAS (%)							INDEKS ELASTISITAS (%)					INDEKS ELASTISITAS
	2008	2009	2010	2011	2012	MAKS.	MIN	2008	2009	2010	2011	2012	
Kab. Badung	0,072511	0,06603	0,0656	0,08575	0,098721	0,098721	0,0656	0,208671	0,012985	0	0,608376	1	0,40534
Kab. Bangli	0,006864	0,00769	0,006886	0,0089	0,014215	0,014215	0,006864	0	0,11229	0,002905	0,276989	1	0,348046
Kab. Buleleng	0,009002	0,009504	0,011508	0,013171	0,014152	0,014152	0,009002	0	0,097436	0,486679	0,809599	1	0,598429
Kab. Gianyar	0,01736	0,017523	0,020931	0,025817	0,028624	0,028624	0,01736	0	0,014447	0,316988	0,750776	1	0,520553
Kab. Jembrana	0,007344	0,01036	0,009539	0,0105	0,010553	0,010553	0,007344	0	0,939885	0,684144	0,983464	1	0,901873
Kab. Karangasem	0,013491	0,013044	0,015159	0,027949	0,02772	0,027949	0,013044	0,029948	0	0,141854	1	0,98459	0,531611
Kab. Klungkung	0,013541	0,012108	0,0114	0,013476	0,014508	0,014508	0,0114	0,688764	0,227783	0	0,668002	1	0,473946
Kab. Tabanan	0,013533	0,020757	0,023121	0,025502	0,030023	0,030023	0,013533	0	0,438117	0,581486	0,725843	1	0,686362
Kota Denpasar	0,01874	0,020005	0,020843	0,030669	0,032866	0,032866	0,01874	0	0,089553	0,148865	0,844441	1	0,520715

Lampiran 6

INDEKS KEMAMPUAN KEUANGAN

JAWA BARAT

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Bandung	0,3886	0,3895	0,4862	0,4214	Sedang
Kab. Bekasi	0,3439	0,5493	0,4572	0,4501	Tinggi
Kab. Bogor	0,3381	0,4023	0,4061	0,3822	Sedang
Kab. Ciamis	0,2986	0,3644	0,3551	0,3394	Rendah
Kab. Cianjur	0,3763	0,4584	0,5674	0,4674	Tinggi
Kab. Cirebon	0,4254	0,6293	0,5197	0,5248	Tinggi
Kab. Garut	0,3666	0,3640	0,3952	0,3753	Sedang
Kab. Indramayu	0,5012	0,6808	0,7280	0,6366	Tinggi
Kab. Karawang	0,3243	0,3606	0,3929	0,3592	Sedang
Kab. Kuningan	0,5146	0,5177	0,7262	0,5862	Tinggi
Kab. Majalengka	0,5139	0,6183	0,7347	0,6223	Tinggi
Kab. Purwakarta	0,3605	0,4063	0,4133	0,3934	Sedang
Kab. Subang	0,3590	0,4178	0,3842	0,3870	Sedang
Kab. Sukabumi	0,3833	0,4635	0,4727	0,4398	Sedang
Kab. Sumedang	0,4383	0,5411	0,5576	0,5124	Tinggi
Kab. Tasikmalaya	0,3100	0,3441	0,2228	0,2923	Rendah
Kota Bandung	0,4001	0,4690	0,2613	0,3768	Sedang
Kota Bekasi	0,3950	0,5106	0,5239	0,4765	Tinggi

Kota Bogor	0,3777	0,4578	0,4394	0,4250	Sedang
Kota Cirebon	0,4205	0,2973	0,5108	0,4096	Sedang
Kota Depok	0,3119	0,3097	0,3814	0,3343	Rendah
Kota Sukabumi	0,3909	0,4927	0,5745	0,4860	Tinggi
Kota Tasikmalaya	0,4246	0,5060	0,5484	0,4930	Tinggi
Kota Cimahi	0,4115	0,5557	0,5025	0,4899	Tinggi
Kota Banjar	0,4447	0,5466	0,5766	0,5226	Tinggi
Kab. Bandung Barat	0,3639	0,4158	0,4380	0,4059	Sedang

JAWA TENGAH

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Banjarnegara	0,4290	0,4255	0,5434	0,4660	Tinggi
Kab. Banyumas	0,4302	0,5475	0,5472	0,5083	Tinggi
Kab. Batang	0,3224	0,3334	0,3671	0,3410	Sedang
Kab. Blora	0,3399	0,5868	0,4519	0,4595	Tinggi
Kab. Boyolali	0,3939	0,4804	0,4847	0,4530	Tinggi
Kab. Brebes	0,3140	0,3554	0,4481	0,3725	Sedang
Kab. Cilacap	0,4864	0,5976	0,6437	0,5759	Tinggi
Kab. Demak	0,3628	0,5005	0,4442	0,4358	Sedang
Kab. Grobogan	0,4793	0,4010	0,6349	0,5051	Tinggi
Kab. Jepara	0,3608	0,4139	0,4511	0,4086	Rendah

Kab. Karanganyar	0,4188	0,4852	0,5223	0,4755	Rendah
Kab. Kebumen	0,2890	0,4855	0,3815	0,3853	Sedang
Kab. Kendal	0,3703	0,5673	0,3882	0,4419	Tinggi
Kab. Klaten	0,3799	0,4789	0,4619	0,4402	Tinggi
Kab. Kudus	0,4868	0,4263	0,6361	0,5164	Tinggi
Kab. Magelang	0,2743	0,4962	0,3445	0,3717	Sedang
Kab. Pati	0,4311	0,7621	0,5561	0,5831	Tinggi
Kab. Pekalongan	0,3397	0,3417	0,3972	0,3595	Sedang
Kab. Pemalang	0,4416	0,4077	0,5451	0,4648	Tinggi
Kab. Purbalingga	0,5330	0,5230	0,7700	0,6087	Tinggi
Kab. Purworejo	0,4797	0,6299	0,6247	0,5781	Tinggi
Kab. Rembang	0,3654	0,5049	0,4354	0,4352	Sedang
Kab. Semarang	0,4012	0,5657	0,4927	0,4865	Tinggi
Kab. Sragen	0,3597	0,5045	0,4026	0,4223	Sedang
Kab. Sukoharjo	0,3361	0,4046	0,4172	0,3860	Sedang
Kab. Tegal	0,3899	0,4533	0,4711	0,4381	Sedang
Kab. Temanggung	0,4568	0,6407	0,5935	0,5636	Tinggi
Kab. Wonogiri	0,3604	0,4788	0,4251	0,4214	Sedang
Kab. Wonosobo	0,4324	0,5319	0,5542	0,5062	Tinggi
Kota Magelang	0,3940	0,4488	0,4914	0,4447	Tinggi
Kota Pekalongan	0,3728	0,4184	0,4647	0,4186	Sedang
Kota Salatiga	0,3824	0,2875	0,4475	0,3724	Sedang
Kota Semarang	0,3375	0,3344	0,4077	0,3599	Sedang
Kota Surakarta	0,3420	0,3564	0,4255	0,3746	Sedang
Kota Tegal	0,4313	0,3906	0,5492	0,4570	Tinggi

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Bantul	0,3856	0,5298	0,4790	0,4648	Tinggi
Kab. Gunung Kidul	0,4152	0,5873	0,5210	0,5078	Tinggi
Kab. Kulon Progo	0,3514	0,3793	0,4232	0,3846	Sedang
Kab. Sleman	0,3194	0,3639	0,3766	0,3533	Sedang
Kota Yogyakarta	0,3676	0,3742	0,4490	0,3969	Sedang

JAWA TIMUR

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Bangkalan	0,3834	0,4267	0,4739	0,4280	Sedang
Kab. Banyuwangi	0,4266	0,3226	0,4974	0,4155	Sedang
Kab. Blitar	0,4179	0,5316	0,5239	0,4911	Tinggi
Kab. Bojonegoro	0,4518	0,3554	0,6479	0,4850	Tinggi
Kab. Bondowoso	0,4377	0,5001	0,5701	0,5026	Tinggi
Kab. Gresik	0,3407	0,3251	0,3997	0,3552	Sedang
Kab. Jember	0,3074	0,2899	0,3734	0,3236	Rendah
Kab. Jombang	0,3642	0,2702	0,4055	0,3466	Sedang
Kab. Kediri	0,3853	0,3780	0,8478	0,5370	Tinggi

Kab. Lamongan	0,4119	0,5258	0,5257	0,4878	Tinggi
Kab. Lumajang	0,4697	0,6162	0,4235	0,5031	Tinggi
Kab. Madiun	0,4547	0,6299	0,6277	0,5708	Tinggi
Kab. Magetan	0,4309	0,4994	0,5495	0,4933	Tinggi
Kab. Malang	0,5205	0,3868	0,5454	0,4842	Tinggi
Kab. Mojokerto	0,3477	0,4357	0,4156	0,3997	Sedang
Kab. Nganjuk	0,4009	0,4431	0,4561	0,4334	Sedang
Kab. Ngawi	0,4296	0,4110	0,4550	0,4319	Sedang
Kab. Pacitan	0,4050	0,4733	0,4891	0,4558	Tinggi
Kab. Pamekasan	0,4082	0,6573	0,4240	0,4965	Tinggi
Kab. Pasuruan	0,3782	0,3883	0,4337	0,4001	Sedang
Kab. Ponorogo	0,3109	0,3922	0,3640	0,3557	Sedang
Kab. Probolinggo	0,3917	0,4936	0,4850	0,4568	Tinggi
Kab. Sampang	0,3890	0,4255	0,4398	0,4181	Sedang
Kab. Sidoarjo	0,4123	0,4744	0,5529	0,4799	Tinggi
Kab. Situbondo	0,4464	0,5914	0,5949	0,5443	Tinggi
Kab. Sumenep	0,2787	0,3091	0,3396	0,3091	Rendah
Kab. Trenggalek	0,4943	0,7748	0,7049	0,6580	Tinggi
Kab. Tuban	0,3429	0,4119	0,3971	0,3840	Sedang
Kab. Tulungagung	0,4403	0,6253	0,5898	0,5518	Tinggi
Kota Blitar	0,3805	0,4427	0,3720	0,3984	Sedang
Kota Kediri	0,5216	0,4040	0,4405	0,4554	Tinggi
Kota Madiun	0,5073	0,6263	0,7851	0,6396	Tinggi
Kota Malang	0,3934	0,4109	0,4768	0,4270	Sedang
Kota Mojokerto	0,4232	0,5668	0,4415	0,4772	Tinggi
Kota Pasuruan	0,5394	0,3344	0,5326	0,4688	Tinggi

Kota Probolinggo	0,3868	0,3368	0,4727	0,3987	Sedang
Kota Surabaya	0,3831	0,4657	0,4707	0,4398	Sedang
Kota Batu	0,3349	0,5154	0,4712	0,4405	Tinggi

BANTEN

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Lebak	0,3664	0,3255	0,4453	0,3791	Sedang
Kab. Pandeglang	0,3963	0,6582	0,4666	0,5070	Tinggi
Kab. Serang	0,3989	0,4236	0,4751	0,4326	Sedang
Kab. Tangerang	0,4136	0,4774	0,5590	0,4834	Tinggi
Kota Cilegon	0,3473	0,3032	0,4184	0,3563	Sedang
Kota Tangerang	0,3680	0,4055	0,7532	0,5089	Tinggi

BALI

Kabupaten/Kota	Indeks Growth	Indeks Share	Indeks Elastisitas	IKK	Kategori
Kab. Badung	0,3719	0,6075	0,4053	0,4616	Tinggi
Kab. Bangli	0,3249	0,2115	0,3480	0,2948	Rendah
Kab. Buleleng	0,4662	0,5459	0,5984	0,5368	Tinggi
Kab. Gianyar	0,4251	0,4769	0,5206	0,4742	Tinggi
Kab. Jembrana	0,5642	0,6460	0,9019	0,7040	Tinggi
Kab. Karangasem	0,4199	0,2339	0,5316	0,3951	Sedang
Kab. Klungkung	0,3490	0,2104	0,4739	0,3444	Sedang
Kab. Tabanan	0,4919	0,6274	0,6864	0,6019	Tinggi
Kota Denpasar	0,4220	0,4285	0,5207	0,4571	Tinggi